

Dimaksud dengan judul penelitian ini adalah : Peta sosial dan ekonomi umat Islam. Ruang lingkup penelitian ini adalah organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al – Jam’iyatul Washliyah di Sumatera Utara. Hanya dibatasi tiga Ormas saja mengingat cakupan penelitian cukup luas. Pemilihan Ormas tersebut dengan alasan bahwa Ormas tersebut merupakan organisasi yang telah mapan, tertua dan memiliki basis massa yang sangat besar di negeri ini. Penelitian ini melihat suatu gambaran sistematis dan terinci tentang subyek dan obyek seputar kondisi sosial dan ekonomi pada satuan unit organisasi ataupun lembaga keummatan akan diambil berdasarkan kebutuhan yang tersedia. Adapun gambaran petanya meliputi dua hal yakni : Deskripsi keadaan yang dirumuskan dalam bentuk uraian, tabel, grafik dan lainnya yang berkaitan dengan setiap komponen. Kemudian identifikasi masalah sosial dan ekonomi umat Islam.

E. Kerangka Teori

Dimensi sosial dan ekonomi menjadi hal vital dalam kehidupan manusia. Dua hal ini menjadi kebutuhan penting. Mengutip teori kemaslahatan dalam kajian hukum Islam, kedua dimensi ini (sosial-ekonomi) menjadi substansi maqashid al-syariah (maksud syariah) diturunkan kepada manusia. Dua hal yang harus ada dan diperkuat dalam kehidupan manusia, jika tidak manusia mengalami kesulitan hidup. Manusia makhluk sosial dan terus membutuhkan kehidupan sosial dimanapun berada. Bergaul, bermasyarakat dalam berkomunitas adalah identitas manusia. Aristoteles mengatakan manusia merupakan zoon politicon (mahluk sosial), membutuhkan teman dan kelompok sebagai tempat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Manusia juga disebut sebagai makhluk berekonomi dan membutuhkan penguatan ekonomi sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan. Bersosial perlu harta, mengejar pendidikan membutuhkan harta, beribadah perlu harta dan lain sebagainya. Apapun aktivitasnya ekonomi menjadi kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu hubungan sosial dan ekonomi dua hal saling berintegrasi satu dengan yang lainnya.

Dalam konteks lebih luas, eksistensi sosial dan ekonomi menjadi kekuatan yang harus didapatkan dalam kehidupan terutama di kalangan umat Islam. Hal ini turut menentukan terbangunnya peradaban Islam sebagai agama dan umat Islam sebagai pemeluk agama. Islam tidak menginginkan umat yang lemah, karena rapuhnya dimensi sosial dan ekonomi di kalangan umat Islam itu sendiri. Islam menuntut pemeluknya memiliki kekuatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Jika dilirik kembali sejarah, menurut para ahli sejarah yang meneliti Sirah Nabawiyah, terdapat empat pilar kekuatan masyarakat dan negara yang dibangun dan diwariskan oleh Nabi yakni : *Pertama*, kekuatan akidah, dengan menjadikan mesjid sebagai pusat pembinaan akidah, ibadah dan muamalat masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial budayanya. *Kedua*, kekuatan ekonomi yakni dengan membangun etos kerja umat, menegakkan moral para pelaku ekonomi, menggerakkan potensu zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai sistem jaminan sosial melalui peran negara dengan membentuk baitul mal. *Ketiga*, kekuatan sosial. Dalam hal ini Nabi Muhammad saw membangun hubungan persaudaraan ukhuwah Islmiyah, membudayakan tolong menolong diantara sesama muslim. *Keempat*, kekuatan politik. Nabi Muhammad membentuk kontrak politik dengan semua unsur dan komponen masyarakat melalui Piagam Madinah, sebagai piagam negara tertulis pertama di dunia.⁶

Terbagunnya kemajuan peradaban Islam membutuhkan penguatan sosial dan ekonomi di tengah umat Islam itu sendiri. Hal ini tidak akan tercipta jika tidak diungkap dengan berbagai riset untuk mengetahui kondisi kekuatan umat Islam itu sendiri. Kita selalu mengatakan tentang sebuah kemajuan umat Islam dari aspek sosial dan ekonomi, tapi tanpa dibuktikan data. Mengutip tulisan Muhaimin (et.al) mengatakan: kadang terdapat umat Islam masih terjebak dalam romantisme, yakni menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa lalu sebagaimana terwujudnya dalam sejarah Islam, sementara umat

⁶Republika.co.id, 4 Kekuatan Umat Islam Diwariskan Rasulullah, Diakses tgl, 11/06/2019.

Islam saat ini masih silau dalam menghadapi masa depan. Pemikiran ini tidak salah, tetapi suatu kemunduran karena penyimpangan akal dari fungsi sebenarnya. Akal lebih baik dibarengi dengan berbagai usaha serius dan penuh keyakinan untuk dapat mewujudkan dalam realitas kehidupan yang serba maju dan canggih ini.⁷

Upaya melakukan pemetaan kekuatan sosial dan ekonomi umat Islam hari menjadi langkah strategis, mengungkap kekuatan sosial dan ekonomi umat Islam terutama di Sumatera Utara. Melalui berbagai pendekatan rasional – obyektif, peta sosial dan ekonomi umat Islam diharapkan mampu memberikan alternatif problem solving di tengah kondisi sosial dan ekonomi umat Islam itu sendiri. Peta sosial dan ekonomi umat Islam diharap pada arah melakukan penguatan terkait dengan ukhuwah, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan lain sebagainya. Peta sosial dan ekonomi umat Islam diharap menjadi data penting bagi masyarakat, pemerintah dan lainnya.

F. Target Penelitian

Target penelitian ini diharapkan dalam beberapa hal keinginan dan pikiran besar sebagai berikut: (1). Diperoleh data tentang peta sosial dan ekonomi umat Islam di Sumatera Utara (2). Diperoleh data tentang kekuatan sosial dan ekonomi yang dibangun oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan atau lembaga keummatan di Sumatera Utara, yakni ; Fotret organisasi atau lembaga keummatan di Sumatera Utara, kekuatan sosial dan ekonomi dimiliki organisasi dan lembaga keummatan di Sumatera Utara, pola organisasi dan lembaga keummatan dalam memberikan penguatan sosial dan ekonomi umat Islam di Sumatera Utara (3). Hasil penelitian menjadi bahan ajar khususnya di Fakultas Dakwah dan Fakultas Ekonomi di Lingkungan UIN Sumatera Utara. (4). Hasil penelitian menjadi data penting terkait dengan peta sosial dan ekonomi umat Islam di Sumatera Utara.

⁷Muhaimin, et.al, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta : Pranada Media, 2005) h. 4

G. Rencana Target Capaian Luaran

Rencana target luaran penelitian dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Luaran				Indikator Capaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tabahan	TS	TS+1	TS+2
1.	Artikel Ilmiah dimuat di Jurnal	Internasional bereputasi			Draft	Draft	Submitted
2.	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional terindeks			Terdaftar	Terdaftar	Terlaksana
3.	Invited speaker dalam pertemuan ilmiah	Internasional			Terdaftar	Terdaftar	Terlaksana
4.	Visiting lecturer	Internasional			Terdaftar	Terdaftar	Terlaksana
5.	Hak Kekayaan Intelektual	Paten Sederhana			Terdaftar	Terdaftar	Terlaksana
6	Buku Ajar (ISBN)				Draft	Draft	Penerapan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang peta sosial dan ekonomi umat Islam. Metode yang digunakan metode kualitatif. Pendekatan digunakan adalah fenomenologis naturalistik dan psikologi sosial. Pemilihan pendekatan ini didasarkan bahwa data yang hendak dicari adalah data yang menggambarkan tentang kondisi sosial dan ekonomi melalui organisasi dan lembaga keummatan di Sumatera Utara. Selain itu pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam dan natural tentang makna dan fenomena yang ada di lapangan. Ditegaskan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek proses dari hanya sekedar hasil. Menurutnya penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek proses daripada hanya sekedar hasil dan menurutnya penelitian kualitatif memiliki

medan yang alami sebagai sumber data langsung sehingga bersifat naturalistik. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu gambaran sistematis dan terinci tentang subyek dan obyek seputar kondisi sosial dan ekonomi pada satuan unit organisasi ataupun lembaga keummatan akan diambil berdasarkan kebutuhan yang tersedia. Berdasarkan metode penelitian yang dipilih, peneliti tidak berangkat dari suatu hipotesis untuk diuji kebenarannya atau kecocokannya di lapangan. Tetapi yang dilakukan justru peneliti langsung masuk ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data selengkap mungkin sesuai dengan pokok permasalahan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti langsung mengumpulkan data dalam situasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu peneliti langsung turun sendiri ke lapangan, aktif mendengar, mengamati, bertanya, mencatat, terlibat, menghayati, berpikir dan menarik inferensi dari apa yang diperoleh lapangan

Selanjutnya penimbangan Instrumen juga dibutuhkan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun benar-benar mampu mengukur dan menilai aspek-aspek yang ingin diteliti. Penimbangan instrumen bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen telah dapat mengungkap tentang mapping sosial eksistensi organisasi kemasyarakatan yang ada di Sumut. Selanjutnya, dilakukan *expertjudgement* kepada beberapa orang ahli pada bidang yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. Guna mendapatkan suatu gambaran sistematis dan terinci tentang subyek dan obyek seputar kondisi sosial dan ekonomi pada satuan unit organisasi ataupun lembaga keummatan akan diambil berdasarkan kebutuhan yang tersedia

3. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah populasi terbatas, yakni diambil hanya Provinsi Sumatera Utara. Data populasi tersebar pada setiap

kabupaten/kota maupun disctrit. Penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling*. Proses penarikan sampel diawali dengan mengidentifikasi populasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota dan district. Selanjutnya, penarikan sampel dilakukan dengan teknik *proportional random sampling*. Teknik ini digunakan untuk pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional karena anggota populasinya heterogen (tidak sejenis). Kemudian ditetapkan besarnya ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya jumlah sampel masing-masing digunakan teknik *proportional random sampling*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada peneitian ini dilakukan pada tiga tahap. *Pertama*, dilakukan orientasi dimana peneliti mengumpulkan data secara umum dan luas tentang hal – hal yang menarik, penting, menonjol dan berguna untuk diteliti lebih mendalam. *Kedua*, peneliti mengadakan eksplorasi pengumpulan data yang dilakukan lebih terarah sesuai dengan fokus penelian serta mengetahui sumber data atau informan yang kompoeten dan mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang hal yang akan diteliti. Dalam hal ini Tim peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Ketiga*, peneliti melakukan penelitian terfokus yaitu mengembangkan penelitian eksploratif kepada fokus penelitian yaitu pola penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat.

Untuk mengumpulkan data, dilakukan langkah – langkah sebagai berikut : *Pertama*, Pengamatan/Observasi Lapangan. Pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan partisipasi moderat (*moderate partisipation*) dalam arti keterlibatan peneliti dalam posisi yang seimbang sebagai orang dalam dan orang luar, diantara pengamat dan peran serta. Pelaksanaan pengamatan mengikuti petunjuk Sparadley yang membagi tahapan observasi yaitu : (1). Observasi deskriptif (*deskriptif observation*) secara luas menggambarkan secara umum situasi tentang situasi radikalisme di Indonesia (2). Observasi terfokus

setelah diadakan analisis terhadap data hasil rekaman secara umum. Observasi terfokus digunakan digunakan untuk menemukan kategori-kategori seperti aktivitas – aktifitas stakeholders melakukan penanganan radikalisme. *Kedua*, wawancara. Digunakan untuk menggali data secara mendalam tentang pola penanganan radikalisme berbasis masyarakat Untuk mendiskripsikan. Penggunaan wawancara tidak dilakukan secara ketat, artinya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak – pihak terkait yaitu : Pengurus Pimpinan Ormas seperti NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah dan lainnya, tokoh agama, da'i, pejabat pemerintah yang berkompeten di bidangnya dan lainnya. *Ketiga*, telaah Dokumen. Dokumen yang digunakan penelitian ini adalah dokumen resmi lembaga sebagai bukti fisik dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan baik berupa catatan, foto, kegiatan rekaman visual. Dokumen – dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini adalah: (1) Data mengenal kebijakan masyarakat (2) Ajaran – ajaran yang berupa buku, foto copy. (3). Kebijakan tertulis hasil dari keputusan rapat, dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik interaktif, sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan cara melibatkan 4 komponen yang saling berinteraksi yaitu : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keempat komponen ini merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus antara pengumpul data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data – data dilapangan di catat dalam catatan lapangan berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami atau dirasakan oleh subyek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan alami apa adanya dari lapangan tanpa adanya komponen atau tafsiran dari peneliti tentang komponen yang dijumpai. Dari catatan lapangan peneliti membuat catatan

refleksi. Catatan refleksi merupakan catatan dari peneliti sendiri yang bersisi komentar, kesan pendapat dan penafsiran terhadap fenomena yang ditemukan. Dengan kata lain pengumpulan data disesuaikan dengan tujuan atau komponen sosial dan ekonomi yang akan dipetakan, apakah komponen subyek sosial dan ekonomi, obyek sosial ekonomi, lingkungan sosial ekonomi atau keseluruhannya juga batasan organisasi atau lembaga keummatan yang akan dicakup, melalui alat – alat pengumpulan data yang telah disebutkan.

- b. Reduksi data. Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan langsung. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang diperlukan dalam mengorganisir data yang diperlukan sesuai fokus permasalahan yang diteliti.

Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi dan taransfaransi data kasar yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, penelusuran tema–tema, membuat partisi dan menulis catatan kecil (memo) pada kajian seketika di rasa penting. Cara yang dilakukan dalam proses data yakni cara manual dan cara komputasi. Cara manual seperti pembuatan tabel dan grafik. Komputasi dengan cara program khusus.

- c. Penyajian data. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan, dengan cara mengelompokkan sesuai dengan topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Dengan kata lain penyajian kualitatif dilakukannya analisis kondisi, kecenderungan, perkembangan dari lembaga – lembaga

keagamaan dan lain sebagainya. Sedangkan penyajian data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya.

- d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan. Cara ini merupakan sebuah kegiatan dari konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan mencatat pola, keteraturan, penjelasan, hubungan sebab akibat dan proposisi dalam penelitian. Dalam melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, kegiatan peninjauan kembali terhadap penyajian dan catatan lapangan melalui diskusi dengan teman sejawat (FGD), tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pendidik dan lainnya adalah hal yang penting dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diuraikan dalam lima bab. *Pertama*, bab yang menguraikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi, asumsi, dan batasan penelitian, kerangka teori, target penelitian, rencana target capaian Luaran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan. Urgensinya untuk memberikan jawaban umum atas pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan. *Kedua*, bab yang menjelaskan konsep sosial dan ekonomi umat Islam dalam ragam kajian yakni: pemetaan sosial dan ekonomi; definisi dan cakupan; tujuan dan manfaat pemetaan sosial dan ekonomi; metodologi pemetaan sosial dan ekonomi; indikator kekuatan kemajuan sosial dan ekonomi umat Islam; problem sosial dan ekonomi umat Islam; perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masalah sosial dan ekonomi; manajemen organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan umat. *Ketiga*, bab menjelaskan mengenal provinsi sumatera utara, yakni: sejarah singkat provinsi sumatera utara; geografis dan iklim; pemerintahan dan wilayah administratif; kependudukan dan agama;

etnis, adat istiadat dan budaya; sumber daya alam. *Keempat*, bab menjelaskan mapping sosial dan ekonomi umat Islam perspektif organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara, yakni: Nahdlatul Ulama (NU): sejarah singkat berdirinya NU; sejarah berdirinya NU di Sumatera Utara; kekuatan sosial NU di Sumatera Utara; kekuatan ekonomi NU di Sumatera Utara; Muhammadiyah: sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah; sejarah berdirinya Muhammadiyah di Sumatera Utara; kekuatan sosial Muhammadiyah di Sumatera Utara; kekuatan ekonomi Muhammadiyah di Sumatera Utara; Al-Jam'iatul Washliyah: sejarah singkat berdirinya Al-Jam'iatul Washliyah di Sumatera Utara; kekuatan sosial Al-Jam'iatul Washliyah di Sumatera Utara; kekuatan ekonomi Al-Jam'iatul Washliyah di Sumatera Utara. *Kelima*, bab bagian penutup, memuat kesimpulan dan saran. Dua hal ini dikemukakan sebagai pertimbangan sejauhmana keberhasilan penelitian ini dan saran apa yang perlu direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, sesungguhnya penelitian tidak berpretensi sempurna, sebab sesuai dengan sifat dan keterbatasan suatu paradigma dan pendekatan studi, suatu masalah akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda jika diamati dari perspektif yang berbeda.

BAB II

KONSEP SOSIAL DAN EKONOMI UMAT ISLAM DALAM RAGAM KAJIAN

A. Pemetaan Sosial dan Ekonomi; Defenisi dan Cakupan

Kata pemetaan secara etimologi berasal dari kata “peta” dari bahasa Yunani ‘*mappa*’ artinya “taplak atau kain penutup meja.”¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peta diartikan : Gambar ; lukisan ; gambar yang menyatakan bagaimana letak tanah, laut kali, gunung dan sebagainya.² Menurut ilmu geografi dimaksud dengan peta adalah sebuah gambar dua dimensi pada bidang datar yang menggambarkan keadaan permukaan bumi dengan skala dan sistem proyeksi tertentu.³ Namun pada perkembangannya, bentuk peta sudah digambarkan dalam berbagai media. Google map, peta digital dan lain sebagainya, Ilmu pengetahuan yang mempelajari peta disebut Kartografi. Mereka yang ahli dalam bidang perpetaan disebut dengan Kartograf. Dilihat dalam aspek penggunaan makna berbeda, dapat digunakan dalam banyak arti. Apalagi dirangkaikan dengan kata berbeda, maka akan berbeda makna pula. Artinya tergantung dengan penggunaan masing-masing. Misalnya peta politik, peta penelitian, peta ekonomi, peta sosial dan lainnya. Dalam kontek tulisan ini, peta dimaksud adalah peta sosial dan ekonomi.

Dari makna di atas terlihat keberadaan peta menjadi penting. Hal ini terlihat dari fungsi peta yakni: Peta sesungguhnya akan meng-

¹www.gurupendidikan.co.id, diakses, 07/09/2019

²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010) h. 657

³www.edufunia.com. Defenisi dan Pengertian peta, diakses, 07/09/2019

gambarkan dan menunjukkan suatu posisi atau lokasi relatif (letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi). Peta sesungguhnya akan memperlihatkan sebuah ukuran (dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak di atas permukaan bumi. Peta sesungguhnya memperlihatkan bentuk dari yang dipetakan. Seperti bentuk negara, gunung, lautan, pantai dan lainnya sehingga dimensinya terlihat dalam peta. Peta sesungguhnya akan mengumpulkan dan menyeleksi data – data dari suatu daerah dan menyajikan di atas peta yang dimaksud.⁴ Dari fungsi ini menunjukkan bahwa peta menjadi kebutuhan dalam berbagai hal dan penggunaannya guna membantu sesuatu yang akan dilihat secara menyeluruh.

Sedangkan kata sosial, diartikan segala sesuatu mengenai masyarakat; Kemasyarakatan, suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma dan lain sebagainya.⁵ Dengan kata lain kata sosial berhubungan kemasyarakatan, struktur masyarakat, hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kata ekonomi diartikan pengetahuan dan penelitian mengenai asas – asas penghasilan, produksi, distribusia, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan, penghematan menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi.⁶ Ketika kata peta sosial ekonomi umat dipadukan maka dimaksudkan adalah gambaran tentang kondisi dan eksistensi sosial dan ekonomi umat Islam baik dalam skala internasional, nasional maupun sifatnya lokal.

B. Tujuan dan Manfaat Pemetaan Sosial dan Ekonomi

Melakukan pemetaan sosial dan ekonomi dalam berbagai kajian mempunyai tujuan dan manfaat strategis tertentu yakni:

1. Tersusunnya indikator masalah dan jangkauan fasilitas kekuatan sosial dan ekonomi dalam berbagai pendekatan.

⁴*Ibid*

⁵ *Ibid.*, h. 807

⁶ *Ibid.*, h. 206

2. Diperolehnya peta digitasi sebagai dasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok – kelompok sosial dan ekonomi
3. Diperolehnya peta peta tematik dengan sistem informasi geografis sehingga diketahui pengaruhnya dari budaya luar
4. Mengeksplorasi keadaan kondisi masyarakat dan ekonomi masyarakat dalam sebuah komunitas, organisasi maupun negara.
5. Menjadi instrumen untuk penyusunan rencana kerja yang bersifat taktis terhadap problem sosial dan ekonomi.

Selain tujuan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi juga diperoleh berbagai manfaat strategis yakni :

1. Melakukan pemetaan sosial dan ekonomi bermanfaat dalam analisis situasi dan analisis kebutuhan untuk program penguatan.
2. Melakukan pemetaan sosial dan ekonomi bermanfaat untuk gambaran dasar survei yang disajikan dalam bentuk struktur ruang/daerah lebih komukatif
3. Melakukan pemetaan sosial dan ekonomi sebagai pemantau tentang perubahan tata ruang, kondisi daerah, organisasi, komunitas dan negara.
4. Melakukan pemetaan sosial dan ekonomi menjadi analisis prioritas masalah dan lokasi untuk perencanaan kegiatan.
5. Output yang dihasilkan dengan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi adalah data demografi geografi (jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian dan lainnya), agama (jumlah pemeluk agama, rumah ibadah dan lainnya), ekonomi (kondisi ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan lainnya)

C. Metodologi Pemetaan Sosial dan Ekonomi

Terdapat berbagai pendekatan yang dilakukan dalam melakukan mapping sosial dan ekonomi yakni :

1. Survei Formal adalah informasi yang dikumpulkan dari dari responden menggunakan angket atau kuesioner yang didistribusi secara langsung atau melalui perantara atau media online. Metode yang dilakukan dapat menggunakan:
 - a. Survei Berumah Tangga Beragam Topik (*Multy Topic Household Survey*) atau disebut juga survei pengukuran standar hidup (*living standars*). Cara pengumpulan data berdasarkan standar hidup secara integratif, seperti pengeluaran, komposisi rumah tangga, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, fertilitas gizi dan lainnya
 - b. Kuesioner Indikator Kesejahteraan Inti (*Core Welfare Indicators Question* atau CWIQ) survei rumah tangga yang meneliti perubahan – perubahan indikator sosial, seperti akses, penggunaan dan kepuasan terhadap pelayanan sosial dan ekonomi.
 - c. Survei Kepuasan Klien (*Klien Satisfaction Survei*). Cara melakukan survei ini untuk meneliti efektifitas atau keberhasilan pelayanan pemerintah berdasarkan pengalaman atau penerima pelayanan (aspirasi klien) mulai dari pelayanan publik, kualitas pelayanan, kepekaan petugas pemerintah dan sebagainya.
 - d. Kartu Laporan Penduduk (*Citizen Report Cards*) penelitian difokuskan kepada tingkat korupsi yang ditemukan oleh penduduk biasa, kemudian dipublikasikan secara luas dan dipetakan sesuai tingkat wilayah dan geografis.
 - e. Laporan Statistik. Seperti jumlah orang miskin, desa tertinggal, status gizi, buta huruf dan lainnya yang dipublikasikan oleh BPS.⁷
2. Pemantauan Cepat (*Rapid Appraisal Methods*). Metode ini merupakan cara cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi tentang pandangan dan masukan dari populasi sasaran stakeholders lainnya

⁷Pratsetya.blogspot.com>2016/04, Tugas Softskill “Makalah Pemetaan Sosial Kota Depok – AntonPrast, diakses, 10/09/2019

mengenai kondisi geografis dan sosial ekonomi. Dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara Informan Kunci (*Key Informant Interview*) Wawancara yang dilakukan terhadap individu – individu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengamalan mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat mendalam, kualitatif dan semi terstruktur.
 - b. Diskusi Kelompok (*Focus Group Discussion*) Diskusi yang melibatkan yang dapat melibatkan 8 – 12 orang yang telah dipilih berdasarkan kesamaan lapangan.
 - c. Wawancara Kelompok Masyarakat (*Community Group Interview*) berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada semua anggota masyarakat dalam suatu temuan terbuka. Pewawancara melakukan wawancara secara hati-hati berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.
 - d. Pengamatan Langsung (*Direct Observation*). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan seperti informasi kondisi geografis, sosial ekonomi dan lainnya.
 - e. Survei Kecil (*Mini Survei*). Caranya dengan penerapan kuesiner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sample (antara 50 – 70 orang). Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak (random sampling) atau sample bertujuan (purposive sampling) wawancara dilakukan pada lokasi – lokasi survei yang terbatas seperti skitar klinik, sekolah, balai desa dan lainnya.⁸
3. Metode Partisipatoris. Dimaksud dengan metode ini merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. Pertanyaan – pertanyaan umumnya tidak dirancang secara, melainkan hanya garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang

⁸ *Ibid.*

berdasarkan proses tanya jawab dengan responden. Terdapat teknik – teknik yang dilakukan :

- a. Penelitian dan Aksi Partisipatoris (*Participatory Research and Action*) dulu disebut Partisipatory Rural Appraisal (PRA). Cara yang dilakukan metode ini terfokus pada proses pertukaran informasi dan pembelajaran antara pengumpul data dengan responden. Metode ini menggunakan teknik-teknik visual (penggunaan tanaman, biji- bijian, tongkat) penunjuk pendataan sehingga memudahkan masyarakat biasa (bahkan buta huruf) berpartisipasi.
- b. Stakeholder Analisis. Cara yang dilakukan adalah analisis terhadap para peserta atau pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau organisasi sosial tertentu mengenai isu – isu yang terjadi di lingkungannya seperti relasi kekuasaan, pengaruh dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan untuk menentukan apa masalah dan kebutuhan suatu organisasi, kelompok atau masyarakat.
- c. *Beneficiary Assesment*. Pengidetifikasian masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan sosial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hambatan – hambatan partisipasi, merancang inisiatif pembangunan dan menerima masukan – masukan guna memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan dan keinginan pembangunan.
- d. Monitoring dan Evaluasi Partisipatoris (*Participatory Monitoring and Evaluation*). Cara yang dilakukan adalah melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta melahirkan rekomendasi – rekomendasi.⁹

⁹ *Ibid.*

D. Indikator Kekuatan Kemajuan Sosial dan Ekonomi Umat Islam

Kemajuan sosial menjadi penting dalam sebuah masyarakat tanpa terkecuali masyarakat Islam. Kemajuan sosial menjadi wujud dari kekuatan Islam itu sendiri. Jika kondisi sosial kuat, maka akan menjadi kuatlah masyarakat Islam Indonesia. Dalam konsep Islam terdapat empat indikator kekuatan sosial, jika indikator terwujud dan dapat diterapkan oleh umat Islam menjadi kekuatan yang luar biasa bagi umat Islam. Kekuatan tersebut adalah berupa adanya kekuatan akidah dan ibadah, kekuatan ekonomi, kekuatan ukhuwah dan adanya kekuatan politik

1. Kekuatan Akidah dan Ibadah.

Kesatuan akidah dan ibadah penting bagi umat Islam. Karena ini menjadi prinsip penting dalam beragama Islam. Umat Islam diwajibkan untuk memperkuat akidah dan ibadah. Akidah adalah persoalan teologi, berupa adanya pengakuan diri kepada Tuhan serta kepercayaan yang ditanamkan kepadanya tentang adanya unsur – unsur penting keimanan, jika ini tidak diperkuat eksistensi akidah seseorang diragukan. Pengenalan kepada Tuhannya cukup lemah. Eksistensi pengutan akidah dan ibadah merupakan bentuk dari yang dibangun oleh Islam. Karena ini menjadi motivasi syariat itu sendiri baik kepada individu seseorang, keluarga, masyarakat maupun negara.

Term akidah bentuk masdar dari kata “*aqada – ya’qidu a- aqdan- aqidatan*” yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, prjanjian dan kokoh.¹⁰ Secara teknis akidah diartikan iman, kepercayaan dan keyakinan.¹¹ Secara terminologi beragama diartikan ulama. Ibnu Taimiyah mengartikan akidah adalah suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengannya

¹⁰ Muhamimi, et.al. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta : Kencana, 2007) h. 259

¹¹*Ibid*

jiwa menjadi tenang sehingga jiwa menjadi yakin serta mantap tidak dipengaruhi oleh keraguan dan syak wasangka.¹² Mahmud Syaltut mengartikan akidah, yakni segi teoritis yang pertama dituntut dan mendahului segala sesuatu untuk dipercayai dengan keimanan yang tidak boleh dicampuri dan dipengaruhi oleh keraguan.¹³ Dengan kata lain akidah dapat dimaknakan keyakinan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Pembenaran ini dimaksudkan kepada membangun keyakinan pengakuan adanya Allah, para Malaikat, Kitab – kitabnya, para Rasul, hari Akhirat dan takdir yang baik maupun buruk. Seseorang akan terlihat jati dirinya sebagai hamba yang beriman jika kepercayaannya kepada unsur – unsur keimanan di atas terpatri dalam dirinya.

Islam sebagai agama meletakkan akidah menjadi persoalan asasi dalam beragama. Menurut Muhammad Syaltut, kedudukan akidah dalam Islam menjadi pokok yang diangung di atasnya peraturan-peraturan agama (syariah). Sedangkan peraturan agama merupakan hasil yang dilahirkan oleh akidah. Dengan demikian tidak ada syariah dalam Islam melainkan karena adanya akidah, sebagaimana syariah tidak akan bisa berkembang melainkan berlandaskan akidah. Maka syariah tanpa akidah ibarat gedung tanpa fondasi.¹⁴ Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diidentifikasi berbagai ciri – ciri akidah Islam sebagai berikut :

- a. Akidah didasarkan pada keyakinan hati, tidak menuntut yang serba rasional, sebab ada masalah tertentu yang tidak rasional dalam akidah.
- b. Akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia sehingga pelaksanaan akidah menimbulkan ketentaraman dan ketenangan
- c. Akidah dalam Islam tidak hanya diyakini, lebih lanjut perlu pengucapan dengan kalimat thayyibah dann diamalkan dengan perbuatan yang saleh.

¹² *Ibid*

¹³ Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syariah* (Jakarta : Pustaka Amani Press, 1986) h. 4

¹⁴*Ibid.*, h. 7

- d. Keyakinan dalam akidah merupakan masalah empiris, maka dalil yang dipergunakan dalam pencarian kebenaran tidak hanya didasarkan atas indera dan kemampuan manusia, melainkan membutuhkan wahyu yang dibawa oleh Rasul Allah SWT.¹⁵

Karena penting akidah jika dilihat misi kerasulan para Rasul diprioritaskan untuk memperkuat akidah dan ibadah (Qs. al-A'raaf: 59, 65, 73 dan 85). Selanjutnya selama 13 tahun Rasul Muhammad mengajak dan mengajarkan bertauhid sebagai pembuktian pentingnya berakidah dalam kehidupan seseorang khususnya umat Islam. Bertauhid dipandang sebagai fondasi tegaknya bangunan agama. Islam semakin kuat jika pemeluk Islam memperkuat akidah keislamannya.

Dalam konteks pendidikan, mempelajari akidah menjadi prioritas utama, hukumnya wajib. Karena kajiannya berkaitan dengan eksistensi ketuhanan (zat Allah) sebagai pencipta. Pengenalan dan mempercayai Tuhan menjadi kebutuhan kehidupan sebagai hamba untuk mengenal erhadap zat Allah (makrifatullah). Ketika pengenalan ini sudah tercipta akan berlanjut kepada memperteguh kemukminannya dan merupakan syarat sahnya amal ibadah yang dilakukan seseorang. Karena itu memperoleh akidah yang benar perlu mempelajari dan memahami sifat – sifat Allah serta apa yang disukai dan dibenci Allah. Ketika ini diwejentahkan dalam kehidupan manusia akan turut mempengaruhi dari penerimaan praktek amal yang dilakukan oleh umat Islam. Tuhan juga sebaliknya akan mengukur sejauhmana hambaNya mengenal dirinya dan menempatkan Tuhan di atas segala – galanya. Tuhan tidak menyukai hambanya yang melakukan kesyirikan berupa mensejajarkan diriNya dengan makhluk atau ciptaannya, jika ini terjadi Tuhan akan menghapuskan segala amalnya dan menjadikan sebagai hamba yang merugi (Qs. Az-Zumar : 65).

Dampak negatif yang dirasakan manusia ketika tidak menempatkan berakidah yang benar tidak saja berkaitan dengan ketuhanan tetapi juga berdampak kepada diri seseorang, masyarakat dan juga kaitannya

¹⁵ Muhamimi, et.al. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, h. 260

kepada negara. Dalam konteks individual seseorang yang lemah akidah memudahkan dirinya dekat dengan kesyirikan sebuah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT bahkan dapat mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kesyirikan juga dapat membawa melakukan perbuatan dosa yang lain. Karena tidak ada lagi ketakutan dengan dosa dan Tuhannya. Dekadensi moral menjadi sifat yang melekat dilakukan seseorang jika tidak ada lagi ketakutan dengan Tuhannya. Amoral akan terjadi dimana – mana dan turut mempengaruhi masyarakat. Jika ini mewabah dalam masyarakat menunjukkan masyarakat Islam mengalami kelemahan. Terciptalah masyarakat yang tidak agamis, masyarakat yang jauh dari nilai – nilai akidah yang benar, maka nilai – nilai sejati dalam Islam akan tercerabut dalam masyarakat tersebut. Konsekwensinya masyarakat akan jauh dari semangat ukhuwah, sosial dan akan mudah diprovokasi oleh berbagai faktor – faktor yang justru akhirnya menghancurkan masyarakat Islam itu sendiri.

Dalam konteks masyarakat penguatan akidah juga menjadi penting dan menentukan membentuk kekuatan masyarakat. Ini tidak saja menjadi sebuah cita – cita, tetapi juga harus diwujudkan dan dibangun secara bersama. Dimulai dari peran da'i, tokoh agama dalam mendakwahkan kekuatan aqidah dalam masyarakat. Semangat dakwah menjadi instrumen penting dalam menggelorakan akidah dalam masyarakat. Sebagaimana halnya Rasulullah misi pertama yang dibangun kota Mekkah adalah penanaman penguatan akidah. Akidah tidak saja sebagai fondasi agama tetapi menjadi kekuatan masyarakat. Akidah yang kuat akan membangun segala aspek kehidupan masyarakat menjadi kuat. Masyarakat madani akan tercipta jika dalam sendi kehidupan masyarakat menjadi kuat.

Kekuatan masyarakat menjadi kekuatan negara, maka keterkaitan negara yang kuat berhubungan dengan kekuatan akidah masyarakat. Masyarakat yang agamis cukup menentukan terbentuknya negara yang agamis. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang pluralistik dengan agama sesungguhnya telah menciptakan Indonesia sebagai negara agamis. Setiap agama yang ada telah menanamkan kepada semua pemeluk agamanya tentang doktrin akidah masing – masing

tanpa mengganggu dan menodai agama lain. Dalam kehidupan beragama di Indonesia toleransi cukup terjaga satu dengan lainnya. Di Sumut cukup populer dengan motto beragama yang disebut dengan akidah terjalin kerukunan terjalin. Keterjaminan membangun akidah di setiap daerah dan semua agama pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang beragama. Dalam agama Islam menanamkan doktrin akidah kepada umat adalah sebuah keniscayaan. Elit – elit dakwah Islam wajib menyampaikan aqidah sebagai bagian dari substansi syariat Islam dengan dengan beragam pendekatan yang dilakukan, sehingga akidah yang benar – benar dapat diserap kemudian dimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain akidah penguatan ibadah juga menjadi langkah penting bagi umat Islam dimanapun berada. Ibadah selalu dikatakan menjadi manifestasi konkret akidah. Secara terminologi ibadah diartikan usaha mengikuti hukum – hukum atau aturan – aturan Allah dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-Nya, mulai dari aakil balig samapi meninggal dunia. Ukuran seorang beribadah adalah adanya kesetiaan, kepatuhan, dan penghormatan serta penghargaan kepada Allah SWT serta dilakukan tanpa adanya batasan serta bentuk khas tertentu.¹⁶ Hubungan ibadah dengan syariah saling terintegratif, ibadah merupakan bagian integral dari syariah. Apapun ibadah yang dilakukan umat Islam harus berusmber syariah Allah. Semua ibadah yang tidak didasari leh syariat dikategorikan bid'ah. Ibadah tidak hanya menjalankan rukun Islam yang lima, tetapi ibadah juga berlaku pada semua aktifitas duniawi yang didasari rasa ikhlas. Karena itulah secara umum ibadah dibagi kepada dua bahagian yakni ibadah khusus (khas) yang berkaitan dengan rukun Islam (shahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Kemudian adalah ibadah umum (amm) yakni segala aktifitas yang didasari oleh rasa ikhlas yang ditunjukkan dalam bentuk amal shaleh dalam mengharapakan keridhaan Allah SWT.¹⁷

¹⁶Abul A'la al-Maududi, *Fundamentalis of Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1984) h. 107. Lihat pula, Muhamimi, et.al. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, h. 279

¹⁷*Ibid.*

Akidah yang kuat selalu diiringi dengan ibadah yang kuat. Penguatan ibadah menjadi penting bagi umat Islam. Ibadah menjadi bingkai untuk berpikir, bertindak dan bersikap dengan karidor ketuhanan. Termasuk dalam konteks membangun sosial dan ekonomi umat Islam. Dalam ibadah tersimpan nilai – nilai Islami yang dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan. Biasanya seorang yang ahli ibadah (abid) tidak akan bertindak dan bersikap merugikan dirinya dan orang lain. Kesadaran ketuhan yang terus hidup dalam dirinya akan membentuk perilaku – perilaku positif. Amar makruf nahi menjadi visi dan misi yang harus ditegakkan dalam kehidupannya. Hal ini memberikan nuansa beragama di sekitarnya. Orang yang beragama akan mencintai diri, keluarga dan masyarakatnya. Karena ini merupakan ajaran agama yang harus diterapkan dalam kehidupan. Jarang orang yang ahli ibadah justru merusak diri dan lingkungannya.

Nilai – nilai ibadah yang telah membentuk dalam masyarakat beragama memantulkan cahaya kehidupan yang kuat baik sesama pemeluk agama maupun lintas umat beragama lainnya. Kekuatan ibadah mneyadarkan diri seseorang untuk mencintai dan menyayangi sesama umat beragama. Kesadaran persaudaran seagama terpatri dalam kehidupan seseorang yang dibentuk oleh kekuatan ibadahnya. Ibadah sholat lima waktu dalam satu hati semalam mengajarkan banyak hal dalam aspek kehidupan manusia. Pada akhirnya kesadaran sebagai makhluk Tuhan untuk mencintai sesama muslim semakin kuat. Jika sebuah masyarakat dalam sebuah daerah adalah masyarakat yang agamis, maka terlihat kekuatan ukhuwahnya juga kuat untuk saling menjaga, memelihara dan menyayangi. Jika salah seorang terusik atau terganggu kekuatan ibadah membentuk sikap persatuan yang tinggi, melindungi dan membentengi sesama muslim.

Jika sebuah daerah muslim ditemukan terjadinya pertikaian, perang saudara dan konflik, hal ini menunjukkan hilangnya kekuatan ibadah dalam dirinya. Ibadah tidak hanya semata bersifat vertikal kepada Tuhannya, tetapi dalam konteks horizontal terbangun ibadah sosial. Dalam konteks ini membutuhkan nilai – nilai sosial yang cukup tinggi. Apalagi dalam Islam mengajarkan tujuan kehidupan

manusia adalah beribadah dan mengabdikan kepada Tuhannya. Maka aktifitas dan profesi apa saja yang diperankan harus berorientasi kepada ibadah. Mengabdikan kepada Sang Pencipta. Sikap kesadaran sebagai sesuatu yang diciptakan adalah kecil karena ada yang lebih kuat dan segalanya yakni Sang Khalik. Untuk membentuk pribadi yang abid tidaklah mudah, apalagi manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kealpaan sehingga gampang melakukan kesalahan dan dosa. Namun nilai – nilai ibadah yang terpatut dalam diri manusia jika dilakukan dan dikelola secara sungguh – sungguh dan keikhlasan akan membentuk kekuatan ibadah yang cukup besar dalam diri manusia itu sendiri. Ibadah sholat yang dilakukan dalam lima waktu satu hari satu malam, jika dilakukan dengan sungguh – sungguh akan menjadi kekuatan besar dalam diri manusia. Tampilah manusia – manusia yang agamis, bercarakter dan dekat kepada Tuhan dan manusia.

Islam telah mengajarkan kepada umat Islam akan pentingnya penguatan ibadah baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Doktrin agama seperti ini tidak hanya sebatas ajaran konseptual saja, tetapi harus diperaktekkan dalam kehidupan. Tidak saja sebagai ajaran kehidupan tetapi lebih dari itu membarikan berbagai hikmah dan manfaat yang cukup besar bagi pemeluk Islam itu sendiri. Kalau ingin menjadi diri, keluarga, masyarakat bahkan negara jadilah masyarakat yang agamis, masyarakat yang senantiasa menundukkan diri kepada Islam. Doktrin – doktrin ibadah Islam bersifat tidak memberatkan, flexibel, universal dan memberikan kemudahan kepada pemeluknya. Jadi tidak ada alasan untuk membentuk diri sebagai ahli ibadah dalam membentuk kekuatan diri sendiri, masyarakat bahkan negara.

2. Kekuatan Ekonomi

Berikutnya menjadi faktor penting dalam penguatan masyarakat Islam adalah faktor ekonomi. Sedangkan Ilmu ekonomi ilmu beragam para sarjana ekonomi mengartikannya. Diantaranya ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan berbagai

sumber daya yang langka (dengan tanpa uang) dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.¹⁸ Definisi lain dikemukakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan sumber daya yang terbatas (langka) untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.¹⁹ Dari berbagai pengertian ini dapat disimpulkan ilmu ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Artinya secara umum terdapat tiga prinsip ekonomi yakni adanya prinsip produksi, prinsip distribusi dan prinsip konsumsi. Jika dikaitkan dengan ekonomi syariah diartikan ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji masalah – masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai – nilai Islam. Substansi sistem ekonomi mempunyai fungsi sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi. Mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik.

Kekuatan ekonomi masyarakat Islam menjadi penting dan strategis digerakkan mulai dari aspek produksi, distribusi maupun konsumsi. Ketiga hal ini saling interkoneksi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Aspek produksi harus didorong sebesar – besarnya. Dalam masyarakat Islam dibutuhkan kelompok masyarakat yang mandiri dan bergerak sebagai pedagang yang menjual hasil produknya. Memandirikan diri dan memilih pada sektor pedagang merupakan pekerjaan mulia. Dengan catatan bekerjalah dengan mengkedepankan nilai – nilai ekonomi Islam yakni mengkedepankan kejujuran, tidak melakukan riba dan produk yang ditawarkan/dijual memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Memilih pada sektor pedagang/wirausaha menjadikan diri menjadi mandiri bahkan turut menyediakan kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan Islam memilih profesi pedagang/wirausaha yang substansinya adalah berbisnis dipandang

¹⁸ Prathma Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi)* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 2008) h. 3

sebagai profesi yang luhur. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika Rasul ditanya: “Pekerjaan apa yang paling utama atau baik ?” Rasul menjawab, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. al-Bazar dibenarkan al-Hakim).

Menariknya bahwa profesi pedagang/wiraswasta ini juga dilakukan oleh Rasulullah yang berdagang sejak berusia 25 tahun ikut bekerjasama dengan Siti Khadijah yang ketika itu belum menjadi isterinya. Kemudian para sahabat Nabi banyak memilih profesi pedagang. Abu Bakar RA adalah seorang pedagang pakaian. Umar Ibn Khattan memilih pedagang gandum atau bahan makan pokok, profesi ini juga diikuti oleh sahabat – sahabat lainnya lebih megambil profesi yang sama. Meskipun demikian, tidaklah semata – mata profesi pedagang menjadi pilihan bagi masyarakat Islam. Pedagang/wiraswasta salah satu dari profesi yang ada, tentunya ini menjadi pilihan yang diluar dari profesi ini juga menjadi pilihan berdasarkan skil, bakat dan kemampuan yang ada. Profesi lain cukup menanti untuk diambil dan dikembangkan dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat Islam.

Kekuatan umat Islam harus diperkuat dengan bergerak dan bekerja keras umat Islam. Dalam konsep Islam mendorong untuk bekerja secara maksimal. Kerja bahagian dari proses mengumpulkan harta dan penguatan kebutuhan ekonomi. Jika dilihat dalam Alquran telah menggambarkan manusia sebagai makhluk biologis, psikologis dan sosial. Ketiga dimensi ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dan tidak boleh pula mendominasi satu dengan yang lainnya. Kebutuhan manusia secara umum dibagi kepada dua macam yakni adanya kebutuhan kejiwaan (psikis) dan kebutuhan jasmani (fisik). Menurut Abraham Maslow kebutuhan manusia terdiri dari berbagai macam yakni : *Pertama*, adanya kebutuhan biologis, seperti makan dan minum. *Kedua*, adanya kebutuhan keselamatan dan rasa aman. *Ketiga*, adanya kebutuhan rasa memiliki, rasa cinta dan bersosialisasi. *Keempat*, adanya kebutuhan akan harga diri yang menginginkan

¹⁹ Sri Endang Rahayu et.al, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Medan Perdana Publishing, 2016) h. 1

ingin dihormati, ingin dipuji dan sebagainya. *Kelima*, adanya kebutuhan aktualisasi diri.²⁰

Berbeda dengan Abraham Maslow di atas, dalam konsep Islam tingkatan kebutuhan dibagi kepada tiga hal yang cukup mendasar yakni : Kebutuhan primer (*dharury*), kebutuhan sekunder (*al-hajjiyat*) dan kebutuhan tertier (*al-Tahsinat*). Dalam Islam kebutuhan primer tidak hanya ada aspek material saja tetapi juga mencakup aspek-aspek yang bersifat immaterial, seperti adanya kebutuhan agama, kebutuhan memelihara jiwa, kebutuhan keturunan, kebutuhan harta dan kebutuhan akal, semuanya dikelompokkan dalam kebutuhan primer. Kebutuhan – kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan asasi, jika tidak ada kebutuhan tersebut akan turut mempengaruhi kehidupan manusia dan manusia akan mengalami kesulitan hidup.

Salah satu bentuk dari penguatan ekonomi masyarakat dibutuhkan adanya kebutuhan harta. Harta dalam bahasa Arab disebut dengan “mal” diambil dari kata kerja “*mala – yamulu – maulan*” yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Artinya konsep harta dapat diartikan sesuatu itu dinamkan harta bila dapat dikumpulkan, dimiliki baik kepentingan individu, keluarga dan masyarakat.²¹ Lebih tepatnya harta diartikan yang dikumpulkan dan dimiliki yaitu harta atau kekayaan yang mempunyai nilai dan manfaat.²² Islam menegaskan persoalan harta adalah penting sebagai salah satu kebutuhan manusia untuk dicari dan digali berdasarkan sumbernya. Namun Islam juga memberikan garis tentang adanya harta yang haram, halal dan subhat. (Qs. al-Maidah/5 : 3, Qs. al-Anfal/8 : 72 dan lainnya). Tujuannya untuk mengarahkan manusia dalam proses pencarian harta yang halal, sehingga tidak terjerumus kepada proses pencarian yang bersifat

²⁰Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori – Teori Sosial Budaya* (Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi, 1994) h. 2.

²¹Abi Husein Ahmad bin Faris, *Mu’jam Muqais al-Lugat* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t) Juz V. h. 28. Lihat pula Nur Ahmad Fadhil Lubis & Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta : Hijri Pustaka Umat, 2001) h. 70

²²*Ibid.*

menyimpang yang akhirnya dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri.

Proses pencarian harta yang halal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Ini tidak saja menjadi tuntunan nash (Alquran – hadis), tetapi juga untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah menunjukkan terdapat tiga cara dalam proses pengumpulan harta yakni sebagai berikut:

1. Melalui proses eksplorasi sumber daya alam, berupa penggalian terhadap sumber daya alam yang ada di permukaan dan dalam perut bumi yang banyak tersimpan di dalam bumi seperti minyak bumi, emas, gas dan lainnya membutuh eksplorasi yang dalam yang juga membutuhkan teknologi yang dimiliki manusia dalam proses mendapatkannya. Dalam konteks eksplorasi sumber daya alam Alquran menegaskan kepada tiga hal yakni : Sektor pertanian (Qs. al-Kahfi/18 : 34 dan 39). Kemudian sektor peternakan, dimana Allah menjadikan binatang – binatang yang dapat menambah potensi ekonomi dengan cara peternakan. (Qs. abasa/80 : 25–32). Berikutnya adalah sektor pertambangan, yang cukup kaya yang dapat ditemukan di dalam perut bumi yang cukup bernilai ekonomis yang tinggi (Qs. al – Saba’/34 : 10 – 12 dan ayat lainnya).

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اُوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۗ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ
 ﴿١٠﴾ اَنْ اَعْمَلْ سَبِغَتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۗ وَاَعْمَلُوا صٰلِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيْرٌ ﴿١١﴾ ولسليمن الرّيح غدوها شهر ورواحها شهر ۗ وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ
 الْقَظْرِ ۗ وَمَنْ اَلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۗ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ
 اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (kami berfirman): “Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud”, dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (yaitu) buatlah baju

besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. (Qs. al – Saba’/34 : 10 – 12)

2. Melalui usaha perdagangan, sebagaimana telah disinggung di awal. Sektor perdagangan salah satu bentuk dalam proses pencarian harta yang di dalamnya terdapat aspek produksi, penyalururan dan komsumsi. Alquran menyebutnya dengan konsep “tijarah” (perdagangan) yakni adanya proses produksi, penyaluran dan komsumsi. (Qs. al-Nisa’ : 59, Qs. al-Saf/61 : 10 – 11 dan ayat yang lainnya)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمَّرَ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٦١﴾
 تَوَّابُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. al-Nisa’ : 59, Qs. al-Saf/61 : 10 – 11)

3. Melalui cara pemberian orang lain. Artinya Alquran menegaskan adanya pemberian orang lain sebagai bentuk cara mendapatkan harta. Pemberian orang lain dimaksudkan disini adalah sebagai bentuk jaminan sosial dalam bentuk melalui ajaran zakat, infak, shadakah, ghanimah, jizyah, wwrisan, wakaf, hibah dan lainnya.

Konsep ini mengajarkan sekaligus menegaskan kepada pemilik harta bahwa harta merupakan amanat di dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain yang harus diberikan. (Qs. al-Zuriat/51 : 19 dan lainnya)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Qs. al-Zuriat/51 : 19)

Berbagai penjelasan nash di atas telah menunjukkan bahwa terdapat tiga cara dalam proses mendapatkan harta yakni penggalan sumber daya alam, perdagangan dan pemberian harta dari orang lain. Ketiga cara menjadi amanah bagi manusia terlebih lagi pada proses penggalan sumber daya alam dan perdagangan. Kedua hal ini harus dieksplorasi dan dikelaola sebagaimana mestinya. Tuhan telah memberikan fasilitas beragam kekayaan yang ada dipermukaan bumi maupun di dalam perut bumi untuk dikelola secara baik sekaligus sebagai sumber pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat terutama masyarakat Islam. Islam mendorong untuk mencari harta sebanyaknya berdasarkan segala potensi yang disediakan Tuhan. Dalam proses pencarian harta Islam menegaskan dalam rambu – rambu yang halal tidak bertentangan dengan nash. Jadikanlah harta sebagai alat untuk mencapai tujuan bukan menjadi tujuan semata. Ini menunjukkan bahwa dorongan Islam terhadap penguatan ekonomi umat menjadi penting dan strategis. Islam tidak mengingikan umat dan masyarakat yang lemah tetapi harus secara ekonomi.

Sebaliknya umat yang lemah secara ekonomis Islam menegaskan adanya konsep jaminan sosial bagi masyarakat ekonomi lemah melalui ajaran zakat, infak, shadakah dan lainnya. Ini mengajarkan adanya konsep berbagi, memperhatikan antara sesama dari kondisi ekonomi kuat terhadap kondisi ekonomi lemah melalui sektor pemberian orang lain. Salah satu ajaran dimaksud adalah melalui zakat. Terminologi

zakat secara etimologi mengandung beberapa pengertian seperti; “cerdik, subur, jernih, berkat, terpuji, bersih” dan lain-lain.²³ Secara terminologi, zakat adalah: *حق يجب في المال* (Hak yang wajib pada harta).²⁴ Ulama Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah Pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat, semata-mata karena Allah). Ulama Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah. : Mengeluarkan sebahagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.²⁵ Ulama Syafiiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah : Nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.²⁶ Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan zakat : Hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.²⁷ Definisi zakat di atas, kemudian diserap oleh UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia bahwa zakat adalah: Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 UU)

Dalam perkembangannya eksistensi zakat sangat strategis dalam memberikan penguatan ekonomi masyarakat lemah. Islam mengajarkan zakat menjadi jaminan sosial masyarakat miskin sekaligus menjadikan harta sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks harta sebagai jaminan sosial masyarakat miskin menegaskan dalam harta seseorang ada milik orang lain berbagai melalui konsep zakat, infak, shadakah dan lainnya. Perhatian tersebut sebagai bentuk membangun ekonomi masyarakat lemah untuk diperhatikan dan

²³ Ibn Munzur, *Lisan al-Arab* (Beirut : Dar al-Fikr; 1990) Jld 14. h.. 358-359.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1989) h. 729

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h.731

²⁷ *Ibid.*

diangkat ekonominya. Islam tidak menginginkan masyarakat Islam itu sendiri mengalami kefakiran. Melalui kedermawanan sosial melalui jaran zakat, infak dan shadakah sebagai sistem solutif membangun ekonomi masyarakat miskin.

Dalam konteks Indonesia, diketahui potensi zakat cukup besar. Potensi ini harus digali secara maksimal. Umat Islam sebagai penduduk terbesar negeri ini harus mampu menciptakan dan memberdayakan zakat yang ada untuk instrumen ekonomi. Disinilah dibutuhkan keterlibatan negara untuk menggali secara maksimal melalui undang-undang dan peraturan yang ada. Perhatian negara menjadi penting, jika tidak potensi yang ada tidak akan tergali secara maksimal dan tidak membantu masyarakat lemah secara ekonomi. Undang-undang zakat menjadi kebutuhan penting dan strategis sebagai alat pemaksa dalam proses penggalan tersebut. Sama halnya dengan pajak, jika tidak ada keterlibatan negara sebagai unsur pemaksa. Maka pajak negara tidak dapat dikumpulkan secara maksimal. Kehadiran berbagai peraturan yang mengatur tentang zakat selama ini sebenarnya sebuah lompatan luar biasa. Melalui UU Zakat No 23/2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, terlihat penggalan zakat, pengelolaan zakat sudah dipandang berhasil dilakukan, namun dirasakan belum maksimal jika dilihat berdasarkan potensi yang ada.

Salah satu unsur penting dalam UU zakat tersebut yang harus diperhatikan adalah tidak adanya unsur pemaksa kepada muzakki. Artinya aturan memaksa terhadap muzakki (Pemilik harta) bersifat anjuran semata belum terlihat menjadi kekuatan memaksa muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada negara. Jika ini dilakukan tidak terbayangkan oleh kita betapa besarnya potensi zakat akan digali dan dikelola oleh negara sebagaimana halnya dana haji masyarakat muslim di Indonesia. UU Zakat masih bersifat pada penekanan aspek pengelolaan zakat, belum menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat akan diikuti jika para muzakki berbondong-bondong membayarkan zakatnya sebagaimana halnya membayarkan pajak ke negara. Sebagai perbandingan untuk Indonesia, berbagai negara seperti Malaysia telah melatakkan aturan yang cukup kuat bahwa

kewajiban zakat membayar ke negara menjadi aturan yang mengikat. Apalagi sejarah juga membuktikan bahwa Rasulullah, Khulafa ar-Rasydin dan seterusnya telah menerapkan unsur pemaksaan dalam membayarkan zakat ke negara.

Terdapat beberapa alasan adanya unsur pemaksaan berupa sanksi kepada muzakki tidak membayarkan zakat ke negara, yaitu: *Pertama*, zakat yang dibayarkan ke negara sebagai pentuk penggalan zakat secara maksimal, kemudian dikelola oleh negara menjadi sumber pendapatan negara untuk digunakan instrumen pembangunan dan sosial. *Kedua*, zakat yang dibayarkan ke negara secara maksimal akan mendisiplin muzakki dalam membayarkan zakatnya. *Ketiga*, zakat yang dibayarkan ke negara menjadi pengelolaan khusus yang dilakukan oleh negara. *Keempat*, zakat yang dibayar kemudian dikelola oleh negara semakin memberikan kepastian kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan jaminan sosial masyarakat miskin itu sendiri. Oleh karena itu adanya unsur paksaan membayarkan zakat negara dipandang memberikan kemaslahatan bersama terutama untuk memberikan penguatan ekonomi masyarakat miskin. Disinilah Islam meletakkan adanya kewajiban – kewajiban tertentu manusia terhadap harta, baik kepada harta sendiri maupun harta orang lain. Ajaran zakat, infak, shadakah dan lainnya merupakan instrumen ekonomi bagi masyarakat miskin. Segala bentuk tawaran yang diberikan oleh Alquran harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak saja untuk kepentingan si pemilik harta tetapi juga memberikan penguatan terhadap kepentingan sosial masyarakat Islam lebih luas lagi.

3. Kekuatan Ukhuwah

Terminologi ukhuwah menjadi instrumen penting terhadap penguatan masyarakat Islam. Bahkan berbagai pendapat ahli selalu mengatakan konsep ukhuwah bagian tidak terlepas dari terbentuknya sebuah peradaban. Artinya peradaban dibentuk melalui dari kekuatan persatuan, dan kehancuran peradaban terjadi manakala tidak adanya persatuan yang kuat sebagai tonggak mempertahankan peradaban. Sejarah telah membuktikan bagaimana munculnya peradaban yang

dibangun oleh Rasulullah, dimulai dari komunitas kecil kemudian menjadi sebuah negara dan berekspansi dalam membangun peradaban. Kekuatan ukhuwah menjadi bukti yang nyata bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah penting jangan terpecah belah apalagi bertikai antar sesama. Kekuatan Islam sebagai sebuah agama yang besar berada pada kekuatan ukhuwah, jikalau umat terpecah sebuah indikasi peradaban Islam akan mengalami kehancuran

Term ukhuwwah (الأخوة) diartikan “persaudaraan”. Persaudaraan dalam pemaknaan yang luas memberikan dampak lebih positif adanya keterjalinan kasih sayang, persahabatan dan persaudaraan antara sesama makhluk ilahi dalam bentuk persaudaraan seagama (*ukhuwah fi ad-din*), persaudaraan sebangsa (*ukhuwah wathaniyah*), persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariah*), persaudaraan sesama makhluk (*ukhuwah khalqiyah*). Keempat bentuk ukhuwah ini harus dipatirkan dalam kehidupan nyata terutama bagi seorang muslim. Muslim yang kuat adalah muslim yang dapat bersatu dan menyatukan diri dengan yang lain. Semangat membangun persatuan sejalan dengan keinginan Alquran mendorong kuat terciptanya ukhuwah yang memberikan arti :

1. Mengisyaratkan bahwa kecenderungan untuk bersatu, merupakan bagian yang integral dari eksistensi manusia. Artinya dengan persatuan merupakan simpul yang kuat pada kekuatan umat.
2. Alquran menjelaskan bahwa salah satu tugas kenabian adalah membangun perdamaian dunia. Setiap Nabi yang diturunkan substansinya adalah mengajak umat untuk bersatu, tidak terpecah belah dan konflik yang berkepanjangan, karena setiap konflik membuat ketidaktenangan dalam kehidupan manusia
3. Alquran menjelaskan pengaruh dari adanya persatuan, dimana persatuan umat Islam akan mencapai kemenangan serta kemuliaan. Ini merupakan substansi dari ukhuwah, dimana Alquran menegaskan implikasi dari ukhuwah adalah kemuliaan manusia itu sendiri yang di dalamnya merupakan peradaban yang tinggi.

Karena itu dalam membangun ukhuwah dibutuhkan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat Islam untuk memelihara ukhuwah. Diperlukan interaksi aktif antar elemen-elemen umat yang seagama maupun antar umat yang berbeda agama harus menyadari betul pentingnya kehidupan yang rukun dan toleran, dimana kerukunan umat beragama itu senantiasa diarahkan dalam langkah sebagai berikut : (1). Perlunya penguatan landasan/dasar-dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antar umat beragama. (2). Perlunya pembangunan harmonisasi sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. (3). Perlunya penciptaan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. (4). Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang mengarahkan dari seluruh keyakinan plural umat manusia. (6). Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. (7). Perlunya mengembangkan wawasan multi cultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat. (8). Perlunya menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu hendaknya hal ini dapat dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan kemanusiaan

Islam sebagai sebuah agama memberikan ruh yang besar kepada kekuatan ukhuwah. Sungguh sangat merugi bila potensi ini dibiarkan tanpa adanya semangat perubahan untuk merekatkan ukhuwah. Kesadaran akan tantangan diikuti dengan berbagai langkah perubahan harus diupayakan dengan adanya persatuan umat Islam, saling bahu membahu, persaudaraan dan kerukunan serta sikap tolong menolong harus menjadi kekuatan yang membumi. Disinilah peran tokoh agama-masyarakat Islam untuk mendorong umat Islam semaksimal mungkin akan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Sudah pasti pengaruh ukhuwah

memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan Islam. Ukhuwah merupakan kekuatan besar Islam, kekuatan ukhuwah tidak saja memberikan kontribusi kepada umat Islam itu sendiri tetapi juga terhadap perkembangan Islam menjadi sebuah agama yang ditinggikan.

Kontribusi ukhuwah kepada umat Islam dapat dirasakan sebagaimana hadis Rasul mengatakan “*Siapa yang senang diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi*”. (HR. Bukhari – Muslim)” Begitu pula kontribusinya kepada Islam sebagai sebuah agama, paling tidak kejayaan Islam menjadi sebuah ukuran penting bahwa kekuatan ukhuwah benar-benar di implementasikan dalam kehidupan yang lampau. Dalam catatan sejarah kebesaran Islam tidak hanya meninggalkan sebuah sejarah saja, tetapi mendorong kembali bagaimana peradaban itu bangkit kembali. Umat Islam dituntut untuk berusaha dan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitasnya. Tuhan sudah memberikan berbagai potensi salah satu diantaranya adalah kekuatan ukhuwah sebagai dinamisasi kehidupan dalam beragama. Ukhuwah tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata dan menjadi semangat kehidupan umat Islam.

4. Kekuatan Politik.

Beragam arti yang dikemukakan sarjana politik tentang tentang pengertian ilmu politik. Mariam Budiarjo mendefinisikan politik adalah bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan – tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan itu.²⁸ Rogert F. Soltau dalam *Introduction to Politics* dimaksud dengan ilmu politik adalah mempelajari negara, tujuan negara dan lembaga – lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan itu ; hubungan antara negara dengan warganya serta dengan negara – negara lain.²⁹ Untuk melaksanakan tujuan–

²⁸ Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982) h. 8

²⁹ *Ibid.*, h. 9

tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber – sumber dan resources yang ada.³⁰

Dari pengertian substansi penting dalam politik terkait dengan konsep mulai dari negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).³¹ Untuk lebih jelasnya pengertian dijelaskan di bawah ini :

- a. Negara diartikan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana menekan negara sebagai inti daripada politik, memusatkan perhatiannya pada lembaga – lembaga kenegaraan serta formilnya meskipun definisi dipandang sempit.³²
- b. Kekuasaan diartikan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginan dari pelaku. Ini juga menjadi kajian inti dari politik bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.³³
- c. Pengambilan keputusan diartikan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu dicapai. Dengan kata lain pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan yang diambil secara kolektif yang mengikat seluruh masyarakat.³⁴
- d. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan – tujuan dan cara untuk mencapai tujuan – tujuan itu pada prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan – kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.³⁵

³⁰ *Ibid.*, h. 8

³¹ *Ibid.*, h. 9

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, h. 10

³⁴ *Ibid.*, h. 11

³⁵ *Ibid.*, h. 12

- e. Pembagian dimaksudkan disini adalah pembagian dan penjatahan dari nilai – nilai dalam masyarakat. Para sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi melihat bahwa politik adalah pembagian dan mengalokasikan nilai – nilai secara mengikat. Dalam hal ini mereka menegaskan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga menimbulkan konflik.³⁶

Sedangkan dimaksud dengan kekuatan politik adalah adanya kekuatan yang cukup mempengaruhi dan menguasai di dalam sebuah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian. Bisa kekuatan politik tersebut dalam pengertian individual maupun secara kelembagaan. Dalam konteks individual merupakan elit – elit politik yang memainkan peranan penting dalam berpolitik. Sedangkan konteks kelembagaan dimaksudkan adanya kekuatan politik sifatnya terkemanga atau organisasi atau bentuk lain yang terlembaga kemudian tujuannya sangat penting untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik. Kekuatan politik dimaksud dapat dilihat seperti Partai Politik, group penekan, meliter dan lain sebagainya.

Kekuatan politik menjadi penting dalam sebuah negara atau masyarakat. Karena fungsi dan kekuatan politik itu adalah sebagai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan mulai dari proses pembuatan kebijakan sampai kepada berjalannya kebijakan tersebut. kekuatan politik sesungguhnya berfungsi sebagai keseimbangan kekuatan dari kekuatan lain yang muncul dalam sebuah negara ataupun masyarakat. Berikutnya adalah kekuatan politik sebagai agregator dan artikultair kepentingan – kepentingan yang muncu dari keuatan politik masing–masing. Karena itu dalam konteks negara Indonesia eksistensi Indonesia cukup kental dengan kekuatan politik baik dari partai politik, kekuatan massa, oramas – ormas dan lainnya yang memberikan pengaruh eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara.

Dalam konsep Islam politik menjadi substansi penting. Tidak

³⁶ *Ibid.*, h. 13

saja sebatas konsep dalam nash tetapi menjadi dorongan nash untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Islam memandang politik menjadi instrumen penting dalam penguatan umat Islam, tanpa politik umat Islam akan lemah. Karena itu Islam mengajarkan politik dan pentingnya berpolitik. Politik menjadi kekuatan tersendiri dalam Islam. Alquran menegaskan Qs. Ali Imran : 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Qs. Ali Imran : 159)

Politik diartikan sebagai strategi untuk mendapatkan kekuasaan, menguasai negara, menata negara dan mengurus umat lebih baik lagi. Dalam Islam politik disamakan dengan kata siasah yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siasah dapat diartikan pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan. Dari pengertian ini Politik dipandang sebagai sebuah kebutuhan bagi masyarakat terlebih lagi masyarakat Islam. Masyarakat Islam dimanapun berada membutuhkan siasah baik dalam menata pemerintahan, masyarakat maupun negaranya. Disamping umat Islam harus tahu dan memahami akan pentingnya berpolitik. Masyarakat Islam yang memandang alergi terhadap politik menunjukkan indikasi akan kelemahan masyarakat Islam itu sendiri. Masyarakat akan tergilas oleh kekuatan politik lain yang sesungguhnya senantiasa mencari kelemahan masyarakat Islam itu sendiri.

Sesungguhnya jika kembali kepada sejarah yang lampau peradaban Islam pernah jaya kemudian mengalami kemunduran, hal ini tidak terlepas dari kuat dan lemahnya politik Islam. Kesadaran terbangunnya politik yang kuat sesungguhnya jaminan dari kekuatan Islam, begitu pula sebaliknya, peradaban Islam mengalami kemunduran disebabkan lemahnya dalam berpolitik. Karena itu berpolitik harus dikuasai, ilmu-ilmu politik harus didalami oleh masyarakat Islam guna mempersiapkan penguatan terhadap penguasaan politik itu sendiri. Sampai pada akhirnya ketika muncul pemilihan Kepala Negara atau Kepala Daerah, umat Islam dituntut untuk melibatkan diri yang tidak saja sebagai peserta politik tetapi turut memainkan politik itu sendiri.

Paradigma masyarakat Islam terhadap politik bukan sebagai sebuah keharusan harus ditinggalkan, hukum berpolitik adalah fardhu terlebih untuk kepentingan umat Islam. Umat Islam harus bersatu dimanapun berada untuk memperjuangkan politiknya. Yakinlah politik menjadi senjata umat Islam untuk mempertahankan atau melaksanakan siasah dalam masyarakat Islam itu sendiri. Berbagai kebijakan yang harus diterapkan di masyarakat terkadang terhalang oleh berbagai kekuatan lain. Contoh saja terkait dengan penerapan Peraturan Daerah (Perda) berorientasi syariat untuk diterapkan dalam sebuah daerah kepentingan masyarakat Islam, tetapi terhalang karena relatif sedikitnya perwakilan politisi Islam di sebuah Parlemen. Konsekwensinya pembumian nilai – nilai syariat yang akan ditransformasikan dalam yuridis formal, kandas akibat dari lemahnya kekuatan politik Islam yang ada.

Dalam konteks Indonesia, mengukur kekuatan politik dapat dilakukan melalui pendirian Partai Politik (Parpol) keterlibatan sebagai pengurus Parpol, maju sebagai calon Kepala Daerah, duduk sebagai anggota DPR dan lainnya. Semua ini menjadi media strategis dalam menyuarakan politik dan kekuatan politik. Tidak ada cara lain bahwa persatuan dan kesatuan masyarakat Islam menjadi modal dalam memberikan kekuatan politik masyarakat Islam. Jika tidak politik yang dibangun akan sia – sia. Disinilah dibutuhkan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat Islam. Hindari sikap egoisme dan pentingkan prioritas

dalah persatuan dan kesatuan dengan menunjuk elit-elit yang mampu memberikan kemajuan dan kekuatan bagi bagi masyarakat Islam. Terlebih masyarakat Islam menjadi masyarakat mayoritas jika dibandingkan dengan masyarakat agama lain, ini menjadi potensi kekuatan yang harus diberdayakan lebih baik lagi ke depan.

Masyarakat Islam harus memiliki komitmen bersama bahwa kepentingan masyarakat Islam dalam berbagai aspek harus menjadi tujuan bersama. Hal ini akan terwujud jika politik masyarakat Islam harus dibenahi. Kelemahan berpolitik selama ini harus dievaluasi dengan berbagai cara yang bijak untuk dilakukan. Berangkat dari studi kelayakan hingga mencari solusi yang tepat dengan cara berpolitik strategis sesuai dengan ketentuan agama yakni tidak berpolitik praktis yang dapat merugikan masyarakat Islam. Masyarakat Islam menunggu gebrakan – gebrakan politik dari elit – elit Islam itu sendiri untuk maju dengan mengkedepankan kepentingan masyarakat Islam. Begitu pula sebaliknya kekuatan masyarakat Islam untuk bersatu menjadi dorongan kuat majunya para elit politik Islam. Dalam konteks Pilkada misalnya persatuan masyarakat Islam untuk memilih dan mendorong majunya calon dari masyarakat Islam sangat dibutuhkan. Tidak hanya sebatas komitmen tetapi perlu ditunjukkan dalam rangka memenangkan calon dari masyarakat muslim itu sendiri. Disinilah masyarakat muslim dituntut untuk memilih dan memilih calon terbaik dan representatif membangun kekuatan politik masyarakat. Politik yang kuat akan menguntungkan masyarakat muslim. Begitupula sebaliknya politik yang lemah akan melemahkan masyarakat muslim. Karena itu jadikanlah momentum Pilkada sebagai media untuk memberikan perubahan besar terhadap kekuatan masyarakat Islam. Semuanya ini akan ditentukan secara bersama oleh masyarakat muslim itu sendiri. Begitu pula dorongan keterlibatan berparpol, menjadi pengurus parpol adalah langkah yang harus dipahami menjadi bagian penting untuk diikuti dalam penguatan politik masyarakat Islam.

E. Problem Sosial dan Ekonomi umat Islam

1. Masalah Sosial

a. Pengertian Masalah Sosial

Term masalah sosial terdiri dari dua kata yakni “masalah” dan sosial. Masalah diartikan sesuatu yang harus diselesaikan atau dicarikan solusinya. Masalah diartikan juga suatu realitas yang muncul dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Sedangkan sosial diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mendefinisikan masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur – unsur kebudayaan dan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan – keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan – ikatan sosial.³⁷ Dengan demikian masalah sosial diartikan adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Artinya masalah sosial dipandang sebagai realitas yang tidak diharapkan oleh masyarakat maupun negara. Karena tuntutan perubahan adalah sesuatu yang diinginkan bersama. Terdapat beberapa contoh sebagai permasalahan sosial di Indonesia seperti ; Gang motor, putus sekolah, prostitusi, pemukiman liar, pengangguran perkotaan, narkoba, aborsi, tawuran pelajar, hoax, ujaran kebencian, pembahakaran hutan dan lain sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto setiap masyarakat mempunyai ukuran yang berbeda terkait dengan masalah sosial. Contohnya persoalan gelandangan yang terjadi di kota – kota besar Indonesia. Persolan gelandangan ini belum tentu menjadi masalah sosial yang terjadi di kota – kota lainnya. Karena faktor waktu sangat menentukan. Penyakit masyarakat seperti berjudi pada waktu – waktu lampau dianggap sebagai masalah sosial yang harus dicarikan solusinya,

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017) h. 312

namun dalam waktu – waktu tertentu tidak dipandang sebagai masalah sosial. Selain itu ada juga masalah – masalah yang tidak bersumber pada penyimpangan norma – norma masyarakat, tetapi lebih banyak bersentuhan kepada susunannya, seperti masalah penduduk, pengangguran yang terjadi di kota – kota maupun desa.³⁸

b. Faktor-Faktor Terjadinya Masalah Sosial

Munculnya masalah sosial disebabkan oleh banyak faktor. Para ahli sosial meletakkan dengan konsep yang berbeda meskipun substansi sama. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah sosial disebabkan adanya kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor – faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan.³⁹ Faktor ekonomis yang dimaksudkan adalah masalah kemiskinan, yang terdiri dari kemiskinan struktural dan kemiskinan absolut. Faktor biologis dimaksudkan adalah munculnya persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular (flu burung, SARS, HIV dan lainnya. Sedangkan faktor biologis dimaksudkan munculnya persoalan yang harus dicari solusi terkait dengan psikologi misalnya depresi, stress, gangguan jiwa, gila dan lainnya. Begitu pula dimaksud faktor sosial dimaksudkan kasus – kasus yang muncul dimasyarakat mulai dari tingginya tingkat perceraian, kenakalan remaja, SARA dan lainnya.⁴⁰

Selanjutnya terjadinya masalah sosial disebabkan oleh faktor – faktor diantaranya : *Pertama*, Geografi. Faktor ini menjadi masalah sosial ketika kondisi geografi tidak berpihak kepada manusia. Geografi dimaksud disini adalah adanya faktor alam yang tidak bersahabat sehingga sering menimbulkan bencana alam seperti gempa, banjir, gunung meletus dan lainnya menyebabkan terjadi permasalahan sosial dalam sebuah negara ataupun daerah. Indonesia termasuk negara rawan dengan bencana alam. Dampak yang ditimbulkan

³⁸ *Ibid*, h. 109 – 110.

³⁹ *Ibid.*, h. 114

⁴⁰ Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, h. 51 - 52

memberikan permasalahan sosial mulai dari kemiskinan, kehilangan tempat tinggal, menciptakan pengangguran dan lainnya. Namun problem sosial tersebut harus diantisipasi sedini mungkin. *Kedua*, Urbanisasi. Dimaksud urbanisasi adalah perpindahan individu dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan. Akibat dari urbanisasi dapat menyebabkan perubahan besar pada sisi sosial, ekonomi dan perubahan lingkungan yang ada. Dampak urbanisasi dari desa ke kota akan meninggalkan berbagai permasalahan sosial, mulai dari desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian. Desa banyak kehilangan penduduk yang berkualitas disebabkan pindah ke kota. Begitu pula dampak negatif yang dirasakan kota seperti pertumbuhan masyarakat kota yang tinggi, bertambahnya angka pengangguran kota dan lainnya. *Ketiga*, kemiskinan. Dimaksud dengan faktor kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kekurangan materi dan finansial sehingga menjadikan seseorang dalam kemiskinan. Kemiskinan muncul disebabkan kekurangan makanan, kelaparan, tidak mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya. Kemiskinan menjadi permasalahan sosial setiap negara, daerah atau masyarakat. Tidak ada negara yang menginginkan tingginya angka kemiskinan, karena ini menjadi tugas berat negara untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan solusi yang diciptakan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya. *Keempat*, ledakan Penduduk. Dimaksud dengan faktor ini adanya jumlah penduduk yang besar atau pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran yang sangat tinggi sedangkan angka kematian mengalami penurunan. Dampak dari ledakan penduduk dapat menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara, tingginya angka pengangguran, meningkatnya kriminalitas dan memburuk kondisi sosial lainnya sehingga menciptakan masalah sosial. *Kelima*, diskriminasi Gender. Faktor ini juga menjadi pemicu problema sosial. Diskriminasi gender adalah terjadi ketidakadilan terhadap peran yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan. Gender adalah perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak dan perilaku yang dibentuk oleh keteraturan sosial dan budaya setempat. Bentuk diskriminasi gender terjadi dimana–

mana, masih ada orang yang menganggap bahwa laki-laki domain di atas segalanya. Kesadaran untuk mengapresiasi perempuan dianggap penting agar tidak tercipta diskriminasi mengatasnamakan gender. Akibat dari diskriminasi dapat menciptakan ketidakadilan, perendahan diri dan lain sebagainya. *Keenam*, kurangnya Pendidikan. Pendidikan diartikan pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan. Setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam pendidikan. Negara wajib memberikan pendidikan kepada masyarakatnya. Semakin tinggi persentase pendidikan yang dimiliki masyarakat maka akan berpengaruh kepada peningkatan kebaikan dalam masyarakat tersebut. Namun jika terjadi kurangnya pendidikan di Indonesia, maka konsekwensinya terciptanya ketidakpemerataan hal pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat dan ini akan berdampak negatif kepada negara ataupun masyarakat.

Faktor – faktor di atas dipandang sebagai faktor krusial menciptakan permasalahan sosial baik di masyarakat maupun negara. Permasalahan sosial yang ada dan tumbuh subur di masyarakat harus dicarikan solusinya dalam ragam pendekatan. Hal ini penting segera dilakukan agar permasalahan sosial tidak semakin berkembang luas. Maka problem solving menjadi langkah penting untuk dilakukan.

c. Upaya Pengendalian

Upaya pengendalian (social control) menjadi langkah penting dilakukan dalam menekan dan mencari solusi terjadinya masalah sosial. Pengendalian sosial dimaksudkan, mengutip pendapat Joseph S. Roucek adalah sebuah proses baik direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah – kaidah dan nilai – nilai sosial.⁴¹ Defenisi ini menegaskan adanya pengendalian sosial dari aspek edukatif. Ia membatasi pengendalian sosial segala proses, baik direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah–

⁴¹ *Ibid.*, h. 252.

kaidah dan nilai sosial yang berlaku.⁴² Selanjutnya Robert M. Lawang menjelaskan pengendalian sosial adalah semua cara yang digunakan masyarakat untuk mengembalikan sipenyimpang pada garis normal atau yang sebenarnya.⁴³ Dari berbagai defenisi dapat disimpulkan dimaksud dengan pengendalian sosial adalah cara atau proses pengawasan yang terencana dengan tujuan untuk mengajak, mendidik bahkan memaksa masyarakat untuk mematuhi norma atau nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Pengendalian sosial dipandang penting dan menjadi kebutuhan dalam mencegah dan problem solving dari masalah sosial. Pengendalian sosial akan memberikan manfaat yang cukup besar tidak saja dirasakan oleh masyarakat tetapi juga individu. Koentoroningrat menjelaskan terdapat lima fungsi dari pengendalian sosial yaitu :

1. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma – norma kemasyarakatan. Upaya ini ditempuh dengan cara meyakinkan anggota masyarakat bahwa mematuhi norma dan nilai adalah langkah yang baik dalam mencapai kehidupan sosial. Keadaan yang baik jika anggota masyarakat mematuhi norma dan nilai – nilai dapat dirasakan ketika mereka hidup dalam keadaan lingkungan sosial yang aman, tertib, tentram dan sebagainya sehingga masing – masing masyarakat anggota tidak menemui berbagai macam gangguan sosial dalam memenuhi kebutuhan sosial. Cara yang dilakukan melalui pendidikan, sugesti sosial, menonjolkan kelebihan norma – norma.⁴⁴
2. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat kepada norma kemasyarakatan. Konsep ini mengandung pola-pola ganjaran dan hukuman, yakni memberikan penghargaan baik kepada masyarakat yang telah berperestasi menghasilkan produk karakter yang baik. Seperti pujian, penghargaan dan imbalan materi lainnya. Contohnya memberikan hadiah kepada anak

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 266

kecil yang telah berhasil melaksanakan puasa, jika tidak berpuasa maka tidak mendapatkan apa – apa. Bentuk pemberian merupakan upaya dari pelanggaran norma agama.⁴⁵

3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat jika mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma dan nilai kemasyarakatan yang berlaku. Contohnya Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa yang korup di dunia, hal ini terjadi disebabkan oleh rendahnya tingkat rasa malu terutama di lingkungan pejabat tinggi.⁴⁶
4. Menimbulkan rasa takut (shock therapy) di dalam diri seseorang atau sekelompok orang tersebut adalah resiko atau ancaman. Setiap orang akan menghindari perbuatan yang mengandung resiko, seperti resiko kecelakaan, kerugian dan lain sebagainya. Dengan munculnya resiko sesuatu yang harus dihindari dan berusaha untuk tidak mendatangkan resiko.⁴⁷
5. Menciptakan sistem hukum, yakni sistem tata tertib dengan sanksi–sanksi yang tegas bagi para penyelenggara yang biasanya dapat dilihat di dalam sistem hukum tiap struktur masyarakat yang berlaku. Hukum yang berlaku disertai sanksi sosial dan aparat pengendaliannya yang ditegaskan dalam bentuk peraturan resmi yang dibuat oleh badan kenegaraan. Dalam sistem ini para pelanggar akan dikenai sanksi yang tegas seperti hukuman kurungan, hukuman penjara dan hukuman mati.⁴⁸

Terdapat dua sifat pengendalian sosial yang harus dilakukan yaitu : *Pertama*, pengendalian sosial preventif. Dimaksud fengan sifat ini adalah segala bentuk pengendalian sosial yang berupa pencegahan atas perilaku menyimpang (deviation) agar dalam kehidupan sosial tetap kondusif (konformis). Adapun keadaan konformis dari kehidupan

⁴⁵ *Ibid.*, h. 270

⁴⁶ *Ibid.*, h. 270 - 271

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, h. 272.

sosial hanya akan tercapai jika perilaku sosial dalam keadaan terkendali. Dengan kata lain tindakan pencegahan adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Seperti tindakan polisi lalu lintas yang senantiasa berjaka di jalan sebagai upaya antisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas. *Kedua*, pengendalian sosial represif. Dimaksudkan adalah bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau mengembalikan situasi deviasi menjadi keadaan kondusif kembali (konformis). Pengendalian ini merupakan bentuk pengendalian dimana penyimpangan sosial sudah terjadi kemudian dikembalikan lagi agar situasi sosial menjadi kembali normal berupa adanya kepatuhan masyarakat terhadap norma sosial tersebut. Contohnya tindakan polisi menertibkan tawuran antar pelajar menggunakan tembakan dengan tujuan sebagai upaya pembubaran tawuran.⁴⁹

Selanjutnya pengendalian sosial akan efektif dilakukan jika adanya sanksi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi kontrol sosial tersebut. Sanksi akan diberikan kepada para pelanggar mauun calon yang akan melanggar. Dimaksud sanksi merupakan bentuk penderitaan, kerugian, beban berat yang sengaja diciptakan oleh lembaga sosial untuk memaksa anggota masyarakat agar taat pada norma yang ada. Kontrol sosial menciptakan keharusan bagi setiap anggota masyarakat untuk berperilaku konform. Dalam konteks ini terdapat tiga sanksi yang harus diberikan dalam menciptakan tertib sosial yaitu : *Pertama*, sanksi fisik yakni sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada pihak yang terbebani sanksi tersebut. Misalnya didera, dipenjara, dijemu, tidak diberi makan, dihukum mati dan sebagainya. *Kedua*, sanksi psikologis, yakni berupa beban penderitaan yang dikemukakan pada pihak yang terbebani sanksi dengan beban beban kejiwaan seperti dibully di muka umm, dieksposnya kejahatan di berbagai media dan lain sebagainya. *Ketiga*, sanksi ekonomik, yakni adanya beban penderitaan yang dibebankan kepada pelanggar

⁴⁹*Ibid.*, h. 256

norma berupa pengurangan benda dalam bentuk penyitaan dan denda, membayar ganti rugi dan lain – lain.⁵⁰

Para pakar sosiologi mengatakan ketiga bentuk sanksi di atas, sering kali diterapkan secara bersamaan dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Seperti seorang hakim yang akan memberikan keputusan hukum pidana penjara kepada seorang pelanggar hukum. Maka hukum yang diterima terpidana tidak saja sanksi fisik berupa kurungan, tetapi juga sanksi psikologis berupa menanggung malu dan aib sekaligus sanksi ekonomis berupa hilangnya kesempatan untuk meneruskan ekonomisnya karena dipenjara dalam sekian waktu yang ditentukan hakim.⁵¹ Terwujudnya pemberian sanksi sebagai pengendalian sosial membutuhkan lembaga pengendalian sosial. Lembaga pengendalian sosial secara umum dibedakan menjadi dua bahagian, yakni lembaga pengendalian sosial resmi (formal) seperti lembaga kepolisian, lembaga pengadilan dan lembaga pendidikan berikutnya adalah lembaga pengendalian sosial informal seperti lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi-organisasi sosial (LSM dan sebagainya), lembaga penyiaran dan pemberitaan (Pers).⁵²

2. Masalah Ekonomi.

a. Pengertian Masalah Ekonomi

Dimaksud dengan masalah ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka.⁵³ Artinya terdapatnya ketidak-seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut menyebabkan timbulnya kelangkaan. Dimaksud dengan kelangkaan tidak seimbangny jumlah atau ketersediaan antara

⁵⁰ *Ibid.*, h. 257

⁵¹ *Ibid.*, h. 258

⁵² *Ibid.*, h. 272 - 281

⁵³ Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi)*, h. 3

alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh individu. Karena ketidakseimbangan inilah muncul kelangkaan.

Dalam konsep ekonomi modern secara umum terdapat berbagai bentuk masalah ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Barang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Produksi barang dan jasa dimaksudkan adalah hasil transformasi berbagai faktor produksi. Barang dan jasa memberikan mafaat bagi pemakai/konsumen. Sedangkan barang apa yang harus diproduksi bermakna barang apa yang harus disediakan berapa banyak agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
2. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut, metode dan teknologi apa yang digunakan dalam proses produksi. Namun manfaat teknologi tidak ditentukan oleh kecanggihan. Teknologi bukan satu – satunya pilihan. Sebab banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti skala produksi, kemampuan manajemen, iklim, kemampuan finansial dan sikap mental. Pilihan teknologi yang digunakan sebaiknya dikaitkan dengan faktor-faktor di atas. Agar teknologi yang dipilih menghasilkan tingkat efisiensi paling besar.
3. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Jawaban ini berorientasi kepada dimensi keadilan dan pemerataan. Sebab apa gunanya produksi melimpah karena menggunakan teknologi tinggi, berskala besar dan efisien, apabila hanya dinikmati segelintir anggota masyarakat saja. Keputusan untuk siapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat bersangkutan. Bagi masyarakat egaliter, keadilan berarti setiap memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan masyarakat utilitarian tidak terlalu mementingkan keadilan dan jumlahnya. Jumlah akan berbeda yang penting apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, h. 3 - 4

b. Sistem Ekonomi Sebagai Solusi Masalah Ekonomi.

Berbagai masalah ekonomi di atas membutuhkan strategi sebagai solusi dalam mengatasi masalah ekonomi. Para pakar ekonomi menyebutkan sistem ekonomi sebagai solusi penting dalam mengatasi masalah ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan kehidupan bersama suatu bangsa atau negara.⁵⁵ Mengutip pendapat Gregory Grosman (1984) sistem ekonomi diartikan sekumpulan komponen – komponen atau unsur – unsur terdiri atas unit – unit dan agen – agen ekonomi serta lembaga – lembaga (institusi) ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi.⁵⁶ Kemudian pendapat lain mengatakan sistem ekonomi adalah sebuah organisasi meliputi sejumlah lembaga dan pranata (ekonomi, sosial, politik dan lainnya) yang berfungsi mencari solusi barang dan jasa apakah yang dihasilkan, bagaimana barang dan jasa tersebut akan dihasilkan dan bagaimana cara membagi barang – barang dan jasa yang dihasilkan kepada masyarakat.⁵⁷

Dengan kata lain komponen – komponen tersebut memiliki hubungan fungsional yang dapat menjadi alat koordinasi alokasi sumber daya ekonomi.

Menurut Paratama Rahardja dan Mandala Manurung,⁵⁸ terdapat beberapa aspek penting dalam suatu sistem ekonomi yaitu :

1. Adanya komponen – komponen yang terdiri atas unit, perilaku dan institusi. Unit ekonomi dimaksudkan adalah individu atau kelompok – kelompok dalam sistem ekonomi yang bekerjasama untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu. Misalnya rumah tangga konsumen, perusahaan, serikat pekerja dan kantor pemerintah.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 477

⁵⁶ *Ibid.*, h. 464

⁵⁷ Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme Suatu Analisis Ekonomi Teoritis* (Bandung : Remaja Karya, 1986) h. 22

⁵⁸ Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi)* h, 464 – 466.

Sedangkan dimaksud dengan pelaku ekonomi adalah seorang yang menjalankan fungsi – fungsi ekonomi. Seperti konsumen, pekerja, pengusaha, investor dan perencana. Berikutnya adalah institusi ekonomi yaitu adalah sekumpulan norma – norma (norms), aturan main (rule of conduct) dan cara pikir yang telah baku (*established way of thinking*). Hak milik, perusahaan – perusahaan, rumah tangga, konsumen, pemerintah, uang, pajak, motivasi memperoleh keuntungan, perencanaan semuanya adalah contoh-contoh institusi ekonomi.

2. Adanya keterkaitan yang saling terkait dan mempengaruhi secara teratur kontinu. Hal ini penting dilakukan yakni untuk terbentuknya sistem ekonomi, unit – unit, pelaku – pelaku dan institusi harus saling terkait dan mempengaruhi. Seperti ada hubungan dan saling mempengaruhi antara rumah tangga dan perusahaan. Biasanya perusahaan membeli faktor produksi atau input dari rumah tangga. Rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari perusahaan. Untuk memperlancar interaksi dibutuhkan uang dan hak memperoleh keuntungan. Dari sinilah terbentuk sistem ekonomi jika hubungan dan ketergantungan tersebut bersifat teratur dan kontinu. Dengan demikian arah pergerakan ekonomi dapat diramalkan. Misalnya jika jumlah uang beredar berkurang, maka kelancaran hubungan antara rumah tangga konsumen dengan perusahaan akan terganggu.
3. Adanya fungsi koordinasi. Aspek ini dimaksudkan jika hubungan antar elemen dalam sistem ekonomi dapat diramalkan, sistem ekonomi dapat dipakai sebagai alat koordinasi. Elemen terpenting dari pengertian koordinasi adalah tercaainya keselarasan tindakan antar elemen dalam sistem, melalui proses komunikasi atau pertukaran. Jadi sistem koordinasi yang baik harus didukung oleh data yang memadai benar dan akurat, serta sistem informasi yang baik. Dengan demikian para pelaku ekonomi dapat menempatkan diri dengan benar ketika berinteraksi tanpa harus saling mengenal secara pribadi.

Dari penjelasan di atas menunjukkan sistem ekonomi menjadi

penting dan strategis sebagai solusi masalah ekonomi, karena di dalamnya terdapat perilaku dan motivasi, saling mempengaruhi dan adanya fungsi koordinasi.

c. Klasifikasi Sistem – Sistem Ekonomi Dunia

Terdapat berbagai macam sistem ekonomi di dunia, hal ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, baik yang sudah diterapkan oleh beberapa negara maupun menjadi gagasan pikiran yang harus diterapkan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat maupun negara, yaitu :

1. Perspektif dari mekanisme koordinasi. Berdasarkan klasifikasi ini terbagi lagi kepada sistem tradisi (*tradition economy*), sistem komando (*command economy*) dan sistem ekonomi pasar (*market economy*).⁵⁹ Untuk lebih jelasnya berbagai sistem tersebut dijelaskan di bawah ini.
 - a. Sistem tradisi (*tradition economy*). Dimaksud dengan sistem tradisi adalah mekanisme koordinasi berdasarkan tradisi berlaku dalam perekonomian yang masih berada dalam tahap sangat sederhana (subsistence level) dimana kegiatan ekonomi terbatas, jumlah penduduk sangat sedikit dan saling mengenal, begitu pula ikatan kekeluargaan juga masih kuat. Pada tahap ini tujuan berproduksi tidaklah terlalu dimotivasi oleh semangat pencarian keuntungan. Skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kelebihan produksi ditukarkan (barter) dengan produksi lain dari keluarga/unit ekonomi yang lain. Dalam sistem ekonomi ini telah terjadi pekerjaan spesialisasi pekerjaan atau tenaga kerja. Namun spesialisasi yang terjadi masih sangat sederhana dan terbatas. Apalagi spesialisasi – spesialisasi umumnya berdasarkan keturunan. Seperti keluarga petani akan meneruskan keahliannya kepada para keturunannya. Sementara para keturunan tidak diizinkan untuk mengembangkan spesialisasi di bidang non

⁵⁹ *Ibid.*

pertanian, karena mereka berasumsi pekerjaan petani menjadi hal yang telah ditakdirkan secara turun temurun. Maka masalah yang dihadapi adalah rendahnya inovasi dan produktivitas serta buruknya distribusi pendapatan. Melihat karakter – karakter di atas, sistem tradisi tidak dapat dijadikan sebagai pembangunan perekonomian modern, berbagai kendala akan banyak dihadapi terutama terkait dalam pemahaman tentang takdir.⁶⁰

- b. Sistem komando (*command economy*). Dimaksud dengan sistem ini adalah mekanisme koordinasinya berdasarkan komando pusat kekuasaan (*central authority*). Semua kegiatan ekonomi yang penting : produksi, konsumsi dan distribusi ditentukan oleh lembaga kekuasaan. Berupa lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi yang disebut dengan perencanaan terpusat (*central planing*). Artinya sistem komando sangat mengandalkan perencanaan. Salah satu negara yang pernah menggunakan perencanaan terpusat adalah Republik Rakyat Cina dibawah kepemimpinan Mao Zedong.⁶¹ Berbagai kalangan menilai bahwa ideologi sistem komando berideologi Sosialisme, Maxisme dan atau Komunisme. Bahkan pemikiran – pemikiran Keynes yang mengajarkan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian modern diadaptasi oleh beberapa pemimpin negara – negara tersebut. Mereka yang percaya kepada ampuhnya peranan perencanaan terpusat sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien, menggunakan teori Leontief (matriks Leontief) sebagai model perekonomian. Secara sistematis mode; Leontief memang dapat membuktikan bahwa sistem perencanaan terpusat adalah sistem alokasi sumber daya yang efisien dan ini dipandang terbaik dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Namun berbagai kalangan juga menilai meski sistem perencanaan terpusat dipandang terbaik dan efisien juga tidak dapat dibuktikan. Sampai saat ini tidak ada satupun negara yang menganut

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, h. 466 - 467

sistem perekonomian komando terutama negara – negara komunis yang mampu memberikan keadilan dan kemakmuran kepada rakyatnya.⁶²

- c. Sistem ekonomi pasar (*market economy*). Diamksud dengan sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang mengandalkan interaksi kekuatan permintaan – penawaran sebagai alokasi yang efisien. Indikator yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk bertindak adalah tingkat harga dan perubahannya. Jika tingkat harga makin tinggi, menunjukkan indikasi bahwa permintaan relatif lebih besar dari penawaran, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan informasi itulah produsen dan konsumen memposisikan diri. Misalnya jika harga tinggi dan terus meninggi adalah tanda kelebihan permintaan makin membesar. Produsen akan meningkatkan produksinya sehingga penawaran bertambah. Sebaliknya konsumen membatasi konsumennya, sehingga permintaan tidak bertambah atau mungkin berkurang. Pergerakan harga akan terhenti jika permintaan sudah sama dengan penawaran.⁶³ Jika dilihat kelebihan dari sistem ekonomi pasar adalah kecilnya peranan pemerintah yang berarti juga menekan biaya – biaya birokrasi. Tetapi sistem pasar dapat memberikan hasil yang baik bila struktur pasar benar – benar pasar persaingan sempurna yang tidak terhambat oleh dimensi waktu dan tempat. Namun seperti kita ketahui dunia kita

⁶² Pada abad ke 20 sebagian besar negara yang menganut sistem perekonomian komando justru runtuh atau berada dalam kondisi kritis. Seperti negara Rusia sebagai benteng komunis, perekonomiannya berada dalam keadaan semberawut terutama sejak tahun 1990. Sedangkan negara China adalah negara komunis yang perekonomiannya masih bertahan, walaupun belum mampu memberikan kemakmuran dan keadilan. Ketidakmampuan sistem ekonomi komnado memnberikan keadilan dan kemakmuran disebabkan idiologi Marxisme damn Komunisme mempunyai asumsi yang salah tentang manusia dan sejarahnya. Bagi mereka manusia adalah makhluk yang sangat materialisme, sehingga akan merasa bahagia jika kebutuhan materialnya terpenuhi. Karena itu manusia akan bahagia jika diatur melalui perencanaan sebagai jalur mempercepat mendapatkan kemakmuran bersama. *Ibid.*, h. 467 - 468

⁶³ *Ibid.*

adalah dunia yang tidak terbatas, sehingga pasarpun bukan pasar terbatas. Akhirnya pasar tidak mampu menjadi alat alokasi yang efisien.⁶⁴

2. Perspektif penekanan hak kepemilikan yang diberlakukan yang dikelompokkan lagi kepada sistem sosial (*social economy*), sistem kapitalis (*capitalis economi*) dan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*)
 - a. Sistem Sosialits (*socialist economy*). Dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis adalah kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Konsekwensinya penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor ekonomi harus ditekan sedikit mungkin.⁶⁵ Ada yang berpendapat terdapat persamaam sistem sosialis dengan sistem ekonomi Marxis dan Komunis, yakni sangat tidak percaya dengan ekonomi pasar. Artinya peranan pasar sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi ditekan seminimal mungkin. Sebagai gantinya peranan perencanaan ekonomi sebagai sesuatu yang diandalkan. Konsekwensinya peranan pemerintah dalam sistem ekonomi sosial, marxis dan komunis tersebut sangat besar. Bahkan sistem ekonomi sosialis merupakan sistem yang etatis (peranan negara sangat besar).⁶⁶
 - b. Sistem Kapitalis (*Kapitalist economy*). Dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset- aset produktif dan faktor – faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama

⁶⁴ Sistem ekonomi pasar mengalami kegagalan mekanisme terjadi pada periode 1929 – 1933, periode terjadinya Depresi Besar (great depression) yang melanda seluruh perekonomian Eropa Barat, Amerika Serikat dan juga Jepang. Kegagalan ini menghasilkan koreksi – koreksi terhadap sistem prekonomian pasar. Karena sebagian besar perekonomian pasar adalah negara – negara penganut paham politik liberal dengan ideologi ekonomi kapitalisme. *Ibid.*, h. 468 - 469

⁶⁵ *Ibid.*, h. 473

⁶⁶ *Ibid.*

kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.⁶⁷ Namun umumnya perekonomian kapitalis menggunakan mekanisme pasar sebagai alat koordinasi. Akibatnya kekuatan dan keterbatasan mekanisme pasar sekaligus juga menjadi kelemahan sistem kapitalis.⁶⁸ Berbagai kelemahan yang paling mendasar yaitu terdapatnya persaingan bebas, dalam kenyataan terdapat saling mengorbankan kemudian prinsip mekanisme pasar jika diterapkan dalam kebijakan politik dapat mendorong kebijakan imrealis yakni kebijakan yang bertujuan memperluas wilayah kekuasaan ekonomi/politik.⁶⁹

Selanjutnya terdapat lima institusi pokok membangun sistem ekonomi kapitalis yaitu : *Pertama*, adanya hak kepemilikan, sebagian besar hak kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis adalah hak kepemilikan swasta/individu (private/individual property). Dengan hak kepemilikan ini individu dalam masyarakat kapitalis terpacu untuk produktif. *Kedua*, adanya keuntungan, dalam masyarakat kapitalis, keuntungan (profit) selain memuaskan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif juga merupakan bagian dari ekspresi diri. Keran itu keuntungan

⁶⁷ Sejarah perkembangan sistem kapitalis dimulai di daratan Eropa, dimulai dengan era kelahiran kembali kebudayaan Eropa (renaissance) di sekitar abad pertengahan. Dimaksud dengan kelahiran kembali kebudayaan Eropa adalah pertemuan kembali dengan filsafat Yunani yang dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan modern. Cepat diterimanya kebudayaan Yunani oleh para ilmuwan Eropa, tidak terlepas dari suasana masa itu. Begitu dominannya kekuasaan gereja yang berhak memutuskan sesuatu itu benar atau salah, mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif di luar gereja. Dalam hal ini filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa rasiolah yang merupakan otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran sangat cocok dengan kebutuhan ilmuwan Eropa kala itu. Namun sebagaimana gerakan – gerakan pembaruan lainnya, gerakan pencerahan ini juga membawa dampak negatif munculnya semangat kapitalisme membawa dampak negatif yang mencapai puncaknya di abad ke 19. Dampak negatif tersebut eksploitasi buruh, penguasaan kekuatan ekonomi di tangan pemilik modal dan digunakannya gereja/pemuka gereja sebagai legitimasi politik atau ekonomi. *Ibid.*, h. 469 – 470.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 472

⁶⁹ *Ibid.*, h. 472 – 473.

dipercaya dapat memotivasi manusia untuk bekerja keras dan produktif. *Ketiga*, adanya konsumerisme, yaitu falsafah hidup yang mengajarkan untuk mencapai kepuasan sebesar-besarnya selama hidup di dunia (hedonisme). Karena itu konsumerisme dianggap sebagai hidup yang pebuah dengan pemborosan. Tetapi dalam arti positif konsumerisme adalah gaya hidup sangat menekankan pentingnya kualitas barang dan jasa yang digunakan. Karena tujuan akhir dari penggunaan barang dan jasa adalah meningkatkan nilai kegunaan kehidupan. Dilihat dari sisi ini, tidak mengherankan jika masyarakat kapitalis dikenal sebagai masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. *Keempat*, adanya kompetisi, melalui kompetisi tersaring individu – individu atau perusahaan yang mampu bekerja efisien. Efisien akan menguntungkan produsen maupun konsumen baik yang membutuhkan atau menawarkan. *Kelima*, adanya harga, merupakan indikator kelangkaan. Barang dan jasa yang semakin mahal berarti semakin langka. Bagi produsen gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat. Bagi konsumen gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menahan diri, menyusun ulang rencana pengeluarannya agar kehidupan yang berlanjut.⁷⁰

- c. Sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) yaitu mengkombinasikan kekuatan sistem sosial dan sistem kapitalis sekaligus mereduksi atau saling menutupi kelemahan – kelemahan kedua sistem tersebut. Dengan kata lain sistem ekonomi campuran akan menjadi alternatif yang paling baik diantara dua sistem (kapitalis – sosialis). Namun sejarah menunggu pembuktiannya.⁷¹

3. Sistem Ekonomi Pancasila

Indonesia sebagai sebuah negara memperkenalkan pemikiran

⁷⁰ *Ibid.*, h. 471 – 472

⁷¹ *Ibid.*, h. 476

sistem ekonomi Pancasila (SEP). Kehadiran SEP menurut para ahli seperti Sri Edi Swasono pergulatan pemikiran SEP merupakan dinamika penafsiran tentang pasal – pasal ekonomi UUD 1945. Dalam pidato Wakil Presiden RI, Muhammad Hatta, dalam Konferensi ekonomi di Yogyakarta tanggal 3 Februari 1946 ditegaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945, yakni : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1). Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat 2). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).⁷²

Terdapat beberapa ciri dari sistem ekonomi Pancasila yaitu : *Pertama*, peranan negara penting, tetapi tidak dominan. Dengan kata lain SEP menegaskan usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan secara seimbang. *Kedua*, SEP tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh buruh. Sistem ekonomi didasarkan atas asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan antar manusia. *Ketiga*, masyarakat memegang peranan penting. Maksudnya produksi dikerjakan oleh semua dan dibawah pimpinan atau pengawasan anggota – anggota masyarakat. *Keempat*, negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁷³ Karena itu demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila menghindarkan beberapa hal yakni sistem ekonomi liberal yang bebas yang dapat menumbuhkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia dan bangsa. Menghindarkan sistem ekonomi komando adanya negara beserta elit – elit ekonomi negara yang cukup dominan. Serta menghindari persaingan tidak sehat berupa pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau monopoli yang merugikan masyarakat.⁷⁴

⁷² *Ibid.*, h. 481 - 482

⁷³ *Ibid.*, h. 487

⁷⁴ *Ibid.*, h. 488

4. Sistem Ekonomi Islam.

Dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi dalam pelaksanaannya berdasarkan syariah dengan berlandaskan kepada nash (Alquran – sunnah). Ciri – ciri ekonomi Islam lebih menekankan kepada: (1). Pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. (2). Pengakuan hak umat atau umum dan menjadi prioritas dibandingkan hak lainnya. (3). Manusia hanya pemegang amanat sementara. Segala limpahan harta menjadi hak mutlak Allah SWT. (4). Pengaturan tentang konsep halal dan haram terhadap semua produk (barang dan jasa) (5). Mengharamkan riba dan membangun sistem bagi hasil (6). Larangan penimbunan harta kepada umat Islam. Karena dapat menghambat aliran harta yang kaya kepada yang miskin. (7). Distribusi harta dalam bentuk zakat, infak dan sedekah serta lainnya dari yang kaya kepada yang miskin.

Dalam penerapannya sistem ekonomi Islam dipandang sebagai sistem terbaik dibandingkan dengan sistem ekonomi dunia yang sudah diperkenalkan di atas. Hal ini disebabkan ekonomi Islam mengandung prinsip – prinsip yaitu : (1). Sistem ekonomi Islam mencegah terjadinya kesenjangan sosial (Qs. an- Nur : 56). (2). Sistem ekonomi Islam tidak bergantung nasib atau keberuntungan (Qs. al-Baqarah : 219). (3). Sistem ekonomi Islam mendorong untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam (Qs. al – Jumuah : 10). (4). Sistem ekonomi Islam melarang secara tegas terjadinya praktek riba (Qs. al – Baqarah : 278). (5). Sistem ekonomi Islam menegaskan terciptanya pembuatan transaksi dengan jelas (Qs. al- Baqarah : 282). (6). Sistem ekonomi Islam mendorong terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam berbisnis. (Qs. al-Isra' : 35).

F. Perubahan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Masalah Sosial dan Ekonomi

1. Perubahan Sosial

Perubahan sosial menjadi konsep terpenting dalam mengukur

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Segala perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat dilihat melalui perubahan sosial. Lebih jelasnya perubahan sosial diartikan dalam berbagai pandangan. Gillin dan Gillin mengartikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara – cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan – perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, kondisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan – penemuan baru dalam masyarakat.⁷⁵ Selanjutnya Selo Soemartjan mendefinisikan perubahan sosial yakni terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga – lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai – nilai, sikap dan pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Penekanan definisi ini terletak pada lembaga – lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia yang kemudian mempengaruhi segi – segi struktur masyarakat lainnya.⁷⁶

Terjadinya proses – proses pada perubahan sosial dapat diketahui dari berbagai ciri – ciri sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu : *Pertama*, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat. *Kedua*, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan – perubahan pada lembaga – lembaga sosial tadi sifatnya independen, maka sulit sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga – lembaga sosial tertentu saja. Proses awal dan proses selanjutnya merupakan suatu rantai. *Ketiga*, perubahan – perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah – kaidah dan nilai – nilai yang baru. *Keempat*, perubahan – perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 261

⁷⁶ *Ibid.*

balik yang sangat kuat. *Kelima*, secara tipologis perubahan sosial dikategorikan sebagai berikut : (a). *Social proses ; the circulation of various reward, facilities and personnel in existing structure.* (b). *Segmentation; the prolifiration of structural units that do not differ qualitatively from existing units.* (c). *Structural change : the emerge of qualitatively new complexes of roles and organization.* (d). *Change in group structure ; the shifts in the composition og groups, the level of consciousness of group and the relation among the groups in society.*⁷⁷

Perubahan sosial akan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri dan bersumber di luar masyarakat itu sendiri. Bersumber dari dalam masyarakat antara lain :

1. Terjadinya pertambahan atau berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat di sebuah daerah menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Seperti orang lantas mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya berkurangnya penduduk disebabkan berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke daerah lain (transmigrasi) sehingga mengakibatkan kekosongan. Misalnya dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial yang mempengaruhi lembaga – lembaga kemasyarakatan.⁷⁸
2. Adanya penemuan – penemuan baru. Faktor ini dimaksudkan suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut dengan inovasi. Hal ini dapat dibedakan dalam pengertian *discovery* dan *invention*. *Discovery* adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru berupa alat dan berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. *Discovery* baru

⁷⁷ *Ibid.*, h. 265 - 266

⁷⁸ *Ibid.*, h. 273

menjadi invention kalau masyarakat sudah mengakui menerima serta menerapkan penemuan baru itu.⁷⁹

3. Adanya pertentangan masyarakat. Faktor ini menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Contohnya pada masyarakat Batak dengan sistem kekeluargaan patrilineal murni, terdapat adat istiadat apabila seorang suami meninggal, ketunannya berada di bawah kekuasaan keluarga almarhum. Namun ketika terjadi proses individualisasi terutama pada orang – orang Batak yang merantau, terjadilah penyimpangan anak – anak tetap tinggal pada ibunya. Kondisi ini memnabawa perubahan besar pada peranan keluarga batih dan juga kedudukan wanita yang selama ini dianggap tidak mempunyai hak dibandingkan dengan laki – laki.⁸⁰
4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Adanya konflik dalam masyarakat menjadi faktor terjadinya perubahan sosial. Sebagai salah satu contoh terjadinya revolusi pada Oktober 1917 telah menyulut terjadinya perubahan – perubahan besar di negara Rusia. Semula Rusia sistem kerajaan absolut kemudian berubah menjadi diktator proletariat yang berbasis pada doktrin Marxisme. Semua lembaga kemasyarakatan mulai dari bentuk negara samapi kepada keluarga batih mengalami perubahan – perubahan yang mendasar.⁸¹

Selanjutnya faktor yang bersumber dari luar masyarakat juga menentukan perubahan sosial. Faktor – faktor tersebut adalah :

1. Peperangan. Faktor ini dapat menciptakan perubahan sosial. Peperangan yang terjadi dengan negara lain dapat menciptakan perubahan seperti kebudayaan dan lainnya. Contoh terkecil adalah negara yang kalah perang dalam perang dunia kedua, seperti

⁷⁹ *Ibid.*, h. 274

⁸⁰ *Ibid.*, h. 278

⁸¹ *Ibid.*, h. 279

Jerman dan dan Jepang telah mengalami perubahan dalam lembaga kemasyarakatannya.

2. Kebudayaan Masyarakat lain. Faktor kebudayaan masyarakat lain dapat memberikan pengaruh perubahan besar pada sebuah masyarakat. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan menimbulkan pengaruh timbal balik antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Namun apabila hubungan tersebut berjalan melalui alat – alat komunikasi massa, ada kemungkinan pengaruh itu hanya datang dari satu pihak saja yakni dari masyarakat pengguna alat komunikasi tersebut. Pihak yang lain hanya menerima pengaruh tanpa mempunyai kesempatan memberikan pengaruh balik. Jika pengaruh dari masyarakat diterima tidak karena paksaan hasilnya dinamakan *demonstration effect*. Proses yang terjadi adanya penerimaan pengaruh kebudayaan asing dalam antropologi disebut *akulturasi*.⁸²

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengaruh Ekonomi Terhadap Kebijakan Politik.

Pertumbuhan ekonomi menjadi kajian penting dalam ilmu ekonomi atau melihat pertumbuhan ekonomi sebuah masyarakat, daerah maupun negara. Pertumbuhan ekonomi diartikan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi penurunan pengangguran.⁸³ Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan yakni proses perubahan kondisi negara secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih lagi dalam priode tertentu. Terjadinya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor penting yakni : adanya faktor prouksi, faktor investasi, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, faktor kebijakan moneter dan

⁸² *Ibid.*, h. 279 - 280

⁸³ Sri Endang Rahayu et.al, *Pengantar Ekonomi Makro*, h. 237

inflasi dan faktor keuangan negara.⁸⁴ Selanjutnya faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah : Faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.⁸⁵

Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam sebuah masyarakat, daerah dan negara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadikan masyarakat, daerah dan negara menjadi sejahtera. Inilah yang dicita-citakan setiap pemimpin negara bagaimana negara yang dipimpin sejahtera, makmur dan kuat. Pengaruh ekonomi mempengaruhi berbagai aspek penting sebuah negara termasuk terhadap kekuasaan politik. Menurut Muslim Mufti Pendekatan ekonomi politik selalu diimplementasikan dalam sebuah formulasi kebijakan bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada, sekaligus cara institusi politik mengelola sumber daya kekuasaan dan hasilnya menguntungkan individu dan publik. Dalam masyarakat dengan institusi sosial modern, pemerintah menjalankan tiga tugas yang berkaitan aktivitas ekonomi, redistribusi pendapatan dan pengadaan beberapa jenis barang dan jasa tertentu. Kegiatan pengaturan aktivitas ekonomi dimaksudkan meliputi penyusunan rangsangan produksi melalui berbagai insentif yang diberikan pada jenis – jenis produksi komoditas strategis, usaha penekanan pengangguran dan lainnya. Pemerintah dapat menggunakan berbagai cara pengendalian langsung atau tidak langsung. Kegiatan langsung berupa membuat regulasi terkait keselamatan industri, penetapan upah minimum, peraturan mengenai diwajibkannya industri melakukan analisis dampak lingkungan, penetapan standar harga terhadap komunitas barang dan jasa dan lain sebagainya.⁸⁶ Dengan kata lain dalam sistem ekonomi pengendalian insitusi politik terhadap aktivitas ekonomi cukup penting dan harus dilakukan

⁸⁴ *Ibid.*, h. 238

⁸⁵ *Ibid.*, h. 245 – 246

⁸⁶ Muslim Mufti, *Ekonomi Politik* (Bandung : Pustaka Setia, 2018). H.

3. Pengentasan Masalah Sosial dan Ekonomi

Persoalan sosial dan ekonomi harus fokus menjadi perhatian negara maupun masyarakat. Salah satu persoalan sosial dan ekonomi tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan selalu didefinisikan keadaan seseorang di bawah terminologi kesederhanaan. Kondisi kemiskinan menjadi persoalan sosial sekaligus juga menjadi persoalan ekonomi. Dua aspek kehidupan ini (sosial – ekonomi) memandang menjadi persoalan rumit dan krusial, mulai dari pengangguran, tidak mampu mengenyam pendidikan berkualitas, tidak mampu membiayai kesehatan, tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Karena itu bidang sosial dan ekonomi begitu concern terhadap kemiskinan. Berbagai kebijakan negara diterapkan dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah Republik Indonesia, masa pemerintahan Jokowi – Yusuf Kalla, telah mempersiapkan lima strategi untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia. Pada Maret 2018 kemiskinan di Indonesia menurun menjadi 9,82 % atau mencakup 25,9 juta penduduk Indonesia. Lima strategi pengentasan kemiskinan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Mulai dari program menjaga stabilitas makro ekonomi, menciptakan stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal. Untuk ekonomi mikro bagi masyarakat sangat miskin dan miskin pemerintah telah memberikan bantuan pangan (ranstra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan tunai bersyarat (Program keluarga harapan) dan bantuan iuran jaminan kesehatan kartu Indonesia sehat. Berikutnya untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan dan keperantaraan.
2. Menekan jumlah kemiskinan. Pemerintah akan memantapkan kelompok menengah ke bawah juga melakukan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan di luar Jawa untuk memperkuat

infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan. Selain itu penguatan perekonomian inspired middle income class, diwujudkan melalui kemudahan izin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian.

3. Melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke dana desa dan transfer daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi.
4. Peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010–2018 penurunan subsidi yang signifikan dari 3,4 % menjadi 0,8 % PDB. Pada periode 2015–2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan kepada masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018 anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi.
5. Melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Selain itu pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan menjaga inflasi terutama dari tekanan sisi suplai melalui pengurangan hambatan arus distribusi antar wilayah dan antar pulau, mengefektifkan TPID serta mendorong penyediaan produksi pangan dan bahan pokok lain. Investor domestik dan wirausaha lokal juga didorong untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Pemerintah mengurangi tekanan impor melalui penerapan kewajiban penyedia lapak online menjual barang lokal dengan

komposisi minimal tertentu serta kemudahan investor sektor industri untuk menyediakan bahan baku yang selama ini diimpor.⁸⁷

Berbagai kebijakan di atas diikuti dengan pendirian lembaga – lembaga yang tujuan pendiriannya sebagai membantu masyarakat miskin. Dalam konteks Islam pengentasan kemiskinan juga menjadi fokus perhatian. Islam sebagai sebuah agama telah meleatitkan jaminan masyarakat miskin melalui ajaran zakat, infak, shadakah dan lainnya yang mengajarkan kepada umat Islam tentang sukur nikmat, indikator keimanan seseorang dan berbagi dimana harta yang dimiliki ada hak orang lain yang harus diperhatikan. Apalagi potensi zakat, infak dan shadakah cukup besar di Indonesia, jika dikelola secara maksimal menjadi pranata penting dan strategis dalam pengemntasan kemiskinan di Indonesia. Atas dasar itu pemerintah telah menggulis UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS (Pusat, Provisni dan Kab/Kota). BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Pasal 5). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (Pasal 6). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi : (a). Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b). Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c). Pengendalian pe ngumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (Pasal 7 ayat 1). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7 ayat 2).BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik

⁸⁷ <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3594321/5-Strategi-Pemerintah-Tekan-Angka-Kemiskinan>, diakses 01/10/2019

Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (Pasal 7 ayat 3).

Dalam pengelolaan zakat yang terlembaga, memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat miskin. Dana zakat dikumpul, didistribusikan hingga didayagunakan, sedikit banyaknya telah membantu masyarakat miskin. Begitu pula kehadiran lembaga zakat sebagai pranata keagamaan cukup membantuk muzakki dalam menyalurkan zakatnya.

G. Manajemen Organisasi Kemasyarakatan dan Kelembagaan Umat.

1. Tujuan dan Fungsi Orgnisasi Kemasyarakatan

Eksistensi organisasi dan kelembagaan umat sangat penting kehadirannya dalam masyarakat maupun bernegara. Organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan adalah mitra masyarakat dan pemerintah. Terlebih lagi organisasi kemasyarakatan tumbuh dan lahir dari masyarakat dan tujuan pendiriannya untuk kepentingan masyarakat. Indonesia termasuk negara yang membolehkan tumbuh dan berkembangnya organisasi, kelompok, komunitas lainnya yang sifatnya terlembaga. Mulai dari organisasi kepemudaan, sosial keagamaan, politik dan lainnya asalkan proses pendirian organisasi, komunitas, kelompok yang terlembaga tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kebolehan mendirikan orgnisasi tersebut terlihat dalam pengaturan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Lebih jelasnya menurut Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasan secara individu maupun kolektif, setiap orang menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan segala bentuknya hadir di negeri ini dengan sejarah perkembangan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Namun kehadiran Ormas tersebut membutuhkan perangkat UU, atas dasar itu UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal telah mengatur mengenai asas, ciri, dan sifat, tujuan, fungsi, ruang lingkup, pendirian, pendaftaran, hak dan kewajiban, organisasi kedudukan, dan kepengurusan, keanggotaan, AD dan pemberdayaan Ormas, diatur dengan jelas melalui UU ini sebagai payung hukum kedudukan Ormas di Indonesia.

Dilihat dari tujuan pendirian Ormas sudah pasti kehadirannya dibutuhkan masyarakat dan negara. Karena menurut UU Ormas bertujuan untuk: Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mengembangkan kesetiakawanan sosial dan gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa atau mewujudkan tujuan negara.⁸⁸ Selanjutnya Ormas berfungsi : Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan atau pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁸⁹ Dari penjelasan tujuan dan fungsi Ormas di atas, menunjukkan kehadiran Ormas sangat membantu masyarakat terlebih lagi dalam pemberdayaan sosial

⁸⁸ UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁸⁹ *Ibid.*

dan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan fungsinya Ormas merupakan agen dalam pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan masyarakat dan lainnya. Namun tuntutan performace sebuah Ormas menjadi sebuah kebutuhan. Ormas harus dapat meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Disinilah dibutuhkan peningkatan manajemen organisasi atau kelembagaan umat dalam rangka menyahuti kebutuhan masyarakat

2. Manajemen Organisasi Kemasyarakatan dan Kelembagaan Umat

Kata manajemen substansinya mengandung arti yang berhubungan: (1). Pengelompokan pekerjaan. Manajemen diartikan suatu kelompok orang yang melaksanakan tugas – tugas atau fungsi manajerial. Ini digunakan untuk menyebut seluruh individu dalam kelompok secara kolektif. (2). Individual. Individu yang melaksanakan fungsi–fungsi manajemen atau sebagian dari keompok secara keseluruhan yang disebut bagian dar manajemen. (3). Disiplin akademik. Manajemen ini dimaksudkan suatu bidang spesialisasi akademik atau bidang studi. (4). Proses. Manajemen juga sebuah proses, karena mencakup pelaksanaan suatu rangkaian tipe – tipe khusus kegiatan atau fungsi.⁹⁰ Selanjutnya George R. Terry juga menegaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya.⁹¹ Begitupula Nickels, McHugh and McHugh, manajemen diartikan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.⁹²

⁹⁰T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta : BPE-Yogyakarta, 1998) Cet. 13, h. 15

⁹¹Ibnu Syamsi, *Pokok – Pokok Organisasi di Manajemen* (Yogyakarta : 1983) h. 32

⁹²Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Kencana, 2005) Edisi I, h. 6

Kemudian Marry Parker Polet, manajemen diartikan : Seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.⁹³

Manajemen merupakan proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian sesuatu tersebut terdapat 3 faktor yang terlibat : *Pertama*, adanya penggunaan sumber daya organisasi berupa : Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi. *Kedua*, adanya proses bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, pengendalian dan pengawasan. *Ketiga*, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.⁹⁴ Ketiga proses disebutkan di atas menjadi kekuatan tersendiri dalam melakukan manajemen, termasuk dalam hal ini adalah manajemen organisasi ataupun lembaga – lembaga keummatan lainnya.

Dalam konteks Ormas dan lembaga keummatan manajemen menjadi kebutuhan penting sangat diperlukan dalam mencapai tujuan. Karena manajemen mempunyai beberapa fungsi saling berkaitan satu dengan lainnya. Richard L. Daft,⁹⁵ menjelaskan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: *Pertama*, Perencanaan (*planing*), yaitu : Penentuan target sebagai pedoman konerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. *Kedua*, pengorganisasian (*organizing*), yaitu: Rangkaian kegiatan melibatkan penetapan tugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan alokasi bermacam sumber daya ke dalam berbagai departemen. *Ketiga*, kepemimpinan (*leading*), yaitu : Penggunaan pengaruh untuk memotivasi bawahan agar mencapai sasaran organisasi. Memimpin berarti menciptakan suatu budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan target kepada karyawan melalui organisasi dan memberikan inspirasi agar karyawan berprestasi sebaik-baiknya. *Keempat*, pengendalian (*controlling*), yaitu:

⁹³*Ibid.*, h. 5. Lihat, Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka, 2012) h.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 6

⁹⁵ Richard L.Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002) h. 8-9

Mengawasi aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan.

Fungsi manajemen yang diuraikan di atas menjadi acuan penting dalam melakukan manajemen organisasi atau lembaga – lembaga keummatan. Organisasi akan berjalan efektif jika melakukan dan menerapkan fungsi di atas, sebagai bentuk manajemen modern untuk menentukan berjalan atau tidaknya sebuah organisasi.

BAB III

MENGENAL

PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara

Sejarah pembentukan Provinsi Sumatera Utara (baca, Sumut) cukup panjang dan berproses terutama terkait dengan regulasi yang mengaturnya, begitu pula kuatnya pengaruh pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum kemerdekaan Provinsi Sumatera Utara oleh pemerintahan Hindia Belanda disebut dengan “*Gouvernement Van Sumatera*” yang meliputi seluruh Sumatera dikepalai oleh seorang Gubernur berkedudukan di Medan. Sumatera Utara terdiri dari daerah – daerah administratif yang dinamakan “Keresidenan”. Provinsi Sumut merupakan gabungan tiga daerah administratif yakni : Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.¹ Setelah kemerdekaan melalui Undang – Undang No 10 tahun 1948, pemerintah pusat menetapkan provinsi pada tanggal 15 April 1948 ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan. Maka setiap tanggal 15 April 1948 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya di awal tahun 1949, melalui Keputusan Pemerintah Darurat RI No 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Kemudian melalui Ketetapan Pemerintah Darurat RI pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur.

¹ Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018 (Sumatera Utara : Published By @BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018) h. 25

Kemudian ini tidak berselang lama, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 05 tahun 1950, Ketetapan tersebut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Sumatera Utara menjadi provinsi tersendiri, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 05 tahun 1950 dan pembagian wilayah Sumatera Utara di cabut dan kembali dibentuk provinsi Sumatera Utara.² Aatas usul Gubernur kepada Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 16 Februari 1973 No 4585/25, DPRD Tingkat 1 Sumatera Utara dengan keputusannya tanggal 13 Agustus 1973 No 19/K/1973 telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Sumatera Utara Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara adalah tanggal 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya UU No 10 tahun 1948 tersebut.³ Maka setiap tanggal tersebut diperingati sebagai hari jadinya Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan sejarah pula telah tercatat nama – nama tokoh yang pernah duduk sebagai Gubernur di Sumatera Utara. Mulai dari : Dr. Ferdinand L.Tobing, Gubernur Militer Tapanuli dan Sumatera Timur (Agustus 1945 – Desember 1949), Sarimin Reksodiharjo, Pelaksana Gubernur KDH Sumatera Utara (14 Agustus 1950 – 25 Januari 1951), Abdul Hakim, Gubernur Provinsi Sumatera Utara (25 Januari 1951 – 23 Oktober 1953), Mr. Mohd Amin, Gubernur Provinsi Sumatera Utara (23 Oktober 1953 – 12 Maret 1946), ST. Komala Pontas, Gubernur Sumatera Utara (18 Maret 1956 – 1 April 1960), Raja Junjungan Lubis, Gubernur Provinsi Sumatera Utara (1 April 1960 – 5 April 1963), Eny Karim, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (5 April 1963 – 15 Juli 1963), Ulung Sitepu, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (15 Juli 1963 – 16 Nopember 1965), PR. Telaumbanua, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (16 Nopember 1965 – 31 Maret 1967),

² Muhammad TWH, *Gubernur Pertama dan DPR Sumatera Utara Pertama* (Medan : Yayasan PFPK) RI, 2008) h. 219 – 221. Bandingkan, *Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Sejarah Perkembangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumaera Utara* (Diklat Provsu, t.tp, 1993) h. 5 – 6.

³ Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018, h. 25 - 26

Marah Halim, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (31 Maret 1967 – 12 Juni 1978), EWP Tambunan, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (12 Juni 1978 – 13 Juni 1983), Kaharudin Nasution, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (10 Juni 1983 – 13 Juni 1988), Raja Inal Siregar, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (13 Juni 1988 – 25 Juni 1998), Tengku Rizal Nurdin, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (15 Juni 1998 – 5 September 2005), Drs. Rudolf M.Pardede, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (10 Maret 2005 -16 Juni 2008), H. Syamsul Arifin, SE, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (16 Juni 2008 – 21 Maret 2011), Gatot Pujo Nugroho, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (21 Maret 2011 – 14 Maret 2013), T. Erry Nuradi, Gubernur KDH Tingkat 1 Prov Sumatera Utara (25 Mei 2016 - 16 Juni 2018).

Dari sejarah singkat di atas terlihat bahwa proses menjadikan dan mengantarkan Sumut menjadi provinsi terlihat cukup panjang. Meskipun demikian masyarakat Sumut cukup berbangga, karena kemudian provinsi Sumut termasuk salah satu empat terbesar di Indonesia. Karena itu Sumut digambarkan dengan berlogokan kepala tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggamkan rantai berserta perisainya, merupakan lambang kebulatan tekad perjuangan rakyat Sumatera Utara melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme dan komunisme. Batang bersudut lima, perisai dan rantai melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan “Sumatera Utara” melambangkan daerah yang indah permai. Masyhur dengan kekayaan alam berlimpah – limpah. Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba – laba dan empat lima butir pada menggambarkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan RI. Tongkat di bawah kepala tangan melambangkan watak, kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pecinta dan pembela keadilan. Bukit barisan yang berpuncak lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan kegotong royongan dinamis. Motto daerah

adalah tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Motto ini sekaligus gambaran dari wajah Sumatera Utara.

B. Geografis dan Iklim

Secara geografis Sumut terletak pada 1° – 4° Lintang Utara dan 98° – 100° Bujur Timur, yakni berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Dengan Luas wilayah sekitar 72.981,23 Km² sebagian besar berada di daerah Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau Batu serta beberapa pulau kecil baik di bagian Barat maupun bagian Timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten Kota, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat 6.262.00 Km² atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 Km² atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030.47 Km² atau sekitar 8.26 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi 31.00 Km² atau sekitar 0.04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.⁴

Sebagai provinsi terluas menempatkan Sumatera Utara menjadi provinsi kesembilan terluas di Indonesia, yang secara administratif dibagi dalam 33 Kabupaten dan Kota. Sebanyak 23 Kabupaten dan 7 Kota dengan jumlah Kecamatan 235 kecamatan, 400 kelurahan dan 5.327 desa.⁵ Dengan daerah terluas ini Sumatera Utara bersentuhan dengan daerah perbatasan yakni : Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Provinsi Aceh. Sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Riau. Sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia di Selat Malaka dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.⁶ Selanjutnya

⁴Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018, h. 6 - 7

⁵Buku Profile ; *The Amazing North Sumatera* (Medan, t.tp, 2008) h. 6. Lihat, Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara* (Medan : Perdana Publusing, 2010) h. 25

⁶Sabaruddin Ahmad (Ed), *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara* (Medan: Diklat Provsu, 1995) h. 13. Lihat, Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara*, h. 25

berdasarkan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu: Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur. *Pertama*, kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli. *Kedua*, kawasan Dataran Tinggi meliputi : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir dan Kota Siantar. *Ketiga*, kawasan Pantai Timur meliputi : Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagei, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai.⁷

Sumatera Utara beriklim tropis, hal ini disebabkan kedekatannya berada dekat garis Khatulistiwa. Dilihat ketinggian permukaan daratan provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar hanya beberapa meter di atas permukaan laut beriklim cukup panas, sebagian daerahnya berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian. Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.⁸ Sumatera Utara juga termasuk ke dalam daerah yang sering gempa bumi. Sepanjang 2017 tercatat sebanyak 497 kali kejadian gempa bumi sedangkan tahun 2016 sebanyak 548 kali.⁹

Sebagai daerah terindah Sumut di dukung pula dengan ibu Kota Provinsi yakni kota Medan. Luas kota Medan 265,10 km atau

⁷Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018, h. 5 – 6

⁸*Ibid.*, h. 7 - 8

⁹*Ibid.*

3,6 % dari luas wilayah provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 2,1 juta jiwa. Kondisi demikian menjadikan Medan kota ke 3 terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Posisi kota Medan sangat strategis selain berada pada jalur pelayaran dan perdagangan internasional cukup padat, kota ini juga bertetangga dengan dengan tiga negara terkemuka di Asia Tenggara yakni Malaysia, Singapura dan Thailand. Sekaligus menjadi kota dengan tingkat perekonomian termaju di Pulau Sumatera. Posisi yang strategis tersebut membuat kota Medan menjadi pintu gerbang utama bagi jalur internasional di bagian Barat Indonesia.¹⁰ Dari uraian di atas secara geografis Sumut merupakan wilayah strategis semua sektor yang ada mendukung dan menjadikan Sumut sebagai Provinsi yang terindah dan menarik.

C. Pemerintahan dan Wilayah Administratif

Menurut Undang – Undang (UU) Darurat No 7 tahun 1956, UU Darurat No 8 tahun 1956, UU Darurat No 9 tahun 1956, Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 4 tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Kemudian berbagai Undang undang diterbitkan sebagai penambahan jumlah Kab/Kota di Sumut yakni : (1). Undang - undang No 12 tahun 1998, tentang Kabupaten pembentukan Mandailing Natal dan Kabupaten Toba Samosir. (2). Undang - undang No 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Sidempuan. (3). Undang – undang No 9 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat. (4). Undang undang No 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagei dan pada tahun 2007 dibentuk Kabupaten Batu Bara melalui UU No 5 tahun 2007 (5). Tanggal 10 Agustus 2007 disahkan UU No 37 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. (6). Tahun 2008 kembali diterbitkan UU No 22 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (7).

¹⁰ Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara*, h. 26. Bandingkan, Buku Profile ; *The Amazing North Sumatera*, h.6

Undang - undang No 23 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara. (8). Undang - undang No 5 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara (9). Undang – undang No 46 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat (10). Undang–undang No 47 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunung Sitoli, Dengan demikian wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota.¹¹ Kemudian tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara bertambah kepada 25 Kabupaten dan 8 Kota. Kemudian Kabupaten/Kota terdiri atas 449 Kecamatan. Pada administrasi yang paling bawah, kecamatan terdiri atas kelurahan untuk daerah perkotaan (urban) dan desa untuk daerah pedesaan (ural).¹²

Selanjutnya salah satu unsur penting dalam pemerintahan adalah DPRD. Pada tahun 2017 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara hasil Pemilu 2014 berjumlah 100 orang yang terdiri dari 14 orang Fraksi Partai Demograt, PDIP 16 orang, Partai Golkar 17 orang, PPP 4 orang, PKS 9 orang, PAN 6 orang, Hanura 10 orang, PKPI 3 orang, Gerindra 13 orang, Nasdem 5 orang dan PKB 3 orang. Anggota DPRD Sumatera Utara terdiri dari 85 orang, laki – laki dan 15 orang perempuan. Sedangkan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berjumlah 1.197 orang dengan rincian 1.055 orang laki – laki dan 142 orang perempuan.¹³

Selain anggota DPRD unsur penunjang dalam pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia. Jumlah PNS daerah (otonomi) di Sumatera Utara pada Desember 2017 sebanyak 197.053 orang. Terdiri dari 76.147 PNS laki – laki (38,64 %) PNS laki-laki dan sebanyak 120.906 PNS perempuan (61,36 %). Menurut jenjang pendidikan sebagian besar berpendidikan tamatan SMA ke atas sebanyak 26,86 persen adalah tamatan SMA dan tamatan DIV/S1 ke atas sebesar 50, 65 persen. Sedangkan tamatan

¹¹ *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018* , h. 27.

¹² *Ibid.*, h. 28

¹³ *Ibid.*, h. 29

D1/II/III hanya sekitar 20,60 persen, dan tamatan SMP ke bawah sekitar 1. 80 persen.¹⁴

D. Kependudukan dan Agama.

Kependudukan dan agama bagian yang cukup melekat di Provinsi Sumatera Utara. Secara demografi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara diperkirakan mencapai 13.042.317 jiwa. Menurut jenis kelamin, ratio jenis kelamin kabupaten/kota laki – laki berjumlah 6.489.000 orang. Sedangkan perempuan berjumlah 6.553317 orang. Dilihat dari jumlah rumah tangga menurut kabupaten kota sekitar 2.980434. Dari angka – angka tersebut penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di pedesaan (rural) dengan jumlah 7.110.347 jiwa. Sedangkan yang tinggal di perkotaan (urban) sekitar 5.931.970 jiwa.¹⁵

Di Sumut daerah – daerah k terbilang padat terletak pada daerah – daerah Pantai Timur yang jumlah penduduk terndah pada daerah dataran tinggi. Kondisi ini disebabkan terjadinya perpindahan sebagian besar penduduk melihat besarnya potensi perekenomian dalam hal ini ditemukan pada Pantai Tinur dan Barat. Arus perpindahan yang cukup besar menyebabkan kepadatan penduduk tertumpuk yang tidak merata.

Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan sebagai masyarakat agamis. Semua etnis menganut agama dan ajarannya masing – masing berjalan dengan saling menghargai kerukunan agama yang dipeluk dan dianut masing – masing. Agama Islam menjadi agama mayoritas bagi daerah ini. Kemudian diikuti oleh agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Semua agama ini tersebar di Kabupaten sebagai agama yang dianut di tengah masyarakat yang pluralistik. Jumlah pemeluk agama Islam diperkirakan sekitar 65, 45 %, agama Kristen Protestan 26, 62 %, Kristen Katholik 4,78 %, Budha 2, 82 %, Hindu 0, 19 % dan lainnya 0, 14 %.

¹⁴*Ibid.*, h. 30

¹⁵Data BPS Sumatera Utara, 2009.

Masyarakat etnis Melayu, Minangkabau, Mandailing, Angkola, Jawa, Simalungun dan Aceh umumnya pemeluk beragama Islam. Sedangkan etnis Batak, Karo, Dairi dan Nias umumnya beragama Kristen protestan dan Katholik. Sedangkan etnis China beragama Budha dan Konghucu. Begitupula etnis Hindia beragama Hindu. Semua agama saling hidup membaaur dan menjaga kerukunan dengan konsep yang digagas oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara yakni Akidah Terjamin dan Kerukunan Terjalin.

E. Etnis, Adat istiadat dan Budaya.

Sumut merupakan daerah disebut dengan berbilang kaum. Kekayaan etnis menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah ini. Semua etnis-etnis tumbuh dan berkembang, sehingga menjadikan Sumut sebagai daerah berbilang etnis dan menjadi manjemuk. Etnis – etnis tersebut mulai dari etnis Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Batak Mandailing/ Angkola, Batak Pesisir, Simalungun, Pakpak, Nias dan lainnya.

Ada suku Melayu merupakan etnis yang dinisbatkan pada kelompok-kelompok yang karakteristik adalah penuturan bahasa Melayu. Suku Melayu sebagai penduduk asli yang mendiami sepanjang Timur dari Langkat sampai Labuhan Batu, dari daerah Rantau sampai ke Bukit Barisan. Di Indonesia suku ini bermukim di sebagian besar Pesisir Sumatera Timur Sumatera, Kalimantan, disekeliling Padang, sebagian besar Malaysia, Thailand Selatan serta pulau – pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata. Jumlah suku Melayu di Indonesia sekitar 15 % dari seluruh populasi yang menempati di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat. Untuk daerah Sumut suku Melayu menempati di daerah Pesisir Timur terutama di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagei, Langkat, Asahan, Tanjung Balai.

Adapula suku Batak, nama Batak merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa bermukim dan berasal dari Tapanuli. Berbagai versi menyatakan asal – usul bangsa Batak. Ada yang mengatakan suku Batak berasal dari Thailand

keturunan dari Bangsa Proto Malayan bermukim di Burma dan Siam. Proto Malayan pernah dijajah oleh bangsa Mongoloid kemudian berpencar berbagai wilayah dan negara. Suku Batak mendarat di Pantai Barat Pulau Sumatera. Terdapat juga versi mengatakan suku Batak berasal dari India melalui Barus hingga bermukim di Pinggir Danau Toba pada abad ke 6. Suku-suku dikategorikan Batak adalah Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola dan Mandailing.

Karo adalah suku mendiami Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu dan sebagian Dairi. Suku ini menjadi salah satu suku terbesar di Sumut kemudian mewujudkan diri menjadi Kabupaten Karo yang mayoritas penduduk adalah etnis Karo dengan bahasa daerah yang disebut dengan bahasa Karo atau cakap Karo. Kemudian ditemukan suku Batak Toba, menjadi bagian dari suku bangsa Batak. Suku ini mendiami Kabupaten Toba Samosir, Balige, Laguboti, Parsoburan dan sekitarnya. Suku Batak Mandailing merupakan nama suku yang mendiami Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan. Ada yang berpendapat bahwa Mandailing merupakan bagian dari suku Batak. Namun pendapat lain mengatakan suku Mandailing adalah suku berdiri sendiri, memiliki sistem sosial, asal usul, budaya dan kepercayaan sendiri. Selanjutnya terdapat suku Batak Pesisir menjadi etnis tersendiri di Sumut. Disebut juga suku Pesisir. Suku ini lebih banyak mendiami sepanjang jalan pantai sebelah Barat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sebenarnya asal usul suku ini dari suku Batak Toba, Mandailing dan Angkola yang telah menetap di Sibolga dan Tapanuli Tengah sejak beratus tahun lamanya. Setelah terjadi pembauran dengan kedatangan suku Melayu dan Minangkabau dari Pesisir Sumatera, dari pembauran tersebut melahirkan suku pesisir. Semula mereka berbahasa Batak setelah terjadi pembauran dan perkawinan bahasa mereka berubah menjadi bahasa Pesisir. Pengaruh budaya Melayu dan Minangkabau cukup kental merubah budaya, adat, dan bahasa sebelumnya.

Ditemukan juga suku Simalungun atau disebut Batak Simalungun merupakan suku asli yang tumbuh dan berkembang di Sumut. Ada

pendapat mengatakan luluhur suku ini berasal dari Hindia Selatan. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik, Saragih, Sinaga dan Purba. Tiga marga terakhir merupakan marga pendatang. Kemudian marga – marga ini menjadi empat marga terbesar di Simalungun. Kekayaan Sumut juga memiliki suku Pakpak menjadi salah satu suku yang tumbuh dan berkembang di Sumut kemudian mendiami di Kabupaten/Kota di Sumut seperti di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpat Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk provinsi Aceh mendiami di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Suku Pakpak terbagi lima sub suku disebut dengan Pakpak Silima, yang terdiri dari : (1). Pakphak Klasen (Kabupaten Humbang Hasundutan) (2). Pakphak Simsim (Kabupaten Pakpak Barat). (3). Pakphak Boang (Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam Aceh). (4). Pakpak Pegangan (Kabupaten Dairi) dan (5). Pakphak Keppas (Kabupaten Dairi). Begitu pula Sumut memiliki suku Nias merupakan salah satu suku yang tumbuh dan berkembang di Sumut. Suku ini mendiami pulau Nias. Suku ini menamakan dirinya “Ono Niha” Ono artinya anak/ keturunan. Niha artinya manusia. Ono Niha artinya anak manusia. Sedangkan “Tano Niha” diartikan sebagai pulau Nias.

Di tengah berbilang suku diperkaya lagi dengan adat istiadat dan budaya menjadi identitas tersendiri bagi etnis – etnis yang ada di daerah Sumatera Utara. Adat istiadat dan budaya begitu beragam dan kaya yang membedakan etnis yang satu dengan lainnya. Kekayaan adat istiadat dan budaya ini menjadikan Sumut sebagai daerah yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing disamping kondisi alam cukup indah dilihat sebagai obyek wisata. Adat istiadat dan budaya yang menarik untuk dilihat adalah etnis Melayu. Etnis ini memiliki adat dan istiadat Melayu yang tumbuh dan berkembang dalam suku Melayu tersebut. Meskipun dalam etnis Melayu berkembang Melayu Deli, Melayu Langkat dan lainnya. Namun adat dan budaya yang berkembang turut memperkaya Melayu itu sendiri. Dalam berbagai aktifitas kehidupan memunculkan beragam adat dan budaya mulai dari proses pernikahan, mencari

rezeki dalam pekerjaan dan lainnya dilingkup oleh adat dan budaya sebagai nilai – nilai yang hidup di tengah masyarakat Melayu. Salah satu contoh adalah tampilan busana Melayu dibuat dengan tenunan dengan ciri khas tertentu dan melahirkan bentuk – bentuk busana seperti baju kurung, cekak musang, baju kurung teluk belanga dan lain sebagainya.¹⁶ Semua bentuk busana tersebut sesungguhnya mempunyai nilai makna bagi suku Melayu yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Etnis Batak Toba memiliki kekayaan adat dan budaya tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan suku ini. Kondisi alam bergunung – gunung dan berangin kuat telah membentuk suku ini terpola oleh kondisi alam. Orang Batak ketika berbicara biasanya menggunakan suara keras. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam mengharuskan suara keras ini dapat dimaknakan tanda keterbukaan artinya cara mereka berbicara sebagai ungkapan perasaan dan sikapnya. Seiring dengan itu adat dan budaya yang berkembang menjadikan orang Batak memiliki identitas tersendiri. Budaya dan adat yang kaya merupakan bagian dari tampilan kehidupan orang Batak. Contoh menarik untuk dilihat adalah pakaian adat perkawinan yang mereka gunakan seperti : Ragi idup, napinussan, sortali, horung – horung, ragi hotang, piso halasan, dan hoshos simata. Untuk perempuan menggunakan pakaian adat perkawanan yaitu : Sortali, bintang moratur, manggiring, baju kurung dan mandan. Artinya pakaian adat perkawinan ini menjadi identitas tersendiri bagi suku ini. Segala adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang menjadi nilai hidup bagi suku Batak.

Etnis Batak Pesisir yang mendiami Kabupaten Sibolga dan Tapanuli memiliki adat isiadat dan budaya tersendiri. Sebagai masyarakat yang tinggal di pesisir dengan profesi mayoritas nelayan membentuk pengaruh budaya hidup dengan menekankan etos kerja dan semangat kerja keras. Begitu pula adat yang terbentuk menjadi nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat Batak Pesisir dan memberikan pengaruh kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu budaya

¹⁶ Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara*, h. 35

dan adat berkembang pada masyarakat ini adalah aspek perkawinan. Kekuatan adat cukup kental membaluti perkawinan. Terutama terlihat dari cara berpakaian laki – laki yang menggunakan berbagai macam bentuk pakaian mulai dari : Ikek, deta, layang, bua gombak, baju Turki, oto, nago – nago, kabek, pinggang pata sembilan, sewo, baju puith lengan panjang, kain songkit, serawa guntingan ace. Sedangkan pakaian adat perempuan menampilkan pakaian yakni: Sanggu gadang, garak tabak, anting – anting, kendang – kendang suji malako, sari bulan, kabek pinggang pata sembilan, galang nago – nago, galang keroncong dan picak, galang kaki, galang keroncong dan picak, dan galang kaki.¹⁷

Batak Angkola dan Mandailing juga mempunyai budaya dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Suku Angkola mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan Suku Mandailing banyak mendiami di Kabupaten Mandailing Natal. Aspek adat dan budaya menjadi identitas tersendiri bagi Batak Angkola dan Mandailing. Adat istiadat itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ini. Salah satu budaya dari Batak Angkola dan Mandailing adalah “Gordang Sembilan” (Gendang sembilan) merupakan alat musik yang cukup sakral yang digunakan untuk upacara adat dan perayaan hari raya. Selain itu ciri khas pakaian adat perkawinan khususnya pria adalah Tukku/bappu, baju godang, puttu, keris, songket, bobat. Sedangkan pakaian wanita adalah : Bulang, gonjong, pending, puttu, baju kurung, sarung songket, selendang songket dan bobat.¹⁸ Semua bentuk pakaian ini merupakan tampilan adat dan budaya bagi masyarakat Batak Angkola dan Mandailing.

Berikutnya adalah etnis Batak Simalungun. Adat istiadat dan budaya etnis tidak kalah pentingnya dengan etnis lainnya. Empat marga asli yakni : Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba menampilkan adat istiadat dan kebudayaan masing tumbuh dan berkembang dalam masyarakat simalungun seiring dengan daerah pegunungan

¹⁷*Ibid.*, h. 36. Bandingkan dengan *The Amazing North Sumatera*, h. 105

¹⁸ *The Amazing North Sumatera*, h. 107

membentuk kehidupan masyarakat dalam beradat istiadat dan berbudaya. Salah satu adat istiadat dan budaya adalah aspek perkawinan. Adat yang menonjol dalam berpakaian menggunakan yang disebut “Hiou” dengan beragam ornamen. Dalam adat perkawinan pakaian pria menggunakan : Gotong, rantai gotong, dormani, suri – suri, raju tutup, rasi santik dan celana. Sedangkan pakaian wanita menampilkan: Bulang, cucuk sanggul, suri – suri, baju dan rasi sopat.¹⁹

Adat istiadat dan budaya tumbuh dan berkembang pada suku etnis Batak Pakphak yang mendiami Dairi, Pakphak Barat, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah. Kapupaten Dairi menjadi tempat terbanyak didiami oleh masyarakat Pakphak. Adat istiadat dan budaya menjadi nilai – nilai yang tumbuh dan dikembang pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adat dan budaya pada perkawinan. Pakaian pengantin laki – laki suku Pakpak selalu menggunakan : Bulag – bulag (tutup kepala) baju, oles sibe – sibe (selendang) pameenting, marikan (kain), golok maremparier dan uncang. Sedangkan pakaian pengantin perempuan selalu menampilkan : Saong (tutup kepala), sabeng (anting – anting) baju sumbing (kebaya pendek), cimata (kalung), ules sabe – sabe (selendang) dan marikan.²⁰

Suku Batak Karo mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang tumbuh dan menjadi anutan masyarakat. Adat dan budaya tersebut terlihat cara mereka berpakaian adat dengan warna – warna merah dan penuh perhiasan emas. Seperti pakaian perkawinan dengan busana laki – laki seperti : Sartali, uis nipes (tutup kepala) lange – lange (tutup dada), sertali layang – layang, kadang – kadangan, gelang sarung, gonje dan baju jas. Sedangkan pakaian wanita yaitu: Serali layang – layang, abit datas, abit teruh, padung curu – curu, kebaya panjang (songket) batubara dan selendang tile kuning payet.²¹

Etnis Nias juga memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang

¹⁹ *Ibid.*, h. 109. Lihat, Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara*, h. 36

²⁰ *The Amazing North Sumatera*, h. 111.

²¹ *Ibid.*, h. 113.

khas tumbuh dan berkembang di Nias. Adat dan kebudayaan tersebut masih terpelihara dengan baik seperti melompat batu, tari perang, fanari maena, tari myo dan lainnya. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, ini terlihat dari peninggalan sejarah yang ditemukan batu besar yang berukiran yang banyak ditemukan di Nias. Kemudian adat istiadat dan budaya dapat juga dilihat dari pakaian-pakaian tradisional yang digunakan seperti pakaian pengantin pria menampilkan busana : Bala hogo (mahkota), saru dalinga (anting-anting), baru ni'owalu (baju) bobo pagu (ikat pinggang), sarewa (celana) dan lainnya. Pada pakian wanita ditampilkan busana: Tata kondre (mahkota sanggul), bala horo (mahkota kepala), saru dalinga (anting – anting), nifato – fata (kalung), baru ni o walu (baju), lebe (selendang), tola zaga (gelang tangan), ui (sarung kain panjang).²²

F. Sumber Daya Alam

Sumut dikenal kaya dengan sumber daya alam menjadi aset terpenting bagi kehidupan perekonomian masyarakat dan daerah ini. Pengendalian terhadap sumber daya alam sangat penting sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan asli daerah. beberapa hasil sumber daya alam adalah hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan wisata alam. Sektor pertanian terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagei, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan lainnya. Hasil dari pertanian tersebut berupa : Tanaman padi, sayur – sayuran, buah – buahan, produk palawija (jagung, kedelai, ubi, kacang tanah dan lainnya).²³

Sektor pertanian menjadi hasil sumber daya alam yang menjanjikan dikelola oleh perusahaan swasta dan negara. BUMN yang mengelola adalah PTPN II, PTPN III dan PTPN IV yang tersebar dari Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Komuditas perkebunan terdiri dari:

²² *Ibid.*, h. 115

²³ *Ibid.*, h. 48.

Sawit, karet, kopi, teh, kakao dan kelapa. Selain menghasilkan CPO, kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak makan, margarin, ice cream, sabun mandi, shampo dan industri tekstil dan kulit.²⁴

Selain sektor pertanian dan perkebunan ditemukan pula sumber daya alam seperti emas. Kemudian didirikan pertambangan emas di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. PT. Aqincourt Resources merupakan perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi sebanyak 6.3 ton pertahun selama 10 tahun dimulai tahun 2010.²⁵ Kemudian sektor lain adalah keindahan panorama alam Sumut yang bernilai ekonomis dijadikan sebagai obyek wisata baik lokal maupun mancanegara yang menjadi pendapatan asli daerah ini. Seperti keindahan Pantai Cermin (Sergei), Danau Toba (Parapat), Bukit Siatas Barita (Tapanuli Utara), Pulau Poncan dan Pulau Marsula (Tapien Nauli Sibolga), Hilpark (Sibolangit), Bukit Lawang (Langkat) dan daerah-daerah lainnya yang tidak kalah menariknya perlu dikembangkan menjadi obyek wisata.²⁶ Semua kekayaan yang ada menjadi milik masyarakat Sumut untuk dieksplorasi secara bersama, kemudian menjadi aset terpenting dalam memajukan masyarakat dan daerah ini.

²⁴ *Ibid.*, h. 53. Lihat, Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara*, h. 38

²⁵ *The Amazing North Sumatera*, h. 59.

²⁶ *Ibid.*, h. 60 - 69

BAB IV

MAPPING SOSIAL DAN EKONOMI UMAT ISLAM PERSPEKTIF ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI SUMATERA UTARA

A. Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama

Salah satu organisasi terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU). Sesuai namanya “Jamiiyah Nahdlatul Ulama” diartikan sebagai organisasi Kebangkitan Ulama didirikan tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di Kampung Kertopaten Surabaya bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Kemudian NU mendapat pengakuan sebagai badan hukum dari *Gouverneur Generaal van Nederlandsch* India pada tanggal 6 Februari 1930, No 1x. Berdasarkan Anggaran Dasar Pertama NU, pada pasal 4 menyebutkan bahwa organisasi ini mempunyai dua jenis keanggotaan. Pertama terdiri dari kaum ulama dan kedua dari muslim biasa yang tidak dikelompokkan sebagai ulama.¹ Kehadiran NU sesungguhnya embrio dari pendirian beberapa organisasi yang muncul sebelumnya seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) tahun 1916, Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Saudagar) tahun 1918, kelompok diskusi disebut Taswirul Afkar atau kawah candra dimuka pemikiran didirikan oleh Kiay Wahab Chasbullah. Kehadiran

¹Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta : Universitas Yarsi, 1999) h. 132.

NU merupakan lanjutan dari organisasi – organisasi yang berdiri sebelumnya. NU berdiri atas inisiatif KH Hasim Asy'ari,² dan KH Wahab Hasbullah serta sejumlah Kiyai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Madura berkumpul di rumah Kiyai Wahab di Surabaya,³ guna dalam proses pembentukan NU tersebut.

Sejarah telah mencatat berdirinya NU tidak terlepas dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlu Sunnah Wal - Jamaah (Aswaja), ajaran ini bersumber dari nash (Alquran – sunnah). Disamping itu

²Hadrastus Syekh Kiai Haji Hasym Asy'ari lahir dengan nama Mohammad Hasjim Asya'ri pada tanggal 14 Februari 1971 di Kabupaten Jombang. Hasyim Asya'ari adalah putra ketiga dari sepuluh bersaudara dengan ayah yang bernama Kiyai Asy'ari, pengaruh pesantren Keras di Jombang Sebelah Selatan. Ia memiliki garis keturunan dengan Sultan Pajang (Jaka Tingkis/Adipati Adiwijaya) dan masih terkait dengan Raja Majapahit, Raja Briwijaya V. KH Hasyim Asy'ari mempunyai sanad keilmuan yang panjang. Tetapi dasar-dasar pelajaran agama Islam ia peroleh dari kakeknya Kiai Usman yang juga seorang pimpinan Pesantren Nggedang di Jombang. Sewaktu berumur usia 15 tahun, Hasyim Asy'ari muda berkelana menimba ilmu dari berbagai tokoh dan pesantren. Diantaranya Pesantren Siwalan di Sidoarjo, Pesaantren Wonokoyo di Probolinggo, Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren Tringgilis di Semarang dan pesantren Kademangan di bawah asuhan Syaikhohana Kholil (Bengkalan) bersama KH Ahmad Dahlan Muda yang kemudian dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Beberapa tahun kemudian setelah selesai menyerap pendidikan dari Syeik Khalil, ia bersama tiga sahabatnya berguru di suruh pulang dan melanjutkan perjalanan masing-masing dengan dibekali barang masing-masing yakni : KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan diberi kitab untuk dingajikan ke Kiai Soleh Darat. Sementara dua teman yang lain yakni Mbah Zahid (kakek dari Emha Ainun Nadjib) diberi cincin dan KH Romli diberi pisang emas. Dari bimbingan Syaikh Kholil, dilanjutkan berguru dengan kepada Kiyai Sholeh Darat. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Kota Mekkah dengan mengaji tentang hadis Shahih Bukhari di bawah bimbingan Syaikh Mahfudz dari Tremas (Pacitan). Sejak itulah KH Hasyim Asy'ari mulai mencintai hadis, mendalami ilmu tasawuf serta tarekat qadriyah dan naqsabandiyah. KH Hasyim Asy'ari juga belajar dengan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang ahli bidang Falak, ilmu Hisab dan fikih mazhab Syafii. Setelah kembali di tanah air KH Hasyim Asy'ari mendirikan Peesantren Tebu Ireng dengan bantuan Mbah Zahid pada tahun 1989. KH Hasyim Asy'ari pun mendiirikan NU pada tahun 1926. Lihat, [https://www.nu.or.id/post/read, Kebesaran Jiwa dan Sikap Toleran KH Hasyim Asy'ari – NU Online](https://www.nu.or.id/post/read/Kebesaran%20Jiwa%20dan%20Sikap%20Toleran%20KH%20Hasyim%20Asy%27ari%20-%20NU%20Online), diakses, 04/09/2012

³Lahirnya NU merupakan embrio dari organisasi kecil yang didirikan oleh Kiyai seperti pergerakan

pula kelahiran NU juga tidak terlepas secara politik dalam dan luar negeri berupa munculnya kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan dalam negeri dan dunia Islam pada umumnya. Karena itu terdapat tiga substansi tujuan kelahiran NU yakni :

1. Bidang hukum memegang teguh salah satu dari empat mazhab fikih yang terkenal (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Untuk mencapai tujuan tersebut, NU melakukan usaha – usaha berupa : Mengadakan perhubungan diantara ulama – ulama yang bermazhab tersebut. Memeriksa kitab – kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari kitab – kitab Ahlu Sunnah wal-Jamaah atau kitab-kitab ahli bid’ah. Menyiarkan agama Islam berasaskan pada mazhab dengan jalan apa saja yang baik. Berikhtiyar memperbanyak madrasah – madrasah berasaskan agama Islam. Memperhatikan hal – hal yang berhubungan dengan mesjid – mesjid, surau – surau dan pondok – pondok, begitupula dengan hal ikhwalnya anak yatim dan para fakir miskin. Mendirikan badan – badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Bidang Akidah (tauhid) menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asyari dan Imam Abu Mansur al- Maturidi. Kedua pemikiran akidah dua Imam ini dipandang sejalan dan sesuai dengan konsep pikiran teologi NU.
3. Bidang tasawuf, menganut dasar ajaran Abu Qasim al-Junaidi. Proses konsolidasi paham sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran sunni dalam bidang teologi bersikap efektif yaitu memilih salah satu pendapat yang benar.

Berdasarkan substansi tujuan berdiri NU di atas, NU telah tumbuh dan berkembang di negeri ini, bahkan meluas ke mancanegara. Peranan NU tidak diragukan lagi. Dalam catatan sejarah NU yang awalnya lahir sebagai organisasi sosial, dakwah, dan pendidikan mengalami berbagai tantangan yang membuat organisasi ini kemudian berubah

menjadi partai politik. Namun NU kemudian kembali ke hittahnya yang memang lahir sebagai organisasi keagamaan meski anggota di dalamnya dibolehkan berpolitik praktis. NU terus berperan dari masa ke masa. Setiap pergerakan yang dilakukan NU selalu mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam pergerakannya NU dilandasi oleh nilai-nilai ke Islaman juga berlandaskan nilai-nilai ke Indonesiaan dan semangat nasionalisme yang tinggi. NU terus meluas berbagai provinsi di Indonesia dan tercatat jumlah warga Nahdiiyin merupakan warga terbesar dari ormas-ormas yang ada di Indonesia.

2. Sejarah Berdirinya NU di Sumatera Utara

Berdirinya NU di provinsi Sumatera Utara (Sumut) merupakan bagian dari perluasan Pengurus Besar NU. Kehadiran PW NU Sumut berawal dari kesepakatan pada tabligh akbar al - Madrasah Mardiyah Islamiyah Penyabungan tahun 1946. Disepakatilah pembentukan NU dengan menugaskan Syekh Mustafa Husein yang kemudian terpilih sebaga Rais Purba Baru. Tujuan pembentukan NU adalah untuk menyebarkan paham Aswaja, membendung gerakan puritan dan menyatukan kekuatan umat Islam melawan penjajah Belanda yang kembali datang ke Indonesia. Melalui persetujuan Syekh Mustafa Husein diadakanlah pertemuan akbar di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kampung Bukit Padang Sidempuan tanggal 7 – 9 Februari 1947 yakni dengan berkumpulnya ratusan ulama dan pemimpin Islam bermazhab Aswaja dari berbagai daerah di Tapanuli mulai daroi Mandailing, Padang Lawas, Angkola Spirok, Natal, Sibolga. Di awal pembentukan NU di Padang Sidempuan belum mempunyai Anggaran Dasar, sehingga dalam penyusunan pengurusnya hanya menurut pendapat anggota/peserta muswarah saja. Beberapa bulan kemudian barulah diadakan hubungan dengan PB NU di Pulau Jawa dengan mendapatkan Anggaran Dasar NU.

Ada yang menarik dari sejarah berdirinya NU di Sumut, dimana di Sumut tidak saja berdiri NU, tetapi sebelumnya telah berdiri Al-Washliyah dan al-Ittihadiyatul Islamiyah. Al-Washliyah berpusat di

Medan sedangkan al-Ittihadiyah Islamiyah berpusat di Purba Baru. Ittihadiyah Islamiyah kemudian meleburkan diri kepada NU pada tanggal 19 Februari 1947. Begitu pula Cabang Al – Washliyah di Kab Tapanuli tengah yang diketuai H. Bahruddin Thalib Lubis membubarkan cabang Al – Washliyah dan melebur menjadi al-Jamiyah Nahdlatul Ulama. Dengan kata lain untuk pertama kali NU berdiri di Sumut adalah NU Padang Sidempuan, namun sekretariat pertama kali di Sibolga tempat kediaman Ketua Umum H. Bahruddin Thalib Lubis kemudian dipindahkan di Padang Sidempuan. Pada permusyawaratan kaum muslimin di Padang Sidempuan itu Syekh Mustafa Husein dari Purba Baru Turut menghadiri pertemuan tersebut. Diakhir pertemuan para ulama berbai'ah yang isinya : *Pertama*, mempertahankan paham Ahlu Sunnah Wal- Jamaah dan aliran mazhab. *Kedua*, membangun dengan sepenuhnya perserikatan Nahdlatul uLama yang baru didirikan.

Pengembangan NU menjadi penting dan harus dilakukan. Pada akhir tahun 1952 melalui Ketua PW NU Sumut, M. Nuddin Lubis dan Sekretaris Abdul Jabar Nasution diadakan pertemuan dengan beberapa ulama dan pemimpin Islam di rumah Tagor Muda Dalimunthe dimana posisi beliau sebagai Imam Tentara di Sumatera Utara. Tujuan pertemuan ini sebagai sosialisasi pengembangan agar NU dapat dibentuk di Sumatera Timur. Selanjutnya bulan Desember 1952 atas undangan Kiyai H. Abdul Majid Imam Mesjid Raya Medan diadakan pertemuan di rumah Haji Silam seorang hartawan yang berjiwa Islam di jalan Kanton Medan yang dihadiri M. Nuddin Lubis. Hasil pertemuan tersebut terbentuklah Pengurus NU Kota Medan dengan terpilihnya KH. Abdul Majid sebagai Ketua. Perkembangan NU Sumut semakin mantap seiring dengan perpindahan PW NU dari Padang Sidempuan ke Kota Medan yakni pada tanggal 1 Januari 1953. Awalnya kantor berdimisili di Jalan Kebudayaan, kemudian tahun 1955 berpindah di jalan Perdana No 56. Pada tahun 1960 PW NU pindah ke alamat Jalan Palang Merah No 80. Kemudian pindah ke kantor baru sampai sekarang di Jalan Sei Batang Hari No 52 Medan.

3. Kekuatan Sosial NU di Sumatera Utara

Seperti telah disinggung di awal dimaksud dengan peta sosial adalah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk memperkenalkan dan mendalami kondisi sosial komunitas tersebut. Dalam konteks ini NU menjadi obyek penelitian, menelusuri lebih mendalam tentang mapping sosial dari NU Sumut itu sendiri.

Kekuatan sosial menjadi kekuatan melekat dalam tubuh NU tanpa terkecuali di Sumut. NU sebagai organisasi keagamaan di negeri ini, NU hadir menjadi kekuatan negara. NU juga menjadi bagian kekuatan masyarakat, karena NU merupakan organisasi yang lahir dari masyarakat, tumbuh dan bergaul di masyarakat dan memperjuangkan masyarakat dan tradisi – tradisi masyarakat nusantara yang selaras dengan nilai – nilai keislaman. Segala tradisi yang berkembang di masyarakat nusantara diadopsi oleh NU, bahkan dijadikan sebagai praktek keagamaan yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam. Ini menjadi kekuatan sosial bahwa NU cukup melekat dengan masyarakat mulai dari masyarakat desa hingga perkotaan. Begitupula di tengah kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat, NU juga mampu memainkan peran dan kiprahnya secara signifikan dalam bidang kebudayaan. NU mampu turut melakukan penyaringan terhadap derasnya budaya luar yang masuk yang dapat menggerogoti budaya Indonesia. NU mampu melakukan antisipasi terhadap budaya luar yang notabene bertentangan dengan Islam dan budaya lokal itu sendiri. Dengan kata lain NU telah menjalani dan mempunyai pengamalan sosial politik yang cukup panjang sejalan dengan perkembangan politik sosial kenegaraan di Indonesia. Kekuatan sosial NU hadir dalam kepentingan kemaslahatan masyarakat dan negara. NU menjadi pilar negara yang selalu terdepan menjaga masyarakat dan negara. Gerakan NU telah dimulai sejak dilahirkannya, kemudian berlanjut Orde Lama, Orde Baru dan masa reformasi ini. Berbagai orde yang telah dilewati NU menempatkan dirinya sebagai garda terdepan mengawal dan membela kebangsaan terlebih dimasa reformasi ini.

Pada awal – awal reformasi Pengurus Besar NU (PBNU) telah

mengeluarkan diktum tentang refleksi reformasi, sebuah pandangan untuk merespon reformasi yang berlangsung yang berisi delapan butir pernyataan sikap dari PB NU yaitu : (1). NU memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga agar reformasi berjalan ke arah yang lebih tepat. (2). Rekonsiliasi nasional jika dilaksanakan harus ditujukan untuk merajut kembali *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan) dan dirancang ke arah penataan sistem kebangsaan dan kenegaraan yang lebih demokratis, jujur dan keadilan. (3). Reformasi jangan sampai berhenti di tengah jalan, sehingga dapat menjangkau terbentuknya sebuah tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (4). Penyampaian berbagai gagasan yang dikemukakan hendaknya dilakukan dengan hati – hati, penuh kearifan dan didasari komitmen bersama serta dihindari adanya pemaksaan kehendak. (5). Kasus – kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus disikapi secara arif dan bertanggung jawab. (6). TNU harus berdiri di atas semua golongan. (7). Pemberantasan KKN harus dilakukan pada kelompok tertentu. (8). Praktek monopoli yang ada di Indonesia harus segera dibasmi tuntas dalam setiap praktik ekonomi. Untuk memperkuat refleksi reformasi di atas pada tanggal 31 Desember 1998, PB NU mengeluarkan kembali himbuan yang isisnya menyerukan agar agenda reformasi diikuti dan dilaksanakan seluruh lapisan dan warga Nahdliyin dimana saja berada.

Apa yang dilakukan NU, merupakan bentuk peran dan fungsi NU benar – benar mengabdikan dirinya ke masyarakat dan negara. NU tidak pernah mengenal zaman dan orde, tidak pernah mengenal dilibatkan oleh negara atau tidak, NU tetap menjalankan tugas dan fungsinya kepada negara dan bangsa. NU menyadari dalam tubuh NU terdapat kekuatan sosial yang terpatri dalam kelembagaan NU dan warga Nahdliyin itu sendiri. Kekuatan sosial inilah menjadikan NU tumbuh dan berkembang dimana-mana, baik dalam negeri sendiri begitu pula di luar negeri. NU telah berkembang di berbagai manca negara didirikan dan diperkenalkan dalam dunia internasional. Mendunianya NU tidak terlepas kembali dari kekuatan sosial dan kekuatan lainnya yang dimiliki oleh NU. Kehadirannya dalam dunia internasional muncul sebagai organisasi Islam berpaham Ahlu Sunnah

Wal-Jamaah yang terbesar di dunia. NU dengan metode pendekatan ukhuwah, kekeluargaan, persaudaraan dan rasa cinta sesama Islam mampu mengalahkan penyebaran golongan minoritas seperti Wahabi dan Syiah tanpa mengeluarkan dana besar seperti golongan Wahabi mengucurkan dana besar guna menyebarkan paham tersebut ke seluruh negara. Sedangkan NU telah memiliki cabang-cabang NU yang tercatat sebanyak 194 cabang negara di berbagai negara dan semua telah terdaftar resmi dan mempunyai kekuatan legalitas di negara masing – masing.⁴

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia telah memiliki kekuatan sosial yang harus memiliki visi yang kuat untuk memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Jika ditelusuri lebih dalam, sesungguhnya kekuatan sosial NU terletak kepada faktor – faktor sebagai berikut :

a. Pokok – Pokok Pikiran Ajaran NU

Salah satu kekuatan sosial NU terletak pada kekuatan ajaran NU itu sendiri yang menganut dan mengamalkan ajaran Ahlu Sunnah Wal-Jamaah (Aswaja). Ajaran ini mengajarkan bahwa harus berpegang teguh kepada Alquran dan sunnah sebagai sumber dan ajaran Islam itu sendiri. Dalam ajaran Aswaja ini mengajarkan pula prinsip-prinsip penting yakni : *al – Tawasut* (sikap di tengah – tengah), *al – Tawazun* (seimbang dalam segala hal), *al – I'tidal* (tegak lurus) dan *Tasamuh* (Toleransi). Prinsip – prinsip tersebut menjadi kekuatan sosial tidak saja di internal NU, tetapi juga prinsip memberikan semangat keterbukaan kepada ormas dan agama lain, sehingga memudahkan NU dapat diterima, bergaul dan berkembang di tengah masyarakat manapun.

1. *Al – Tawasut*, diartikan NU mengajarkan sikap di tengah – tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim baik kiri maupun kanan atau dengan

⁴www.muslimoderat.net.PCINU, NU Ormas Terbesar Dunia dengan 194 Cabang Negara – Muslimoderat. Diakses 12/09/2019

kata lain adalah bersikap moderat dengan memiliki sikap dan berpendirian. Karakter ini menjadi nilai dalam beripikir dan bertindak di berbagai aspek kehidupan yang dijalankan NU meletakkan dirinya mengambil sikap di tengah – tengah. Dalam berpolitik NU selalu elegan dalam mengambil kebikan. Dalam berpolitik NU meletakkan konsep ekonomi yang juga tidak ekstrim yang bertentangan dengan syariat begitu pula dimensi kehidupan lainnya. Hal ini di dasarkan Qs. al – Baqarah : 143 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (Qs. al – Baqarah : 143)

2. *Al – Tawazun*, diartikan NU mengajarkan prinsip keseimbangan dalam segala hal aspek kehidupan. Termasuk dalam penggunaan dalil hukum, NU memadukan dalil naqli (nash) dan aqli (ijihad–ra’yu). Hal ini didasarkan Qs. al – Hadid : 25 yang berbunyi :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Qs. al – Hadid : 25)

3. *Al – Itidal*, diartikan NU mengajarkan prinsip tegak lurus. Sesuai Qs. al – Maidah : 8 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. al – Maidah : 8)

4. *Al – Tasamuh*, diartikan NU mengajarkan sikap toleransi baik kepada umat Islam maupun kepada umat yang lainnya. NU cukup menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip yang sama. Namun tidak pula mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda dalam meneguhkan apa yang diyakini. Prinsi ini didasarkan Qs. Thaha : 44 yang berbunyi :

فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”. (Qs. Thaha : 44).

Semua prinsip di atas, menjadi nilai penting dalam berpikir dan bergerak yang dilakukan NU. Karena ia menjadi nilai, semakin memudahkan NU dalam mengembangkan dirinya dimanapun ia berada, meskipun di tengah – tengah masyarakat yang prulitas. Dalam konteks Sumut misalnya sebagai refsentasi daerah yang majemuk suku, agama, ras dan kelompok, tidak menyulitkan bagi NU mengembangkan dirinya. Begitu pula sebalik semua seku agama, ras dan kelompok yang ada mudah menerima NU dalam membangun kedekatan di daerah ini. Tentunya kekuatan ajaran di atas menjadi ruh penting bagi NU dalam memperkuat kekuatan sosialnya. Ajaran – ajaran

tersebut tidak saja menjadi prinsip yang melekat di tubuh NU, tetapi juga harus diimplementasikan ke masyarakat luas.

b. Jumlah Warga Nahdiyin di Sumatera Utara

Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten Kota terbilang relatif padat. Sumut merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, sekitar seperempat jumlah penduduk di Pulau Sumatera. Atau provinsi yang ke empat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota (2018) mencapai 14,42 juta jiwa. Berdasarkan data Badan Statistik jumlah tersebut terdiri atas 7,19 juta jiwa laki – laki dan 7, 22 juta jiwa perempuan. Sebanyak 7, 21 juta jiwa penduduk di provinsi dengan Ibu Kota Medan tinggal diperkotaan dan sisanya di pedesaan. Medan tercatat sebagai kab/kota dengan jumlah penduduk terbanyak yakni mencapai 2,26 juta jiwa. Deli serdang diurutan kedua dengan jumlah penduduk 2,16 juta jiwa dan Langkat di posisi ke tiga dengan penduduk 1,04 juta jiwa. Sedangkan Pakpak Barat memiliki penduduk paling sedikit sekitar 48 ribu jiwa. Pada tahun 2018 di Sumatera Utara terdapat 3,37 juta keluarga dengan jumlah anggota keluarga rata – rata 4 jiwa. Sedangkan rata – rata kepadatan penduduk mencapai 198 jiwa per km persegi. Medan merupakan kota dengan penduduk terpadat di Sumatera Utara yakni mencapai 8,544 jiwa per km persegi.⁵

⁵<https://databoks.katadata.co.id>, Jumlah Penduduk Terbanyak di Sumatera Utara, Diakses 19/09/2019

Tabel. 1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten Kota, 2017

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
	Kabupaten			
1	Nias	1842,51	136115	74
2	Mandailing Natal	6134,00	430894	70
3	Tapanuli Selatan	6030,47	275098	46
4	Tapanuli Tengah	2188,00	350017	160
5	Tapanuli Utara	3791,64	293399	77
6	Toba Samosi	2328,89	179704	77
7	Labuhan Batu	2156,02	462191	214
8	Asahan	3702,21	706283	191
9	Simalungun	4369,00	849405	194
10	Dairi	1927,80	279090	145
11	Karo	2127,00	389591	183
12	Deli Serdang	2241,68	2029308	905
13	Langkat	6262,00	1013385	162
14	Nias Selatan	1825,20	308281	169
15	Humbang Hasundutan	2335,33	182991	78
16	Pakpak Barat	1218,30	45516	37
17	Samosir	2065,05	123789	60
18	Serdang Bedagei	1900,22	608691	320
19	Batu Bara	922,20	400803	435
20	Padang Lawas Utara	3918,05	252589	64
21	Padang Lawas	3892,74	258003	66
22	Labuhan Batu Selatan	3596,00	313884	87
23	Labuhan Batu Utara	3570,98	351097	98
24	Nias Utara	1202,78	133897	111
25	Nias Barat	473,73	84917	179
	Kota			
26	Sibolga	41,31	86519	2094
27	Tanjung Balai	107,83	167012	1549
28	Pematang Siantar	55,65	247411	4445
29	Tebing Tinggi	31,00	156815	5059
27	Medan	265,00	2210624	8342
28	Binjai	59,19	264687	4472
29	Padang Sidempuan	114,66	209796	1830
30	Gunung Sitoli	280,78	135995	484
	Sumatera Utara	72981,23	13937797	191

Dari jumlah penduduk tersebut, jika jumlah pemeluk agama di Sumatera Utara berdasarkan sensus tahun 2015, mayoritas penduduk Sumatera Utara menganut agama adalah : Islam sekitar 63,91 %, Kristen Protestan 27.86 %, Katolik 5.41 %, Budha 2, 43 %, Hindu 0,35 %, Konghucu 0.02 % dan Parmalim 0.01 %. Seagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2
Agama di Sumatera Utara

Agama	Persentase
Islam	63,91 %
Kristen Protestan	27,86 %
Katolik	5,41 %
Budha	2,43 %
Hindu	0,35 %
Konghucu	0,02 %
Parmalim	0,01 %

Tabel. 3
Jumlah Pemeluk Semua Agama di Sumut

Kota/Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	KHC	Jumlah
Nias	1,536	113,293	16,510	0	0	4	131,377
Mandailing Natal	386,771	12,452	454	10	16	0	404,945
Tapanuli Selatan	207,372	51,735	2,544	3	15	0	263,815
Tapanuli Tengah	132,932	141,013	36,146	18	208	3	311,232
Tapanuli Utara	13,301	251,991	12,815	2	139	5	279,257
Toba Samosir	10,738	147,894	11,424	37	74	5	173,129
Labuhan Batu	344,224	57,921	4,811	53	6,637	9	415,110
Asahan	594,366	61,161	4,513	109	6,848	11	668,272
Simalungun	468,328	302,302	42,132	128	1,965	13	817,720
Dairi	42,302	196,592	30,476	20	272	6	270,053
Karo	91,796	204,283	51,678	130	1,518	4	350,960
Deli Serdang	1,400,527	301,106	44,388	2,989	36,380	96	1,790,431

Peta Sosial dan Ekonomi Umat Islam di Sumatera Utara

Langkat	876,405	75,001	3,997	409	7,676	20	967,535
Nias Selatan	7,394	223,843	58,123	6	31	2	289,708
Humbang Hasundutan	5,165	142,662	23,410	0	2	0	171,650
Pakpak Bharat	16,161	23,065	1,223	0	0	0	40,505
Samosir	1,884	69,947	47,575	8	5	1	119,653
Serdang Bedagai	497,855	79,502	8,299	207	7,264	43	594,383
Batu Bara	330,076	37,757	5,715	25	1,100	40	375,885
Padang Lawas Utara	200,459	20,838	832	3	12	0	223,531
Padang Lawas	213,948	10,777	379	0	5	0	225,259
Labuhan Batu Selatan	238,682	36,870	1,318	16	622	15	277,673
Labuhan Batu Utara	271,919	52,492	4,012	30	1,801	9	330,701
Nias Utara	6,894	99,529	20,676	2	1	0	127,244
Nias Barat	1,621	64,417	15,740	2	12	1	81,807
Kota Sibolga	48,358	29,729	3,741	2	2,512	14	84,481
Kota Tanjung Balai	131,339	12,348	1,168	27	8,781	27	154,445
Kota Pematang Siantar	103,029	109,236	11,065	265	10,226	27	234,698
Kota Tebing Tinggi	113,344	18,689	1,327	217	10,313	70	145,248
Kota Medan	1,422,237	425,253	37,552	9,296	184,807	370	2,097,610
Kota Binjai	209,426	19,396	2,004	630	13,391	182	246,154
Kota Pdg Sidempuan	172,290	17,123	878	0	670	5	191,531
Kota Gunungsitoli	17,151	99,483	9,112	0	245	2	126,202
Prov. Sumatera Utara	8,579,830	3,509,700	516,037	14,644	303,548	984	12,982,204

Berdasarkan data di atas, pemeluk agama Islam merupakan jumlah penduduk pemeluk agama yang terbesar di Sumut hampir mencapai 63,91 %. Pemeluk Islam yang terbesar ini merupakan ragam dari berbagai ormas keagamaan berbasis Islam. Salah satu ormas

dimaksud adalah NU. Warga NU dengan sebutan Nahdliyin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemeluk agama Islam yang berjumlah sekitar 63,91% tersebut. Memang belum ada data yang akurat tentang jumlah warga Nahdliyin di Sumut. Namun jika melihat data nasional, dilihat dari jumlah penduduk muslim yang berafiliasi dengan NU di Indonesia berjumlah sekitar 79,04 jiwa. Jumlah ini didasarkan pada riset Alvara Research Center tahun 2016 berupa survei nasional bertajuk “Potret Kebragaman Muslim Indonesia” Terhadap 1626 penduduk Muslim Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas di 34 Provinsi di Indonesia.” Survei menunjukkan hasilnya penduduk Muslim Indonesia 50,3% mengaku berafiliasi dengan NU. Sementara dari sisi keanggotaan sebanyak 36,1% mengaku menjadi NU. Estimasi yang dilakukan Alvara Research Center dilakukan secara bertingkat : *Pertama*, berdasarkan data BPS dihitung terlebih dahulu jumlah populasi penduduk yang beragama Islam. *Kedua*, berdasarkan populasi penduduk yang berusia 17 tahun ke atas. *Ketiga*, berdasarkan jumlah populasi penduduk muslim yang berafiliasi menjadi anggota ormas Islam. Berdasarkan penghitungan tersebut jumlah penduduk Muslim yang berafiliasi dengan NU berjumlah 79,04 juta jiwa. Dari sisi keanggotaan 57,33 juta penduduk Muslim Indonesia mengaku menjadi anggota. Menarik dari riset ini adalah ternyata NU sangat “java – centric”. Dari 79,04 juta yang mengaku berafiliasi dengan NU tersebut 79,8% adalah penduduk tinggal di Jawa dan dari 57,33 juta jiwa yang mengaku menjadi anggota NU, 86,4% nya adalah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa, selebihnya tersebar di berbagai daerah lain.⁶

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa warga Nahdliyin merupakan ormas terbesar di Indonesia yang menyebar di berbagai provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Namun untuk menakar jumlah warga Nahdliyin di Sumut belum ada data yang akurat menunjukkan jumlah yang pasti. Di Sumut warga Nahdliyin bukan menjadi basis sebagaimana halnya di Jawa. NU terbilang relatif kecil di dibandingkan ormas lain seperti halnya Al – Washliyah dan

⁶<https://hasanuddinali.com>. Menakar Jumlah Jamaah NU dan Muhammadiyah, diakses 02/09/2019

Muhammadiyah. Hal ini disebabkan NU merupakan Ormas yang belakangan masuk ke Sumut dibandingkan Al – Washliyah dan Muhammadiyah. Al – Washliyah merupakan Ormas yang lahir di Sumut sedangkan Muhammadiyah merupakan ormas yang juga duluan lahir dari NU. Karena itu penyebaran NU di daerah ini dibilang agak terlambat dibandingkan dua ormas tersebut, sehingga turut mempengaruhi dari jumlah yang mengikuti NU dan menjadi warga NU itu sendiri. NU di Sumut bukan NU centris sebagaimana halnya di Jawa menjadi mayoritas dan basis NU.

Dilihat dari sosial mapping NU dari aspek jumlah Nahliyin di Sumut, meskipun menempati jumlah warga sedikit dibanding Al – Washliyah dan Muhammadiyah, meskipun demikian telah memberikan kekuatan sosial bagi khususnya dan umat Islam umumnya. NU menjadi refsentasi kekuatan umat Islam di daerah in, dimana kekuatan itu tidak saja terlembaga, namun menjelma dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Apalagi kekuatan NU tidak dilihat dalam paradigma parsial tetapi komprehensif. Artinya dari aspek wilayah, NU selalu dilihat dalam pandangan nasional sebagai ormas terbesar di negeri ini menjadi kekuatan daerah sekaligus kekuatan negara. Kiprah NU tidak saja pada tingkat lokal, tetapi juga pada tingkat nasional dan internasional. Dalam sejarah tercatat NU memberikan andil besar dalam mengantar Indonesia merdeka, begitu pula dalam perjalanan negara ini merupakan bagian dari peran dan kontribusi NU. NU telah meletakkan dirinya menjadi agen gerakan agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan yang tentunya tidak melepaskan dari prinsip ajaran Ahlu Sunnah Wal – Jamaah. Posisi tersebut menjadikan kiprah dan perjuangan NU dimana saja dalam rangka mewujudkan kebaikan masyarakat (khairu ummah). Karena itu peran NU di masyarakat dan negara tidak diragukan lagi semuanya terukur dan nyata.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu kekuatan NU sesungguhnya terletak pada masyarakat itu sendiri. NU lahir dan tumbuh dari masyarakat dan untuk kembali

memperjuangkan masyarakat. Jika masyarakat diabaikan maka kekuatan sosial NU akan hilang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) Pengasuh Pesantren Tebu Ireng Jombang, beliau berujar :

“Untuk menunjang kebesaran NU, NU harus mampu memposisikan dirinya dengan elegan di dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. NU ke depan harus mampu mengambil peran yang signifikan dalam setiap pengembangan potensi masyarakat. NU harus menentukan posisinya dengan jelas, sehingga setiap unsur NU dapat berperan aktif dalam tindak nyata. NU dapat menata organisasinya dengan baik agar seluruh sisi kehidupan bermasyarakat dapat menjadikan NU sebagai pilar utamanya selain pemerintah. Sehingga seluruh jajaran kepengurusan NU di setiap tingkatan dapat berperan maksimal dalam pemberdayaan masyarakat.”⁷

Kekuatan masyarakat menjadi kekuatan NU, semakin terlihat ketika warga Nahdliyin menjadi warga terbesar di negeri ini yang diperkirakan mencapai 79.04 juta jiwa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia termasuk di Sumut. Jumlah terbesar ini menjadi kekuatan negara sekaligus menjadi kekuatan sosial. Kekuatan ini akan terbangun kuat tidak hanya sekedar mengandalkan jumlah mayoritas, tetapi dibutuhkan pemberdayaan masyarakat. Pendapat ini juga digaungkan oleh para pengamat bahwa NU harus kembali berorientasi kepada pemberdayaan ummat. Pemberdayaan tidak saja politik, tetapi juga konteks sosial ekonomi. Seorang Guru Besar dari NU bernama Kajung Marijan,⁸ mengatakan ada tiga spirit yang mengiringi pembentukan NU yakni : *Pertama*, spirit keagamaan, bahwa NU berdiri sebagai gerakan keagamaan yang memahami Islam dalam konteks lokal. Islam dalam konteks Indonesia sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat. *Kedua*, spirit kebangsaan bahwa NU merupakan gerakan yang bersama-sama dengan gerakan gerakan lainnya pada saat didirikan melakukan

⁷<https://www.nu.or.id/post/read>, Gus Sholah : NU Kekuatan Utama Masyarakat Sipil – NU Online, Diakses, 13/09/2019

⁸<https://nasional.kompas.com/read>, Kultur Pesantren, Kekuatan NU Halaman all – Kompas.com, diakses, 13/09/2019

perlawanan terhadap penjajah. *Ketiga*, spirit kemandirian ekonomi, spirit sangat strategis meskipun belum maksimal dilakukan, namun berdirinya NU tidak terlepas dari upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Pemberdayaan sosial menjadi penting terhadap penguatan NU, meskipun menurut Ketua PB NU KH Masdar F Masudi, menilai konsep sosial keagamaan yang diajarkan Islam dan diusung NU tidak dipahami sepenuhnya oleh kalangan umat Islam umumnya dan Nahdliyin khususnya. Ini yang membuat tujuan membangun masyarakat adil sejahtera, egaliter dan demokratis sulit diwujudkan karena NU sebagai organisasi menjadi sulit berjalan. Menurut Masdar, tetap saja yang populer dipandang Nahdliyin adalah agama sebagai agenda personal dan ritual.⁹ Ini menjadi tugas bersama yang harus diperankan oleh NU sebagai struktural dan kulturalnya. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting dilakukan dan meskipun belum maksimal telah dilakukan seluruh cabang NU di Indonesia termasuk di Sumut. NU dimanapun berada harus menggiatkan program sosial. Berbagai gerakan sosial terlihat menjadi prioritas dengan menyusun program kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai cabang NU di Jawa sudah memulai program pengumpulan coin sebagai bentuk program dalam pembiayaan sendiri. Untuk NU Sumut dan pengurus cabang NU Kota Medan misalnya dengan program pemberian beras kepada kelompok miskin dan lain sebagainya merupakan bentuk dari pemberdayaan masyarakat meskipun bersifat konsumtif. Namun ini penting dilakukan guna memberikan penguatan sosial kepada NU dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) menjadi kekuatan sosial NU termasuk di Sumut. Dimaksud dengan SDM satu faktor penting dalam yang tidak dapat dilepaskan dalam organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM merupakan seperangkat proses – proses dan aktifitas

⁹ *Ibid.*

yang dilakukan bersama. SDM terdiri dari dua macam yakni daya fisik dan daya pikir. Dalam konteks NU keberadaan SDM menjadi penting dan strategis, karena SDM berupa manusia yang diperkerjakan di dalam organisasi NU sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi NU itu sendiri. NU sangat membutuhkan orang-orang yang terus bergerak membesarkan NU dari waktu ke waktu dan masa ke masa diisi oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Kebesaran NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia di dukung oleh SDM yang unggul, berkompeten di bidangnya masing-masing. Faktor ini sangat menentukan roda perjalanan NU.

Untuk menentukan SDM dimulai dengan proses perencanaan SDM yang diartikan suatu kegiatan atau proses sangat penting dalam berbagai kegiatan organisasi. Perencanaan sesungguhnya proses penentuan tujuan, pengevaluasian berbagai alternatif pencapaiannya dan penentuan kebijakan yang diambil. Proses penentuan perencanaan NU tidak diragukan lagi baik dalam menyusun komposisi pengurus, para pegawai sekretariat sebagai bagian terpenting dalam SDM NU tersebut. Dalam konteks Pengurus Wilayah NU (PW NU) Sumut perencanaan SDM juga dilakukan sama. Artinya dimulai dari penyusunan komposisi PW, pegawai administrasi dan lainnya. Karena NU adalah organisasi berbasis agama, maka adopsi yang dilakukan tidak terlepas dari pengurus yang notabene adalah berbasis ulama dan cendikiawan muslim. Hal ini penting dilakukan karena sejarah pendirian NU adalah diniasi oleh para ulama dan para Kiyai. Tradisi ini menjadi syarat penting dalam menyusun dan meletakkan SDM pengurus yang berbasis ulama tersebut. Hampir dipastikan para pengurus harian (tanfidziah) NU se Indonesia adalah orang-orang yang berkompeten, berbasis ulama dan para cendikiawan dengan berbagai latar belakang keilmuan yang berbeda-beda.

Sumber daya manusia yang berkompeten di tubuh NU, merupakan kekuatan sosial NU itu sendiri. Inilah yang membedakan NU dengan organisasi lainnya. NU dipimpin oleh ulama ataupun mereka yang berbasis pesantren dan keagamaan yang kuat. Karena itu mengikuti NU menjadi keberuntungan setiap orang dengan catatan diiringi

rasa keihlasan yang cukup tinggi. Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari telah menjamin siapa saja yang berkhidmat di NU akan dikau sebagai santri dan didoakan khunul khatimah. Pernyataan KH Hasyim Asy'ari ini cukup populer di kalangan Nahdliyin dengan pernyataan: "Siapa yang mau mengurus NU, aku anggap sebagai santriku. Siapa yang jadi santriku, maka aku doakan khusnul khatimah beserta keluarganya." Selanjutnya dalam suatu kesempatan KH Musyfiq Amrullah Ketua PC NU Kabupaten Subang dalam kegiatan Roadshow Aswaja mengatakan: "Dengan ber NU sesungguhnya mengikuti ulama yang mempunyai pangkat *waratsatul Anbiya*. Karena di NU banyak alim ulama yang tidak diragukan lagi keilmuan dan yang lebih penting lagi lagi sanad keilmuan ulama sudah jelas dan tersambung sampai kepada Rasulullah."¹⁰ Mungkin pernyataan inilah salah satu faktor penting dalam ber-NU untuk mengurus dan mengelola NU ini lebih baik ke depan.

Dalam konteks PW NU Sumut, kapasitas dan kapabilitas pengurus tidak diragukan lagi, mereka adalah orang – orang yang terpilih untuk mengurus NU daerah ini. Di tangan merekalah NU berkembang bersama lembaga dan banom yang ada. NU di Sumut cukup eksis membangun kedekatan kepada masyarakat dan pemerintah. Berbagai program yang digulirkan yang bersentuhan kepada masyarakat merupakan pikiran – pikiran yang dikembangkan oleh para pengurus dengan SDM yang tidak diragukan lagi. Tidak saja di Sumut seluruh pengurus cabang NU juga meletakkan SDM yang berkualitas menjadi syarat penting menjadi kekuatan sosial NU.

e. Kepemimpinan NU Bersifat Karismatik dan Ketauladanan.

Hal menarik dalam kekuatan sosial NU tanpa terkecuali NU Sumut adalah kepemimpinan NU di tangani oleh pemimpin yang berkharismatik. Ini menjadi prinsip penting yang harus diterapkan dalam ber-NU. Berkharismatiknya kepemimpinan NU karena dipimpin oleh para ulama yang notabenenya mempunyai kepribadian yang

¹⁰<https://www.nu.or.id/post/read, Kiay Musyfiq Jelaskan Manfaat Ikut Nahdlatul Ulama – NU Online, diakses 04/09/2019.>

berketauladanan. Inilah ciri khas NU, sejak berdirinya hingga saat ini NU dipimpin ulama – ulama yang kharismatik dan berkelaudanan. Para ulama yang memberikan contoh terbaik kepada umat, sehingga umat terayomi secara baik dalam kehidupan dan proses melaksanakan aktifitas keagamaan yang ada. Warga Nahdliyin merupakan warga terbesar dan menyebar di Indonesia bahkan berkembang di Mancanegara. Proses tumbuh dan berkembangnya NU tersebut, tentunya tidak terlepas dari kecintaan kepada pemimpinnya dan sudah pasti karena sifat karismatik dan ketauladanan yang dimiliki pemimpin menjadi salah satu indikator tumbuh dan berkembangnya NU tersebut.

NU yang memiliki kepemimpinan bersifat kharismatik dan ketauladanan dari sejak pendirinya hingga sampai saat ini harus dipertahankan, tidak saja pada tingkat Pengurus Besar, tetapi diseluruh cabang yang ada di Indonesia bahwa dipimpin oleh ulama berkarismatik dan berketauladanan menjadi syarat mutlak dalam memberikan penguatan di tubuh NU itu sendiri. Dipimpin oleh ulama yang berkarismatik menjadi kekuatan sosial bagi NU. Karena disinilah masyarakat menilai dan melihat serta merekam apa yang dilakukan oleh pimpinan NU. Hal ini pula menjadikan NU dalam proses perkembangannya terus terseleksi secara alamiyah menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Menjadikan ulama sebagai pemimpin adalah hal yang mutlak, dalam kepribadian ulama tersebut sudah pasti terdapat ilmu yang mendalam. Hal ini ditegaskan oleh Rais Aam PB NU KH A. Musthafa Bisri (dipanggil Gus Mus) dalam sambutannya pembukaan Pramuktamar NU ke 33 di Pondok Pesantren al – Kautsar Al Akbar Kota Medan (2015), mengatakan :

“Penting untuk NU memilih pemimpin yang keilmuannya bisa dipertanggung jawabkan. NU didirikan dengan silsilah dan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari pendiri NU Mbah Hasyim Asya’ari.¹¹ Pernyataan sama juga ditegaskan oleh Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Sirodj, sepakat dengan pemikiran Gusmus tentang kriteria memimpin NU dengan keilmuan yang

¹¹[https://news.okezone.com>read > Syarat Mutlak Pemimpin NU Versi Gus Mus](https://news.okezone.com/read/Syarat%20Mutlak%20Pemimpin%20NU%20Versi%20Gus%20Mus), diakses 05/09/2012

bisa dipertanggung jawabkan. Untuk bisa mendapatkan pemimpin seperti ini salah satunya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Tugas kita untuk menjaga *habibatul ulama*, *karamatul ulama*. Makanya PB NU menawarkan metode *Ahlu Halli wal Aqdi*, pemilihan *Rais Aam* melalui musyawarah mufakat, bukan mengadu ulama secara terbuka.”¹²

Begitu pula dalam konteks Sumut melirik dan menjadikan ulama sebagai pemimpin pada tingkat wilayah menjadi hal penting. Karena NU adalah organisasi perhimpunan ulama yang menjadi panutan oleh warga Nahdliyin itu sendiri. Ulama sudah pasti memiliki ilmu agama yang kuat dan diamalkan dalam kehidupan sehari – harinya. Apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat dari tampilan ulama menjadi kekuatan sosial bagi NU dimanapun berada termasuk di Sumut

f. Persatuan dan Kesatuan Warga Nahdliyin

Sebagai ormas terbesar yang memiliki Nahdliyin terbesar di Indonesia, persatuan dan kesatuan di kalangan Nahdliyin juga menjadi sifat dan karakter yang melekat di tubuh NU. Dalam berbagai kepentingan aspek kehidupan bahwa persatuan dan kesatuan selalu dijaga. Sikap ukhuwah terbangun di kalangan Nahdliyin. Jika pun terjadi perdebatan sebuah friksi – friksi kecil menunjukkan dinamika NU itu sendiri. Nahliyin bagaikan satu tubuh yang saling menjaga satu dengan yang lainnya. Jika saudaranya sakit atau disakiti, maka semuanya merasa tersakiti. Persatuan dan kesatuan di tubuh NU bukanlah hal yang baru. Sejarah telah mencatat dengan persatuan dan kesatuan NU itulah turut mengantarkan Indonesia merdeka. Warga Nahdliyin bersatu melawan penjajah mengorbankan jiwa, raga, harta dan air mata dalam rangka mempetahankan negeri ini dari penguasaan penjajah.

Membangun rasa ukhuwah dalam persatuan dan kesatuan

¹² *Ibid.*

merupakan doktrin yang dibangun oleh NU kepada warganya. Bagi NU mencintai tanah air bagian dari iman, mencintai saudara – saudaranya menjadi tugas mulia. Di kalangan Nahdliyin ditanamkan bahwa memperkuat ukhuwah adalah bagian dari kekuatan sosial NU itu sendiri. Salah satu contoh menarik adalah terkait Pilpres (2019) yang lalu, dimana salah satu pasangan Bapak H. Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, yang sekarang terpilih dan telah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI (2019 – 2024). Merupakan paduan antara nasionalis dan agamis. KH. Ma’ruf Amin merupakan salah satu putera terbaik NU, atas dasar itu seluruh warga Nahdliyin bersatu dimanapun berada termasuk di Sumut wajib memenangkan pasangan tersebut. Berdasarkan survei menunjukkan bahwa peran warga Nahdliyin cukup besar memenangkan kedua pasangan sehingga terpilih menjadi Presiden RI. Ini merupakan bentuk dari jati diri NU bersatu dalam aspek politik terkait dengan Pilpres yang telah berlalu. Persatuan dan kesatuan di bangun kemudian diperkuat dengan rasa ukhuwah yang tinggi tidak saja di politik tetapi berbagai aspek lainnya menjadi kekuatan sosial di kalangan NU.

4. Kekuatan Ekonomi NU di Sumatera Utara

Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia, dalam aspek ekonomi menjadi prioritas penting untuk diperkuat terutama di kalangan Nahdliyin. NU menyadari ekonomi menjadi pilar penting memberikan penguatan ekonomi kepada warga Nahdliyin. Apalagi warga Nahdliyin mayoritas orang desa dengan basis pekerjaan petani dan lainnya. Begitu pula dalam konteks Sumut dapat dipastikan kondisi ekonomi warga Nahdliyin rata – rata dengan penghasilan yang tidak cukup tinggi. Ini menjadi perhatian serius bagi NU terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Nahdliyin.

a. Kondisi Ekonomi Warga Nahdliyin

Belum terlihat data yang akurat dan terbaru tentang kondisi ekonomi warga Nahdliyin di Sumatera Utara. Meskipun demikian

data dapat dilihat dari tingkat lapangan kerja di setiap Kabupaten Kota dan dilihat dari jumlah pemeluk agama Islam yang ada. Seperti diketahui jumlah pemeluk agama Islam di Sumut lebih kurang 8,579,830 orang. Dari jumlah tersebut dipastikan warga Nahdliyin sekitar sekian % yang tersebar di Kab/Kota. Hampir dipastikan kondisi ekonomi warga Nahdliyin mayoritas dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dengan ragam mata pencaharian. Dapat dipastikan tingkat kemiskinan warga Nahdliyin terbilang tinggi. Karena itu PW NU Sumut selalu mendorong bahwa perhatian serius yang harus dilakukan NU adalah dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Seperti kita ketahui salah satu tujuan NU dilahirkan adalah menyahuti pemberdayaan umat khususnya dalam bidang ekonomi. Apalagi dirasakan kondisi ekonomi di Nahdliyin masih banyak mengalami kesenjangan ekonomi. Ini membahayakan bagi kekuatan sosial dan ekonomi NU itu sendiri. NU tidak saja memberikan penguatan bidang agama, politik, pendidikan, namun bidang sosial dan ekonomi harus menjadi fokus perhatian. Meskipun NU sebagai ormas mayoritas, jika kondisi ekonominya lemah akan turut mempengaruhi kekuatan lainnya. NU dilahir untuk memberikan berbagai aspek kekuatan negeri ini. Tanpa terkecuali masyarakat Indonesia dan itu harus dimulai dari internal kalangan Nahdliyin itu sendiri.

Pemberdayaan ekonomi menjadi fokus perhatian NU. Untuk mengantisipasi tersebut NU telah mendirikan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN). Tujuan pendirian HPN tiada lain memberikan solusi terhadap persoalan – persoalan ekonomi terutama di kalangan Nahdliyin. Konsep yang dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat, dengan mengangkat secara pelan-pelan kondisi kesenjangan yang terjadi di tubuh NU sendiri. Sebagai Ketua HPN H. Abdul Khalik, ketika acara selebrasi dan tasyakkur hari lahir ke 8 HPN di Grand Sahid Jaya, menyatakan diantara tujuan pendirian NU adalah pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi. Ia berharap kepada pengusaha muda Nahdliyin agar turut serta mengembangkan ekonomi untuk

kepentingan Nahdliyin.¹³ Konsep – konsep pemberdayaan ekonomi tersebut harus nyata bersentuhan dengan masyarakat yang membutuhkan dengan beragam program pendayagunaan yang dapat mengangkat kesenjangan ekonomi yang ada.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi di NU harus menjadi gerakan bersama, mulai dari Pusat hingga wilayah dan cabang – cabang yang ada bahkan diikuti oleh banom dan lembaga yang ada. Gerakan ekonomi (Nahdlatul Tujjar) harus menjadi perhatian serius. Bidang pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan bisa dilakukan melalui perdangan, pertanian atau yang lainnya. Berbagai carapun dilakukan oleh NU mulai dari kerjasama berbagai kementerian yang ada juga menciptakan lapangan kerja yang dilakukan oleh warga Nahdliyin itu sendiri. Sebagai contoh Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj (2017) telah melakukan penandatanganan Nota Kesepemahaman dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga tentang pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan.¹⁴ Sebagai organisasi terbesar di Indonesia dengan keberadaan ini sesungguhnya NU telah memiliki modal besar sebagai kekuatan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya dan lain sebagainya. NU memiliki basis material yang utuh, dibandingkan dengan organisasi lainnya. Modal besar itu terletak pada jumlah jutaan warga Nahdliyin dari pusat hingga ranting, menjunjung tinggi solidaritas, gotong royong dan berpegang teguh kepada tradisi.

Disinilah kelebihan NU, dari jumlah warga yang besar terdapat tipikal masyarakat tradisional yang tentunya memiliki mentalitas mandiri dan swadaya, meskipun secara ekonomi bersifat sub sistem.

¹³[https:// www.nu.or.id](https://www.nu.or.id) > post > read, Pemberdayaan Ekonomi Salah Satu Motif Berdirinya NU – NU Online. Diakses, 05/09/2019.

¹⁴<https://m.bisnis.com>, Pemberdayaan Ekonomi NU Bisnis.com, diakses 06/09/2019

Namun justru ikatan – ikatan sosio kultural yang ada mampu melakukan penopangan kontinuitas perekonomian warga Nahdliyin. Kemampuna mobilisasi kekuatan SDM yang ada menjadi kekuatan besar berbagai aspek pemberdayaan dan kepentingan pasar yang ada. Sudah pasti ini menjadi tantangan besar yang harus dilakukan NU terutama yang memegang amanah srukturak NU yang mampu diwujudkan. Dalam konteks Sumut di kalangan Nahdliyin mulai bangkit menggerakkan berbagai sektor ekonomi untuk dikembangkan mulai dari sektor pertanian, perdagangan, industri kecil dan lainnya. Dengan jumlah warga Nahdliyin yang besar, SDM yang unggul, para pelaku usaha yang terus menggiat pemberdayaan masyarakat bukan tidak mungkin NU sebagai ormas terbesar akan mampu membangkit perekonomian negara secara menyeluruh. Mungkin tinggal menunggu waktu saja jika benar-benar komitmen ini dan diwujudkan dimulai dari kalangan Nahdliyin itu sendiri.

B. Muhammadiyah.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah

Selain Nahdlatul Ulama, ormas berikutnya yang terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Berdasarkan catatan sejarah, Muhammadiyah duluan lahir dari NU. Artinya Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang tertua di Indonesia. Muhammadiyah dilahirkan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan pada tanggal 18 Nopember 1912 didirikan oleh Muhammad Darwis,¹⁵ kemudian dikenal dengan nama KH.

¹⁵ Ahmad Darwis atau dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan lahir di daerah bernama Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Muhammad Darwis nama kecilnya, adalah putera keempat dari tujuh bersaudara dengan ayah bernama KH. Abu Bakar, Ibu beliau bernama Siti Aminah yang merupakan putri dari H. Ibrahim yang pada itu menjabat sebagai Penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau adalah generasi ke 12 dari salah seorang Walisongo yang terkemuka dalam mendakwahkan Islam di daerah Gresik yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Sejak kecil KH. Ahmad Dahlan memang senang berdakwah, ia berangkat melaksanakan haji saat umur 15 tahun dan

Ahmad Dahlan.¹⁶ Penyebutan kata Muhammadiyah secara bahasa diartikan aliran Muhammad seperti halnya Syafiiyah adalah aliran atau mazhab Imam Syafii dan Hanbaliyah diartikan aliran mazhab Imam Hambali. Karena itu Muhammadiyah diartikan pemahaman mengikuti Nabi Muhammad sebagai pembawa agama Islam yang berasal dari Allah SWT.¹⁷ Sedangkan makna terminologi Muhammadiyah adalah organisasi dan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar berasaskan Islam dan bersumber dari Alquran – Sunnah.

Di awal kemunculan Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi adalah organisasi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada bidang keagamaan ada keinginan KH Ahmad Dahlan ingin mengajak umat Islam ketika itu untuk hidup dan melaksanakan aktifitas keagamaan secara benar sesuai tuntunan Al-quran – Sunnah. Menurutnya sebuah realitas yang harus dilakukan pembaharuan mulai dari cara berpikir hingga pada pengamalan dengan semangat keagamaan yang tinggi. Beliau sangat rasakan bagaimana ketidakmurnian dalam menjalankan agama Islam, dimana masyarakat cukup kental dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, Budha, ananisme dan dinanisme sehingga turut mempengaruhi penyimpang praktik ibadah secara Islam tersebut. Dalam aspek pendidikan KH Ahmad Dahlan juga melihat pentingnya pembaharuan pendidikan, dimana pendidikan

menetap di Kota Mekkah selama 5 tahun. Selama di Mekkah tersebut beliau banyak belajar ilmu agama dan juga berinteraksi dengan Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyd Ridha dan Ibnu Taimiyah yang memiliki pemikiran pembaharuan dalam Islam. Pada tahun 1988 beliau kembali ke kampung halaman dan mengubah namanya dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Beliau kembali berangkat ke Mekkah dan menetap selama 2 tahun dan sempat berguru dengan Syeh Ahmad Khatib yang juga menjadi guru dari KH. Hasym Asyari pendiri NU. Sekembalinya dari Mekkah tahun 1912 beliau mendirikan Muhammadiyah di kampung halamannya Kauman Yogyakarta. Baru pada tahun 1921 Muhammadiyah diberi izin oleh pemerintah untuk mendirikan cabang di daerah lainnya. Beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Lihat, <https://m.merdeka.com>>pendidikan, Kisah Hidup K.H. Ahmad Dahlan, Tokoh Agama Pendiri Muhammadiyah, diakses, 08/09/2019.

¹⁶ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, h. 93

¹⁷*Ibid.*, h. 90 - 91

Indonesia terpolarisasi menjadi dua pendekatan yakni pendidikan pesantren menhajarkan pendidikan agama dan pendidikan Barat berbau sekuler. Dua hal yang terpisah dimana seharusnya pendidikan yang baik adalah gabungan antara imtak dan iptek. Dalam perjalanannya kini Muhammadiyah semakin berkembang tidak saja di Indonesia, tetapi juga di mancanegara dengan tujuan memperluas dakwah perjuangan Islam yang rahmata lil alamin dalam perspektif Muhammadiyah yang tumbuh dan berkembang di berbagai negara yang dinamakan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM). Berdasarkan catatan terdapat 21 PCIM Muhammadiyah tersebar diberbagai negara seperti Mesir, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, Inggris, Cina, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, Malayasia, Australia dan negara-negara lainnya.¹⁸ Data ini menunjukkan perkembangan Muhammadiyah di luar negeri semakin berkembang pesat dan diterima.

2. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah di Sumatera Utara

Berdirinya Muhammadiyah di Sumut pada tanggal 1 Juli 1928, ketika itu Sumut menjadi wilayah Sumatera timur, namun gerakan dakwah Muhammadiyah telah dimulai satu tahun sebelumnya yakni sejak tanggal 25 Nopember 1927 di sebuah tempat yang berada di Jalan Nagapatam No 44 Kampung Keling Medan. Gerakan dakwah ini didominasi oleh masyarakat Minang yang merupakan para perantau dari Minangkabau seperti St, Juin, Mas Pono, Sutan Marajo, Kari Suib, HR. Mohammad Said dan kawan – kawan lainnya yang berasal dari Tapanuli yang kemudian mereka sepakat mendirikan Muhammadiyah di Sumut. Deklarasi pendirian Muhammadiyah dipimpin oleh HR. Mohammad Said, seorang cendikiawan dan pengurus Sarikat Islam Siantar sekaligus pula pemimpin sebuah Surat Kabar (Pewarta Deli). Melalui deklarasi pendirian Muhammadiyah tersebut terpilih sebagai Ketua Pengurus adalah HR. Mohammad Said, Djuin St Penghulu

¹⁸m.muhammadiyah.or.id>news, Bagaimana Muhammadiyah di Luar Negeri? Simak Cerita Mereka Para Kader Persyarikatan, Diakses, 05/09/2019.

(Wakil), Maspono (Sekretaris), Pengulu Manan (Wakil) dan tokoh lainnya duduk sebagai pengurus.

Setelah Muhammadiyah berdiri di Medan, pergerakan Muhammadiyah terus bergerak di berbagai daerah di Sumut. Seperti Muhammadiyah Pancurbata dilahirkan tahun 1928, Tebing Tinggi tahun 1929, dan Kisaran tahun 1929. Muhammadiyah Tapanuli (Padang Sidempuan) dilahirkan tahun 1930 yang merupakan pengembangan langsung dari Sumatera Barat, Pematang Siantar 1930, Tanjung Balai 1930, Kota Belawan 1933, pada tahun 1933 berdiri pula Muhammadiyah di Rantau Parapat dan Gunung Sitoli. Tahun 1936 berdiri pula Muhammadiyah di tanah Karo. Begitu seterusnya berbagai daerah bergerak dalam pembentukan Muhammadiyah sehingga untuk di Sumut Muhammadiyah merupakan organisasi terbesar dengan warga Muhammadiyah terbanyak dibandingkan NU. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern punya visi pembaharuan yakni memurnikan kembali Islam sebagai sebuah agama dan ajaran yang telah terkontaminasi dengan kebudayaan loka, agama Hindu, Budha, animisme, dinamisme yang sesungguhnya merusak ajaran Islam itu sendiri. Muhammadiyah dalam memahami dan mengamalkan Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah. Dua sumber ini menjadi landasan dasar bagi Muhammadiyah untuk memurnikan ajaran Islam.

Kini Muhammadiyah juga menjadi Organisasi masyarakat Islam modern terbesar di negeri ini. Bergerak dalam bidang amal sholeh dan amal usaha Muhammadiyah. Dalam konteks Sumut telah banyak pula melahirkan berbagai amal usaha baik dalam bidang pendidikan mulai TK hingga Perguruan Tinggi. Dalam bidang kesehatan Muhammadiyah memiliki Rumah Sakit yang kiprahnya tidak diragukan lagi dalam bidang sosial dan kesehatan. Begitu dorongan tumbuh dan berkembangnya amal usaha lainnya terus dilakukan seiring dengan perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Kehadiran Muhammadiyah tidak saja sebagai ormas tetapi merupakan ideologi dengan sistem keyakinan, cita-cita dan arah perjuangan bagi Muhammadiyah dan warganya.

3. Kekuatan Sosial Muhammadiyah di Sumatera Utara

Sosial mapping tentang eksistensi Muhammadiyah di Sumut cukup penting, Muhammadiyah tidak saja sebagai salah satu ormas keagamaan, tetapi peran dan eksistensinya di Sumut menjadi asset terpenting dalam membangun Sumut. Kiprah dan peran Muhammadiyah tidak diragukan lagi, seiring dengan perjalanan waktu Muhammadiyah muncul menjadi kekuatan sosial yang tidak saja dirasakan oleh kalangan Muhammadiyah di daerah ini, tetapi juga masyarakat Sumut. Terdapat beberapa indikator menjadi mapping sosial Muhammadiyah yakni jumlah penduduk, sumber ajaran, semangat pembaharuan dan pendidikan sebagaimana penjelasannya di bawah ini.

a. Jumlah Warga Muhammadiyah di Sumatera Utara

Menurut hasil survei Alvara Research Center tentang potret keberagaman muslim Indonesia, dengan estimasi menjadi dua kategori, berafiliasi Ormas dan keanggotaan Ormas. Menyebutkan Muhammadiyah menempati posisi kedua setelah NU dengan menempati jumlah 14,9 % mengaku berafiliasi dengan Muhammadiyah atau sekitar 22, 46 juta jiwa. Sedangkan keanggotaan Ormas berjumlah 6,3 % menjadi anggota Muhammadiyah atau sekitar 9,39 juta jiwa.¹⁹ Berdasarkan data tersebut jumlah warga Muhammadiyah tersebar di Indonesia termasuk di Sumut yang berbaur dengan penduduk yang terdapat di Kabupaten Kota. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

¹⁹ <https://hasanuddinali.com>. Menakar Jumlah Jamaah NU dan Muhammadiyah, diakses 02/09/2019

Tabel. 4

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten Kota, 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
	Kabupaten			
1	Nias	1842,51	136115	74
2	Mandailing Natal	6134,00	430894	70
3	Tapanuli Selatan	6030,47	275098	46
4	Tapanuli Tengah	2188,00	350017	160
5	Tapanuli Utara	3791,64	293399	77
6	Toba Samosi	2328,89	179704	77
7	Labuhan Batu	2156,02	462191	214
8	Asahan	3702,21	706283	191
9	Simalungun	4369,00	849405	194
10	Dairi	1927,80	279090	145
11	Karo	2127,00	389591	183
12	Deli Serdang	2241,68	2029308	905
13	Langkat	6262,00	1013385	162
14	Nias Selatan	1825,20	308281	169
15	Humbang Hasundutan	2335,33	182991	78
16	Pakpak Barat	1218,30	45516	37
17	Samosir	2065,05	123789	60
18	Serdang Bedagei	1900,22	608691	320
19	Batu Bara	922,20	400803	435
20	Padang Lawas Utara	3918,05	252589	64
21	Padang Lawas	3892,74	258003	66
22	Labuhan Batu Selatan	3596,00	313884	87
23	Labuhan Batu Utara	3570,98	351097	98
24	Nias Utara	1202,78	133897	111
25	Nias Barat	473,73	84917	179
	Kota			
26	Sibolga	41,31	86519	2094
27	Tanjung Balai	107,83	167012	1549
28	Pematang Siantar	55,65	247411	4445
29	Tebing Tinggi	31,00	156815	5059
27	Medan	265,00	2210624	8342
28	Binjai	59,19	264687	4472
29	Padang Sidempuan	114,66	209796	1830
30	Gunung Sitoli	280,78	135995	484
	Sumatera Utara	72981,23	13937797	191

Dari jumlah penduduk di atas, terlihat pula jumlah pemeluk agama di Sumatera Utara, dimana agama Islam merupakan pemeluk agama mayoritas yang didalamnya terdapat Ormas Muhammadiyah sebagai terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 5
Jumlah Pemeluk Agama di Sumut

Kota/Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	KHC	Jumlah
Nias	1,536	113,293	16,510	0	0	4	131,377
Mandailing Natal	386,771	12,452	454	10	16	0	404,945
Tapanuli Selatan	207,372	51,735	2,544	3	15	0	263,815
Tapanuli Tengah	132,932	141,013	36,146	18	208	3	311,232
Tapanuli Utara	13,301	251,991	12,815	2	139	5	279,257
Toba Samosir	10,738	147,894	11,424	37	74	5	173,129
Labuhan Batu	344,224	57,921	4,811	53	6,637	9	415,110
Asahan	594,366	61,161	4,513	109	6,848	11	668,272
Simalungun	468,328	302,302	42,132	128	1,965	13	817,720
Dairi	42,302	196,592	30,476	20	272	6	270,053
Karo	91,796	204,283	51,678	130	1,518	4	350,960
Deli Serdang	1,400,527	301,106	44,388	2,989	36,380	96	1,790,431
Langkat	876,405	75,001	3,997	409	7,676	20	967,535
Nias Selatan	7,394	223,843	58,123	6	31	2	289,708
Humbang Hasundutan	5,165	142,662	23,410	0	2	0	171,650
Pakpak Bharat	16,161	23,065	1,223	0	0	0	40,505
Samosir	1,884	69,947	47,575	8	5	1	119,653
Serdang Bedagai	497,855	79,502	8,299	207	7,264	43	594,383
Batu Bara	330,076	37,757	5,715	25	1,100	40	375,885
Padang Lawas Utara	200,459	20,838	832	3	12	0	223,531
Padang Lawas	213,948	10,777	379	0	5	0	225,259
Labuhan Batu Selatan	238,682	36,870	1,318	16	622	15	277,673

Labuhan Batu Utara	271,919	52,492	4,012	30	1,801	9	330,701
Nias Utara	6,894	99,529	20,676	2	1	0	127, 44
Nias Barat	1,621	64,417	15,740	2	12	1	81,807
Kota Sibolga	48,358	29,729	3,741	2	2,512	14	84,481
Kota Tanjung Balai	131,339	12,348	1,168	27	8,781	27	154,445
Kota Pematang Siantar	103,029	109,236	11,065	265	10,226	27	234,698
Kota Tebing Tinggi	113,344	18,689	1,327	217	10,313	70	145,248
Kota Medan	1,422,237	425,253	37,552	9,296	184,807	370	2,097,610
Kota Binjai	209,426	19,396	2,004	630	13,391	182	246,154
Kota Padang Sidempuan	172,290	17,123	878	0	670	5	191, 31
Kota Gunungsitoli	17,151	99,483	9,112	0	245	2	126, 02
Prov. Sumatera Utara	8,579,830	3,509,700	516,037	14,644	303,548	984	12,982,204

Berdasarkan tabel di atas, cukup terlihat jumlah warga Muhammadiyah berada dan berbaaur yang terdapat pada jumlah penduduk muslim sebanyak 8,579,830 tersebut yang tersebar dalam beberapa cabang dan ranting. Sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 6
Jumlah Cabang dan Ranting Muhammadiyah di Sumut

No	Daerah	Jumlah Cabang	Jumlah Ranting
1	Kota Medan	28	113
2	Kota Binjai	5	28
3	Kota Pematang Siantar	3	13
4	Kota Tebing Tinggi	4	13
5	Kabupaten Asahan	11	64
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	9	30
7	Kota Sibolga	3	11
8	Kabupaten Tapanuli Selatan	14	84

9	Kabupaten Langkat	8	43
10	Kabupaten Deli Serdang	6	47
11	Kabupaten Labuhan Batu	8	40
12	Kabupaten Simalungun	5	22
13	Kabupaten Nias	2	18
14	Kabupaten Karo	1	7
15	Kabupaten Dairi	1	4
16	Kabupaten Tapanuli Utara	4	10
17	Kabupaten Tanjung Balai	4	4
18	Kabupaten Mandailing Natal	8	33
19	Kabupaten Serdang Bedagei	5	20
21	Kabupaten Pakpak Barat	-	-
	TOTAL	129	604

(Sumber : Kesekretariatan PW Muhammadiyah Sumatera Utara 2015 - 2020)

b. Pokok – Pokok Pemikiran Ajaran Muhammadiyah

Muhammadiyah hadir, tidak terlepas menyahuti tuntutan sosial yang ketika itu dipandang penting untuk melakukan pembaharuan dan pemurnian terhadap pelaksanaan ajaran Islam yang dipandang tidak sesuai dengan Islam sesungguhnya. Terkontaminasinya ajaran Islam yang dibaurkan dengan pengaruh kepercayaan dan tradisi yang berkembang seperti ananisme dan dinanisme juga agama Budha dan Hindu menjadi perhatian serius oleh KH.Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Menurut Rifyal Ka'bah, penggunaan kata Muhammadiyah sebagai nama organisasi mengisyaratkan keinginan Muhammadiyah untuk kembali kepada ajaran murni Nabi Muhammad yang beliau terima dari Allah. Kemudian pada aspek lain penggunaan istilah Muhammadiyah sekaligus juga merupakan jawaban terhadap Umat Islam yang lebih bepegang kepada ajaran Mazhab tertentu seperti Syafiiyah, Naqsanadiyah dan lain – lain daripada ajaran Nabi Muhammad sendiri yang diistilah sebagai Muhammadiyah.²⁰

Rifyal Ka'bah, menambahkan pemahaman yang berpegang

²⁰ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, h. 93

kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini dapat dilihat dari tujuh pokok pikiran yang menjadi inti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pokok – Pokok pikiran tersebut disarikan dari pikiran dan cita – cita KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah) oleh Ki Bagus Hadikusuma (Ketua Pengurus Muhammadiyah tahun 1942 – 1953) bersama teman – teman dekatnya dan disahkan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1961 yang berbunyi :

1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid (mengesakan) Allah: ber-Tuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah....
2. Hidup itu bermasyarakat.....hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya adalah satu satunya yang dapat dijadikan sendi untu membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (bermasyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat.....
3. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar – benarnya adalah wajib, sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/masyarakat.....
4. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar – benar nya, hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikut jejak (iitiba’) perjuangan Nabi, terutama perjuangan Nabi Besar Muhammad SAW.....
5. Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan berhasil, bila dengan cara organisasi. Organisasi adalah satau – satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik – baiknya.....
6. Pokok – poko pikran, prinsip – prinsip pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu, adalah yang dapat mewujudkan, keyakinan dan cita – cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita – citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir bathin yang diridhai Allah ialah MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR – BENARNYA.²¹

²¹ *Ibid.*, h. 93 - 94

Pokok – pokok pemikiran di atas merupakan inti dari ajaran Muhammadiyah yang digagas oleh KH Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah. Keinginan untuk mengikuti jejak Nabi yakni Nabi besar Muhammad SAW. Mengikuti Nabi ini merupakan salah satu inti pikiran Muhammadiyah yang dapat dilihat dari Keputusan Lajnah Tarjihnya. Mengikuti, mengamalkan dari Nash (Alquran– Sunnah) menjadi kekuatan besar dari masyarakat Muhammadiyah dalam perkembangannya. Organisasi Muhammadiyah tidak saja diikuti oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga dapat dikembangkan di Mancanegara. Ini menunjukkan Muhammadiyah telah eksis dimanapun ia berada. Bahkan Muhammadiyah turut menjadi kekuatan sosial yang tidak saja dirasakan oleh kalangan Muhammadiyah itu sendiri tetapi pula di luar Muhammadiyah. Atas dasar pikiran ini menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi membawa gerakan Islam berkemajuan, dimana prinsip gerakan tersebut masuk dalam seluruh aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

c. Amal Usaha

Salah satu kehebatan luar biasa dari Muhammadiyah termasuk di Sumut adalah membangun amal usaha, dengan tujuan menciptakan Muhammadiyah mandiri dalam bentuk berbagai amal usaha. Menurut Rifyal Kab'bah,²² sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Muhammadiyah terdepan dalam mengelola berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, panti asuhan, penyuluhan, kebajikan dan lainnya yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya. Sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini

²² *Ibid.*, h. 91

Tabel 7

Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah Sektor Pendidikan

NO	DAERAH	TPA	TK	SD	SMP	SMA	SMEA	STM	MDA	MIB	MATS	MAL	PON PES	PT
1	Kota Medan	43	42	28	16	4	4	1	48	0	2	0	0	1
2	Kota Binjai	5	4	5	2	1	1	0	10	0	2	2	1	0
3	Kota Pematang Siantar	1	2	3	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0
4	Kota Tebing Tinggi	2	4	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0
5	Kabupaten Asahan	1	11	12	6	1	2	0	9	6	3	3	0	2
6	Kab. Tapanuli Tengah	0	5	9	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0
7	Kota Sibolga	2	4	2	1	1	1	0	2	1	1	0	0	1
8	Kabupaten Tapanuli Selatan	0	6	13	3	1	0	0	22	5	3	1	1	1
9	Kabupaten Langkat	6	4	4	4	3	0	0	12	0	1	1	0	0
10	Kabupaten Deli Serdang	1	4	4	3	1	0	0	9	2	5	2	0	0
11	Kab. Labuhan Batu	0	7	7	4	2	1	0	2	4	0	0	0	0
12	Kab. Simalungun	0	6	2	4	2	0	0	2	1	1	1	1	0
13	Kab. Nias	0	5	2	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0
14	Kabupaten Karo	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
15	Kabupaten Dairi	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
16	Kab. Tapanuli Utara	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17	Kota Tanjung Balai	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18	Kab. Mandailing Natal	0	4	7	3	1	0	0	0	2	5	2	0	0
19	Kab. Serdang Bedagei	0	2	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
21	Kab. Pakpak Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	61	115	106	54	18	11	1	132	28	25	13	3	5

(Sumber : Kesekretaritan PW Muhammadiyah Sumatera Utara 2015 - 2020)

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, amal usaha yang dirikan Muhammadiyah terutama dalam sektor pendidikan cukup berkontribusi

besar kepada masyarakat Sumut. Pendidikan yang didirikan mulai dari TPA hingga Perguruan Tinggi turut mencerdaskan anak bangsa terutama di daerah Sumatera Utara. Kondisi ini menunjukkan Muhammadiyah menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat, daerah maupun bangsa ini.

d. Sumber Daya Manusia

Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup tinggi. SDM Muhammadiyah tersebut terlibat dalam berbagai peran dan profesi dalam negeri ini. Mulai dari keterlibatan memerdekakan bangsa ini dari kaum penjajah, hingga turut serta sebagai elit – elit negara dari masa ke masa hingga hari ini. Kapasitas dan kemampuan SDM Muhammadiyah tidak diragukan lagi. Dari latar belakang keilmuan yang berbeda dan corak pemikiran yang berbeda cukup ditemukan di Muhammadiyah. Karena itu Muhammadiyah dipanggil atau tidak dipanggil siap berkiprah dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan daerah dan negara. Karena Muhammadiyah memiliki kader-kader yang luar biasa yang siap berkiprah dimanapun diminta.

Dalam konteks Muhammadiyah di Sumut, SDM yang dimiliki juga tidak diragukan lagi, perkembangan Muhammadiyah seiring dengan lahirnya para intelektual yang memiliki SDM yang luar biasa. Para SDM tersebut duduk sebagai pengurus struktural Muhammadiyah dan mengisi berbagai jabatan penting di jalur publik. Mulai dari pemerintahan, politisi, akademisi, dan lainnya menjadi kekuatan sosial tersendiri bagi Muhammadiyah. Hal ini juga ditegaskan oleh Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ketika dalam penyampaian Pidato Milad Muhammadiyah 106 bertempat di Gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengungkap terdapat lima point penting yang menyebabkan Muhammadiyah dapat bertahan hingga saat ini yaitu : *Pertama*, Muhammadiyah memiliki gerakan Islam berkembang memecahkan keadaban bangsa dimana prinsip gerakan tersebut memasuki seluruh aspek kehidupan. *Kedua*, Muhammadiyah tumbuh dan besar saat ini karena Muhammadiyah memiliki SDM luar biasa, SDM yang cerdas dan memiliki

nalar dan daya kritis yang kuat. *Ketiga*, Muhammadiyah memiliki kekuatan dalam sistem organisasinya yang tumbuh mandiri. *Keempat*, Muhammadiyah memiliki kiprah amal usaha mulai dari bidang pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya. *Kelima*, Muhammadiyah memiliki hadir untuk memberikan pencerahan dan peradaban bangsa dan sumber yang dinamis, maju, progresif yang senantiasa beristiqamah melnjalan misi dakwah dan tajdidi untuk menjadikan Indonesia berkemajuan.²³ SDM menjadi salah gerakan yang penting yang dibangun Muhammadiyah dalam membangun kekuatan sosial. Karena sebagaimana kita ketahui fungsi SDM itu berfungsi sebagai manajerial dan fungsi operasional Muhammadiyah itu sendiri. Dengan kata lain maju atau mundurnya Muhammadiyah tergantung SDM yang dimilikinya. Maka eksistensi SDM menjadi penting bagi Muhammadiyah, yang sengaja senantiasa disiapkan yang tidak saja membangun Muhammadiyah tetapi juga berkiprah untuk bangsa dan negara.

e. Manajemen Organisasi Muhammadiyah.

Muhammadiyah lahir, tumbuh, berkembang dan maju disebabkan oleh faktor manajemen organisasinya cukup baik. Hal ini diakui oleh Haedar Nashir di atas dalam penyampaian Pidato Milad Muhammadiyah 106 bertempat di Gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengungkap terdapat lima point penting yang menyebabkan Muhammadiyah dapat bertahan hingga saat ini salah satu diantaranya faktor Muhammadiyah memiliki kekuatan dalam sistem organisasinya yang tumbuh mandiri.²⁴ Tentunya manajemen Muhammadiyah adalah Manajemen organisasi selalu diartikan proses pengelompokan, pengaturan, pembagian tugas dari sumber daya manusia yang merupakan penunjang jalannya suatu organisasi ke dalam suatu pola tertentu sehingga komponen organisasi (manusia)

²³M.muhammadiyah,or.id> news, Lima Prinsip Gerakan Menjadi Kekuatan Muhammadiyah Bertahan Maju. Diakses, 05/09/2019

²⁴M.muhammadiyah,or.id> news, Lima Prinsip Gerakan Menjadi Kekuatan Muhammadiyah Bertahan Maju. Diakses, 05/09/2019

yang ada di dalamnya dapat bekerjasama dengan baik, memiliki daya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditetapkan

Muhammadiyah menerapkan manajemen mandiri tanpa terkecuali di Sumut. Mandiri yang dimaksudkan dalam menjalankan organisasinya Muhammadiyah memiliki berbagai potensi yang cukup tinggi. Salah satu diantaranya adalah amal usaha Muhammadiyah menjadi aset terpenting dalam membesarkan Muhammadiyah. Dalam konteks Sumut amal usaha tersebut terdiri dari sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 8

Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah Sektor Pendidikan

NO	DAERAH	TPA	TK	SD	SMP	SMA	S EA	STM	MDA	MIB	MATS	MAL	PON PES	PT
1	Kota Medan	43	42	28	16	4	4	1	48	0	2	0	0	1
2	Kota Binjai	5	4	5		1	1	0	10	0	2	2	1	0
3	Kota Pematang Siantar	1	2	3		0	1	0	3	1	0	0	0	0
4	Kota Tebing Tinggi	2	4	1		0	0	0	6	1	0	0	0	0
5	Kabupaten Asahan	1	11	12	6	1	2	0	9	6	3	3	0	2
6	Kab. Tapanuli Tengah	0	5	9		0	1	0	1	0	1	0	1	0
7	Kota Sibolga	2	4	2		1	1	0	2	1	1	0	0	1
8	Kabupaten Tapanuli Selatan	0	6	1	3	1	0	0	22	5	3	1	1	1
9	Kabupaten Langkat	6	4	4		3	0	0	12	0	1	1	0	0
10	Kabupaten Deli Serdang	1	4	4		1	0	0	9	2	5	2	0	0
11	Kab. Labuhan Batu	0	7	7		2	1	0	2	4	0	0	0	0
12	Kab. Simalungun	0	6	2		2	0	0	2	1	1	1	1	0
13	Kab. Nias	0	5	2		0	0	0	3	0	1	0	0	0
14	Kabupaten Karo	0	1	1		0	0	0	0	3	0	1	0	0
15	Kabupaten Dairi	0	1	0		0	0	0	2	0	0	0	0	0
16	Kab. Tapanuli Utara	0	1	3		0	0	0	1	0	0	0	0	0
17	Kota Tanjung Balai	0	1	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0

18	Kab. Mandailing Natal	0	4	7		1	0	0	0	2	5	2	0	0
19	Kab. Serdang Bedagei	0	2	2		1	0	0	1	1	1	0	0	0
21	Kab. Pakpak Barat	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	61	115	106	54	18	11	1	132	28	25	1	3	5

(Sumber : Kesekretaritan PW Muhammadiyah Sumatera Utara 2015 - 2020)

Melalui bentuk amal usaha Muhammadiyah di atas, Muhammadiyah Sumut tampil dan besar dengan manajemen organisasi mandiri. Muhammadiyah mampu dan berdiri di atas kakinya sendiri. Berbagai amal usaha yang dikembangkan mulai sektor pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya menjadikan Muhammadiyah berkemampuan secara materi yang tentunya tidak saja dirasakan oleh kalangan Muhammadiyah, tetapi juga berkontribusi besar terhadap masyarakat di daerah ini. Ini menjadi kekuatan sosial bagi Muhammadiyah terhadap masyarakat dan daerahnya.

f. Persatuan dan Kesatuan

Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di Indonesia menjadikan Muhammadiyah berkembang pesat baik di dalam negeri maupun mancanegara. Salah satu faktor keberhasilan Muhammadiyah adalah kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan (ukhuwah) yang tidak saja terbangun di internal Muhammadiyah tetapi juga dengan warga non Muhammadiyah. Semangat persatuan ini dibangun atas dasar dari semangat pokok – pokok pikiran ajaran Muhammadiyah itu sendiri. Yakni nilai – nilai yang diajarkan oleh agama yang dituangkan dalam Alquran dan Sunnah menjadi misi penting membangun ukhuwah baik secara internal maupun eksternal.

Semangat membangun persaudaraan juga menjadi komitmen bersama di kalangan Muhammadiyah Sumut. Hal ini sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh warga Muhammadiyah. Atas dasar inilah Muhammadiyah tampil menjadi kekuatan sosial di Sumut. Muhammadiyah menjadi organisasi yang dapat melindungi semua

komponen masyarakat. Karena ia mempunyai kekuatan sosial yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

4. Kekuatan Ekonomi Muhammadiyah di Sumatera Utara

Belum ada data terbaru yang menjelaskan secara akurat tentang mapping ekonomi warga Muhammadiyah khususnya di Sumut. Namun dilihat berdasarkan amal usaha yang ada, menunjukkan secara ekonomi Muhammadiyah lebih maju dari organisasi lainnya seperti NU dan Al – Washliyah. Untuk lebih jelasnya terlihat pada penjelasan di bawah ini :

a. Kondisi Ekonomi Muhammadiyah di Sumut.

Muhammadiyah salah satu ormas yang memiliki badan amal usaha yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi lainnya. Berbagai amal usaha tersebut dikelola secara central dan memiliki manajemen yang baik mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya. Ini menjadi modal dan aset penting tidak saja membesar Muhammadiyah secara organisasi, tetapi turut dirasakan oleh kalangan Muhammadiyah itu sendiri. Atas dasar itu jika dilihat kondisi Muhammadiyah secara ekonomi lebih maju dari ormas lainnya. Artinya Muhammadiyah boleh dikatakan berada pada kondisi ekonomi menegah ke atas. Melalui lembaga pendidikan mulai TK hingga Perguruan Tinggi Muhammadiyah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Melalui pendirian Rumah Sakit, Muhammadiyah juga mampu menyiapkan tenaga kerja yang turut membantu masyarakat. Begitupula sektor lainnya. Disinilah keberhasilan Muhammadiyah dapat berdiri di kaki sendiri yakni dengan konsep manajemen kemandiriannya yang telah berhasil dan terukur.

Kondisi ekonomi organisasi yang baik ini sesungguhnya menjadikan kekuatan sosial dan ekonomi tersendiri bagi Muhammadiyah. Sekaligus Muhammadiyah menjadi aset daerah yang harus di apresiasi dan ekspektasi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah ini. Sumut cukup berbagga dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah

memberikan kiprah yang besar dan terukur kepada masyarakat dan daerah di Sumut. Muhammadiyah memberikan bukti nyata akan peran – peran yang telah dilakukannya. Melalui lembaga pendidikannya Muhammadiyah telah mencerdaskan generasi muda di Sumut. Melalui Rumah Sakit yang didirikan telah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan masyarakat sedikit banyaknya terbantu dengan keberadaan layanan masyarakat tersebut. Seiring dengan Muhammadiyah semakin meningkatkan kualitas amal usaha dan kuantitas yang dikembangkan.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Muhammadiyah melalui amal usaha yang ada tidak pernah berhenti membangun ekonomi masyarakat. Karena prinsip ajaran Muhammadiyah mengajarkan bahwa Muhamamdiyah adalah bagian dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar bersentuhan kepada masyarakat termasuk dalam hal ini membantu masyarakat miskin. Gerakan pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dengan dimulainya pembentukan Majelis Ekonomi Muhammadiyah yang substansinya merumuskan dasar, tujuan, serta sistem ekonomi menurut ajaran Islam. Kemudian menggerakkan dan menghimpun kegiatan – kegiatan ekonomi perserikatan sesuai bakat masing – masing yang sesuai dengan ajaran Islam. Atas dasar ini, menurut Triyadi, gerakan ekonomi Muhammadiyah yang dilakukan Majelis Ekonomi Muhammadiyah dilakukan dalam bentuk : *Pertama*, pengembangan badan usaha milik Muhammadiyah sebagai bentuk refsentasi dari kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. *Kedua*, pengembangan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. *Ketiga*, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha– usaha milik anggota Muhammadiyah.²⁵

Dalam perjalanannya Majelis Ekonomi Muhammadiyah berhasil dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdirinya

²⁵<https://3yadi.weebly.com>>agama, Muhammadiyah dan Permebrdayaan Ekonomi Masyarakat. Diakses, 07/09/2019

amal – amal usaha yang dibangun oleh Muhammadiyah sesungguhnya adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk usaha Muhammadiyah adalah mendorong banyak terbentuknya koperasi seperti koperasi Surya Mart di Makasar. Pemberdayaan juga bergerak dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, nelayan, peternak dan yang lainnya yang berkerjasama dengan berbagai pihak. Pemberdayaan ekonomi tidak kalah pentingnya dilakukan di Sumut, dengan mendirikan koperasi, tujuannya adalah membantu masyarakat baik secara konsumtif maupun produktif. Untuk menopang itu Muhammadiyah telah mendirikan Lembaga Zakat, Infak dan Shadakah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan harta secara produktif dan konsumtif.

Dengan kata lain apa yang telah dilakukan Muhammadiyah terutama di Sumut dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak diragukan lagi. Berbagai amal usaha Muhammadiyah terus bergerak dan berkembang untuk membantu kepentingan sosial dengan berbagai program pemberdayaan, sesungguhnya ini menjadi kekuatan ekonomi bagi Muhammadiyah sendiri. Sekaligus berkontribusi kepada masyarakat luas.

C. Al - Jam'iatul Washliyah

1. Sejarah Singkat Pendirian Al-Jam'iatul Washliyah di Sumatera Utara

Salah satu organisasi juga terbesar di Indonesia adalah Al-Jam'iatul Washliyah. Kalau Muhammadiyah dan NU dilahirkan di Jawa, Al-Jam'iatul Washliyah (baca: Al-Washliyah) lahir di di Kota Medan pada tanggal 30 Nopember 1930 dan bertepatan tanggal 9 Rajab 1349 H. Lahirnya Al-Jam'iatul Washliyah juga tidak terlepas menyikapi kondisi sosial dan politik di Medan, dimana adanya potensi perpecahan perastuan dan kesatuan yang diciptakan oleh Kolonial Penjajah Belanda dengan cara mengadu domba rakyat supaya tidak melawan Belanda. Jika rakyat terpecah semakin memudahkan untuk

menguasai dan melumpuhkannya. Pola perpecahan dilakukan Belanda cukup beragam bahkan menjerus aspek agama Islam, sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Medan. Perpecahan pendapat persoalan agama, menjadikan Belanda ikut campur sehingga akibat perbedaan tersebut menjadikan umat Islam terpecah kepada dua kelompok yang disebut dengan Kaum Tua dan Kaum Muda. Perselisihan persoalan agama yang terus terjadi, menjadi kekhawatiran bagi sekelompok pelajar yang di belajar di Madrasah Islamiyah Tapanuli (MIT) Medan.²⁶

Apalagi para pelajar ini memiliki kelompok diskusi yang bernama *Debating Club* (Perkumpulan Debat) yang sering mereka berkumpul mendiskusikan banyak hal termasuk keresahan rakyat yang terjadi. Pada bulan Oktober 1930 kelompok diskusi menggelar kegiatan diskusi di kediaman Yusuf Ahmad Lubis di Jln. Gelugur Medan. Dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Abdurrahman Syihab dihadiri oleh Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur,, M.Isa dan beberapa pelajar lainnya. Salah hasil keputusan adalah memperbesar kelompok diskusi yang dinamai dengan *Debating Club*. Diskusi lanjutan digelar kemudian di rumah Abdurrahman Syihab di Petisah Kota Medan dihadiri oleh Ismail Banda, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, Abdul Wahab dan M.Isa. Hasil rapat untuk menggelar kembali diskusi lanjutan dengan menghadirkan para ulama dan tuan – tuan guru dan pelajar lainnya yang direncanakan rapat besar dilaksanakan di MIT Medan pada tanggal 26 Oktober 1930.

Sesuai dengan kesepakatan bersama, maka pertemuan diskusi dilangsungkan di MIT yang dihadiri oleh para ulama, guru – guru, pelajar dan pemimpin Islam di kota Medan. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ismail Banda, maka dalam forum tersebut sepakat membentuk sebuah perkumpulan yang bertujuan memajukan, mementingkan dan menambahkan tersyairnya agama Islam. Untuk

²⁶Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) Medan, adalah madrasah kecil yang satu – satunya sekolah Islam yang ada di Kota Medan. Yang terletak jauh dari keramaian yang berada di dekat Sungai Deli. Para guru yang mengajar madrasah tersebut adalah Syech H. Ja'far Hassan, Syech H. Muhammaad Yunus dan Syech H. Yahya, mereka ini adalah para guru keilmuan yang tidak diragukan lagi.

memperkumpulan perkumpulan dibutuhkan sebuah nama dan meminta kepada Syekh H. Muhammad Yunus,²⁷ selaku salah seorang guru di MIT yang cukup dihormati. Permintaan dari murid – murid tersebut beliau terima dengan catatan untuk melakukan shalat dua rakaat dan berdoa kepada Allah SWT setelah mendapat petunjuk, beliau beri nama perkumpulan tersebut nama “ Al-Jam’iatul Washliyah” artinya perhimpunan yang menghimpunkan. Al-Jam’iah atau jamaah berarti perkumpulan atau perhimpunan, sedangkan kata al – Washliyah atau Washolah artinya menghubungkan. Dengan demikian Al-Jam’iatul Washliyah adalah perkumpulan atau perhimpunan yang menghubungkan. Setelah mendapat nama Al-Jam’iatul Washliyah maka pada tanggal 30 Nopember 1930 di MIT yang terletak di Jln. Hindun Medan, Al-Jam’iatul Washliyah dideklarasikan bersamaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan yang lengkap dihadiri oleh masyarakat sekitar Kota Medan. Susunan komposisi pengurus pertama terdiri dari Syekh H. Muhammad Yunus (Penasehat), Ismail Banda (Ketua 1), Abdurrahman Syuhab (Ketua II), M. Arsyad Thalib Lubis (Penulis I), Adnan Nur (Penulis II), M. Ya’cub (Bendahara).

²⁷Almarhum Syekh Mohammad Yunus, salah seorang guru besar yang berjasa dalam pendirian Al-Jam’iatul Washliyah. Beliau dilahirkan di Kampung Percukaian, Binjai Kabupaten Langkat tahun 1889. Orang tuanya H. Mohd Arsyad berasal dari Tanjung Medan Gunung Beringin Penyabungan Tapsel. Sejak kecilnya beliau sangat rajin menuntut ilmu pengetahuan walaupun dalam aspek ekonomi mengalami kesulitan. Pendidikannya dimulai di Kampung Percukaian Binjai, Titi Gunung Binjai dengan Syekh Abd Mutalib dan di Besilam Langkat mempelajari ilmu fikih dan Mantiq. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Dorga Kedah dengan Syekh Mohd. Idris Petani dan Kedah, terus ke Mekkah belajar dengan Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Kadir Mandailing, Syekh Abdul Hamid dan lainnya. Setelah kembalinya dari Mekkah beliau mengajar di beberapa tempat di Medan dan memimpin Maktab Islamiyah Tapanuli Medan. Pada tanggal 07 Juli 1960 atau 1 Syawal 1368 beliau meninggal dunia di rumah kediamannya sendiri Jln Padang Bulan No 189 Medan. Buah hasil pendidikannya kepada murid – muridnya, hampir sebagian besar dari pemimpin dan ulama yang berada di Sumatera Timur adalah murid – muridnya diantaranya Alm H. Ismail Banda, H Abd Rahman Syihab, H. Bahrudin Ali, H. Abdul Aziz, H. Abdul Wahab dan lainnya. Lihat, Ahmad Nasution, *Sejarah Ulama Terkemuka di Sumatera Utara* (Medan : Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 1975) h. 105 - 108

Para pembantu adalah A. Malik dan A. Aziz Effendi. Mereka yang menjadi inisiator pendiri Al-Jam'iatul Washliyah merupakan kelompok anak – anak muda yang rata berumur 20 – 26 tahun yang mempunyai visi dalam memperjuangkan Islam mulai dari bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, politik dan lainnya.

2. Kekuatan Sosial Al-Jam'iatul Washliyah

Mapping sosial Al-Jam'iatul Washliyah menjadi penting dilakukan, untuk melihat pemetaan kekuatan sosial eksistensi Al-Jam'iatul Washliyah terutama di Sumut, dengan beberapa indikator dilakukan mulai menakar jumlah warga Al-Jam'iatul Washliyah, pokok – pokok pikiran Al-Jam'iatul Washliyah, Manajemen organisasi, SDM dan lainnya. Pada penjelasan di bawah ini diuraikan satu persatu.

a. Jumlah Warga Al-Jam'iatul Washliyah

Dalam perjalanannya Al-Jam'iatul Washliyah telah berkibar dimana – mana bahkan Pengurus Besar Al-Jam'iatul Washliyah (PB Al-Washliyah) berada di tingkat Pusat dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Pimpinan Wilayah Al-Jam'iatul Washliyah (PW Al-Washliyah) untuk tingkat provinsi dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Pimpinan Daerah Al-Jam'iatul Washliyah (PD Al-Washliyah) untuk tingkat Kab/Kota berkedudukan di Kab/Kota. Pimpinan Cabang Al-Jam'iatul Washliyah (PC Al-Washliyah) untuk tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan. Sedangkan Pimpinan Ranting Al-Jam'iatul Washliyah (PR Al-Washliyah) untuk tingkat Desa/Kelurahan dan berkedudukan di desa /Kelurahan. Dilihat dari jumlah warga Al-Jam'iatul Washliyah, tentunya telah tersebar dimana – mana baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun dalam konteks Sumut warga Al-Jam'iatul Washliyah merupakan jumlah penduduk mayoritas dibandingkan Muhammadiyah dan NU. Hal ini disebabkan bahwa Al-Jam'iatul Washliyah menjadi basis di Sumut, karena Al-Jam'iatul Washliyah dilahirkan di Sumut dan termuda setelah Muhammadiyah dan NU. Dari jumlah mayoritas waga Al-Jam'iatul Washliyah terlihat berdasarkan jumlah penduduk

muslim di Sumatera Utara lebih kurang 8,579,830 jiwa. Belum ada data yang signifikan terkini Al-Jam'iatul Washliyah. Namun dapat disimpulkan dari jumlah penduduk mayoritas muslim adalah Al-Jam'iatul Washliyah. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini

Tabel. 9
Jumlah Pemeluk Agama di Sumut

Kota/Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	KHC	Jumlah
Nias	1,536	113,293	16,510	0	0	4	131,377
Mandailing Natal	386,771	2,452	454	10	16	0	40 ,945
Tapanuli Selatan	207,372	1,735	2,544	3	15	0	26 ,815
Tapanuli Tengah	132,932	141,013	36,146	18	208	3	311,232
Tapanuli Utara	13,301	251,991	12,815	2	139	5	279,257
Toba Samosir	10,738	147,894	11,424	37	74	5	173,129
Labuhan Batu	344,224	7,921	4,811	53	6,637	9	41 ,110
Asahan	594,366	1,161	4,513	109	6,848	11	668,272
Simalungun	468,328	302,302	42,132	128	1,965	13	817,720
Dairi	302	196,592	30,476	20	272	6	270,053
Karo	91,796	204,283	51,678	130	1,518	4	350,960
Deli Serdang	1,400,527	301,106	44,388	2,989	36,380	96	1,790,431
Langkat	876,405	5,001	3,997	409	7,676	20	967,535
Nias Selatan	7,394	223,843	58,123	6	31	2	289,708
Humbang Hasundutan	5,165	1 662	23,410	0	2	0	171,650
Pakpak Bharat	16,161	23,065	1,223	0	0	0	40,505
Samosir	1,884	9,947	47,575	8	5	1	11 ,653
Serdang Bedagai	497,855	9,502	8,299	207	7,264	43	594,383
Batu Bara	330,076	7,757	5,715	25	1,100	40	375,885
Padang Lawas Utara	200,459	0,838	832	3	12	0	22 ,531
Padang Lawas	213,948	0,777	379	0	5	0	22 ,259
Labuhan Batu Selatan	238,682	6,870	1,318	16	622	15	277,673

Labuhan Batu Utara	271,919	52,492	4,012	30	1,801	9	330,701
Nias Utara	6,894	99,529	20,676	2	1	0	127,244
Nias Barat	1,621	64,417	15,740	2	12	1	81,807
Kota Sibolga	48,358	29,729	3,741	2	2,512	14	84,481
Kota Tanjung Balai	131,339	12,348	1,168	27	8,781	27	154,445
Kota Pematang Siantar	103,029	109,236	11,065	265	10,226	27	234,698
Kota Tebing Tinggi	113,344	18,689	1,327	217	10,313	70	145,248
Kota Medan	1,422,237	425,253	37,552	9,296	184,807	370	2,097,610
Kota Binjai	209,426	19,396	2,004	630	13,391	182	246,154
Kota Padang Sidempuan	172,290	17,123	878	0	670	5	191,531
Kota Gunungsitoli	17,151	99,483	9,112	0	245	2	126,202
Prov. Sumatera Utara	8,579,830	3,509,700	516,037	14,644	303,548	984	12,982,204

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk muslim di Sumut sekitar 8,579,830 data ini terbagi kepada jumlah warga Ormas yang ada mulai Muhammadiyah, NU hingga Al-Jam'iatul Washliyah dan lainnya. Namun warga Al-Jam'iatul Washliyah sebagai warga mayoritas Ormas di Sumut. Jumlah yang besar ini tentunya menjadi kekuatan sosial bagi Al-Jam'iatul Washliyah. Ormas yang besar selalu diukur dengan jumlah warga pemeluk Ormas tersebut, Al-Jam'iatul Washliyah telah membuktikan sebagai ormas terbesar di daerah ini.

b. Pokok – Pokok Pikiran Al-Jam'iatul Washliyah

Kekuatan sosial, ekonomi, politik dan lainnya dimiliki oleh Al-Jam'iatul Washliyah tidak terlepas kepada pokok-poko pikiran yang dikembangkan oleh pendiri Al-Jam'iatul Washliyah. Pada awal pembentukannya organisasi al-Washliyah memiliki misi yakni : (1). Mengusahakan berlakunya hukum-hukum Islam. (2). Memperbanyak tabliq,

tazkir dan pengajian – pengajian di tengah umat Islam. (3). Menerbitkan kitab – kitab, surat kabar, majalah, surat – surat siaran dan mengadakan taman bacaan. (4). Membangun Perguruan dan mengatur kesempurnaan pelajaran, pendidikan dan kebudayaan (5). Menyantuni fakir miskin dan memelihara serta mendidikan anak yatim piatu. (6). Menyampaikan seruan Islam kepada orang-orang yang belum beragama Islam (7). Mendirikan dan memelihara dan memperbaiki tempat beribadat. (8). Memajukan dan menggembirakan penghidupan dengan jalan yang halal. Penamaan Al-Jam'iatul Washliyah yang artinya perkumpulan atau perhimpunan yang menghubungkan, baik yang menghubungkan manusia kepada Allah (*hablun minallah*) dan menghubungkan manusia dengan manusia (*hablun minan nas*). Pokok-pokok pikiran ini menjadi prinsip penting bagi Al-Jam'iatul Washliyah mengembangkan gerakannya. Pikiran pertama membangun kedekatan kepada Allah sebagai ajaran dasar untuk bertauhid sebagai kewajiban hakiki yang dilakukan oleh seorang muslim. Ibadah yang bersifat vertika kepada sang Pencipta dalam penguatan tauhid antara seorang hamba dengan khaliqnya. Selanjutnya adalah pokok pikiran membangun kekuatan dalam hubungannya manusia dengan manusia. Ibadah yang bersifat horizontal membangun persaudaraan antara sesama baik seagama maupun persaudaraan sebangsa dan setanah air.

Dalam aspek hukum Islam terkait dengan pengamalan ajaran Islam, Al-Jam'iatul Washliyah mendekati kepada NU. Seperti terlihat dalam landasan ideologi dijelaskan pada Anggaran Dasar al-Washliyah pada pasal 2 tercantum azas al-Washliyah. Perkumpulan ini berazaskan pada ajaran Islam dalam hukum fikih bermazhab Syafii. dan dalam i'tiqad Ahlu Sunnah wal –Jamaah.²⁸ Berdasarkan anggaran dasar menganut mazhab Syafii, fatwa – fatwa al-Washliyah dan pengamalan warganya adalah mengikut kitab – kitab fikih karya para ulama Syafiiyah, seperti karya Imam ar-Rafii (w.632 H) Ibn Hajar al-Asqalani (852–773) dan Imam ar-Ramli (w.1004). Namun pada Mukhtamar Bandung al-Washliyah merevisi Anggaran Dasarnya di bidang fikih dari Mazhab

²⁸AD/ART Al-Jam'iatul Washliyah, 2010, Cet ke 1, h. 5

Syafii, artinya fatwa-fatwa hukum sesudah itu tidak lagi terikat secara ketat kepada pendapat ulama Syafii dengan mengambil pendapat diluar fikih Syafii. Dalam bidang Akidah Al-Jam'iatul Washliyah dari berdirinya sampai saat ini menganut aliran ahli sunnah wal-jamaah. Pendiri aliran ini adalah Abu Hasan al-Asyari (270 – 324 H). Paham Al-Jam'iatul Washliyah dalam bidang akidah dapat dilihat dari melalui fatwa al-Washliyah dari kitab – kitab yang menjadi silabus di madrasah Al-Jam'iatul Washliyah.²⁹

Dengan kata lain setiap gerakan, cita – cita dan usaha Al-Jam'iatul Washliyah haruslah sesuai dengan syariat Islam. Mengamalkan ajaran Islam ahlu sunnah wal – jamaah. Segala praktek ibadah mahdhdah terdapat persamaan antara Al-Jam'iatul Washliyah dengan NU. Hal ini dipandang wajar Al-Jam'iatul Washliyah lebih termuda daripada NU, berafiliasi kepada NU lebih dekat dibandingkan dengan Muhammadiyah. Tidak tertutup kemungkinan sejarah pendirian Al-Jam'iatul Washliyah diinisiasi oleh para pemuda dan tuan guru yang dekat berafiliasi dengan NU. Menjalan prinsip pokok pikiran ini menjadikan Al-Jam'iatul Washliyah berkembang di Sumut. Dapat dipastikan mulai dari Kota Medan hingga daerah Pesisir di Sumatera Utara merupakan menjadi basis dari Al-Jam'iatul Washliyah.

c. Manajemen Organisasi Al-Jam'iatul Washliyah

Faktor berikut mengukur kekuatan sosial pada Al-Jam'iatul Washliyah adalah melalui manajemen organisasi yang dijalankannya. Al-Jam'iatul Washliyah tampil dalam manajemen mandiri, manajemen organisasi yang dari dahulu dikelola melalui kemandirian organisasi dengan sektor pendayagunaan yang dapat mengembangkan Al-Jam'iatul Washliyah itu sendiri. Mulai dari sektor pendidikan, sosial, politik dan lainnya. Atas dasar konsep ini Al-Jam'iatul Washliyah akan menjadi organisasi yang maju dan modern. Kiprah dan gerakan

²⁹Kabarwashliyah.com>2014/01/21, Akidah Al-Jam'iatul Washliyah: Kabar Washliyah Diakses, 07/09/2019

dakwah, pendidikan serta amal sosial menjadi manajemen kuat dalam membesarkan Al-Jam'iatul Washliyah.

Melalui manajemen organisasi yang mandiri ini Al-Jam'iatul Washliyah, tetap eksis zaman perzaman dalam kontribusinya mencerdaskan anak bangsa, mencetak kader ulama dan generasi muda melalui pendidikan Al-Washliyah mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai kepada Perguruan Tinggi. Al-Jam'iatul Washliyah terus memberikan baktinya kepada masyarakat khususnya Sumatera Utara dalam manajemen yang maju dan modern. Manajemen yang baik menjadi cita-cita bersama tidak saja pada Al-Jam'iatul Washliyah juga terkait dengan lembaganya. Suatu ketika Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Al-Washliyah Dr. Aziziah dalam acara HUT organisasi Al-Jam'iatul Washliyah di Medan mengatakan : “Ada tiga hal penting agar Muslimat al-Washliyah lebih maju ke depan yaitu : *Pertama*, memiliki manajemen modern yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. *Kedua*, mengacu kepada kepemimpinan yang akuntabel dan transparan. Menjadi pemimpin harus tahan uji dan tahan untuk dikeritik. *Ketiga*, menjalin kerjasama, baik internal maupun eksternal dengan berbagai lembaga dan organisasi yang setara.³⁰ Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Al-Washliyah menjadi perhatian penting dalam pengelolaan manajemen al-Washliyah

d. Sumber Daya Manusia Al-Jam'iatul Washliyah

Al-Jam'iatul Washliyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tinggi. Hal ini menjadi aset yang tidak ternilai dalam kemajuan Al-Jam'iatul Washliyah dari zaman ke zaman. Al-Jam'iatul Washliyah telah memiliki kader – kader dengan SDM yang baik, ini diperoleh dari proses rekrutmen, seleksi, training dan lain untuk ditempatkan pada struktur organisasi dan tempat lainnya di luar Organisasi. Tidak terhitung jumlah para kader al-Washliyah duduk diberbagai jabatan

³⁰Kabarwashliyah.com>2017/01/13, Ketum Muslimat Al-Washliyah Tawarkan Tiga Hal Memajukan Organisasi, Diakses, 07/09/2019

strategis, mulai di pemerintahan, parpol, parlemen, ulama dan lain sebagainya. Semuanya memberikan kontribusi besar tidak saja sebagai penguatan sosial Al-Jam'iatul Washliyah, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat bangsa dan negara.

Keberadaan SDM sangat penting dalam organisasi, terlebih lagi seperti Ormas Al-Jam'iatul Washliyah. SDM inilah yang menggerakkan organisasi, menjalankan lebih baik lagi ke depan. Maka evaluasi SDM penting dilakukan dengan berbagai perombakan yang harus dimaklumi dalam organisasi. Adanya pergantian pengurus dari masa ke masa sebagai bentuk penguatan SDM Al-Jam'iatul Washliyah, agar organisasi semakin segar dan membawa energi positif dalam pengembangan kemajuan Al-Jam'iatul Washliyah. Karena itu Al-Jam'iatul Washliyah senantiasa menyiapkan SDM yang handal tidak saja dari tamatan dalam negeri tetapi juga luar negeri sebagai kader terbaik dalam menggantikan kepemimpinan ke depan.

e. Penguatan Persatuan dan Kesatuan.

Sesuai dengan namanya Al-Jam'iatul Washliyah adalah perhimpunan yang menghimpunkan. Makna ini mengandung prinsip menghubungkan antara umat manusia dengan Allah SWT sebagai pencipta, menghubungkan atau menghimpun manusia dengan manusia lainnya agar bersatu dan menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini sesuai dengan makna *hablum minannas*. Tentu saja prinsip-prinsip yang dibangun dalam Al-Jam'iatul Washliyah mengukuhkan hubungan, salah satu hubungan tersebut adalah sesama manusia. Dengan kata lain prinsip persaudaraan, penguatan persatuan menjadi sebuah keniscayaan dalam ber Al-Jam'iatul Washliyah. Karena itu tidak mengherankan jika prinsip yang diajarkan dari Al-Jam'iatul Washliyah yakni penguatan persaudaraan menjadi Al-Jam'iatul Washliyah sebagai ormas terbesar di Sumut dengan jumlah warga yang melebihi dari Ormas lainnya.

Sebagai organisasi lebih besar di Sumut dari Muhammadiyah dan NU, Al-Jam'iatul Washliyah terus tampil memberikan penguatan

ukhuwah baik antara sesama al-Washliyah maupun di luar al-Washliyah. Al-Jam'iatul Washliyah mampu merajut kebersamaan dengan memupuk rasa persaudaraan yang tinggi menyatu untuk Islam, masyarakat dan negara. Apa yang dilakukan oleh Al-Jam'iatul Washliyah menjadi kekuatan sosial bagi Al-Jam'iatul Washliyah itu sendiri.

3. Kekuatan Ekonomi Al-Jam'iatul Washliyah di Sumatera Utara

Al-Jam'iatul Washliyah sebagai organisasi besar dalam aspek ekonomi mempunyai persoalan yang sama dengan Ormas – ormas lainnya. Persoalan ekonomi menjadi urat nadi baik dalam organisasi secara kelembagaan maupun dalam lingkungan warga Al-Jam'iatul Washliyah tersebut. Persoalan ekonomi menjadi penting dan strategis dibicarakan tanpa ekonomi yang kuat Al-Jam'iatul Washliyah tidak akan mempunyai kekuatan, tidak akan berberpan dan begitu pula tidak akan besar dari zaman ke zaman. Dilihat dari ekonomi warga Al-Jam'iatul Washliyah sendiri khususnya di Sumut boleh dibilang lebih banyak berada pada masyarakat bawah dengan profesi petani, nelayan, wirasawasta dan lainnya. Apalagi basis – basis warga Al-Jam'iatul Washliyah berada daerah – daerah pesisir yang notabenenya berprofesi sebagai nelayan. Semangat membesarkan Al-Jam'iatul Washliyah bukan menjadi persoalan dengan manajemen mandiri, al-Washliyah mampu memotivasi dirinya menggerakkan dalam berbagai amal usaha khususnya bergerak di bidang pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan Tinggi

Pertumbuhan dan perkembangan madrasah semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada, Al-Jam'iatul Washliyah telah memiliki lembaga pendidikan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini :

Tabel.10

Jumlah Madrasah Al- Washliyah Sumatera Utara

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Unit
1	M drasah Ibtidaiyah	279
2	M drasah Tsanawiyah	119
3	M drasah Aliyah	65
	Jumlah	463

Sumber : Laporan Majelis Pendidikan Al-Washliyah Sumatera Utara tahun 2010

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan madrasah dengan berbagai jenjang cukup signifikan yang dimiliki oleh Al-Jam'iatul Washliyah yang mampu tidak saja memberikan kekuatan ekonomi kepada Al-Jam'iatul Washliyah, tetapi juga memberikan kontribusi besar kepada daerah Sumatera Utara. Al-Jam'iatul Washliyah turut mencerdaskan anak – anak Sumut, Al-Jam'iatul Washliyah turut mencetak kader – kader ulama bahkan telah menjadi ulama–ulama besar untuk negeri ini. Begitu pula berbagai profesi lain juga tidak terlepas dari keberhasilan Al-Jam'iatul Washliyah

Seiring dengan itu Al-Jam'iatul Washliyah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat juga melakukan dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibidani Majelis Pembina dan Pengembangan Ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh Halfian Lubis, Ketua Bidang Ekonomi Umat Ormas Al-Jam'iatul Washliyah, mengatakan: “Kita mulai pemberdayaan umat mulai dari grass root, kalangan ini merupakan pendukung utama dan paling banyak dalam suatu ormas. Kemandirian mereka berarti kemandirian Ormas. Karena itu badan usaha yang dibangun harus bisa menyentuh masyarakat umum.”³¹

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Al-Jam'iatul Washliyah telah mendirikan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Badan usaha ini

³¹<https://m.republika.co.id>berita, Al-Jam'iatul Washliyah Berdayakan Umat Dimulai Dari Bawah, Republika online, diakses, 07/09/2019>

didirikan untuk membantu permodalan warga Al-Jam'iatul Washliyah yang ingin membangun usaha. Sumber dana didapatkan dari zakat para muzakki. Dana tersebut diputar sesuai kebutuhan. Anggota BMT Al-Jam'iatul Washliyah berjumlah ribuan orang yang tersebar di Sumatera, Jawa dan di Kalimantan. Induk dari BMT ada di Perguruan Tinggi al-Washliyah yang terdapat propinsi tersebut. Selain permodalan, BMT juga membantu dalam pelatihan manajerial. Peminjam besar maupun kecil, memperoleh kesempatan yang sama. Mereka mendapat pelatihan, memperluas jaringan bagaimana berhadapan dengan Bank, penyusunan rencana dan laporan keuangan dan juga mendapatkan pelatihan kemampuan manajerial bidang produksi.³² Berbagai program terus digulirkan dalam rangka penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Al-Jam'iatul Washliyah.

³² *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tulisan ini ini menyimpulkan beberapa kesimpulan penting menjawab dari rumusan masalah di awal, yakni sebagai berikut:

1. Peta sosial dan ekonomi umat Islam perspektif organisasi kemasyarakatan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al-Jam'iatul Washliyah) di Sumatera Utara (Sumut), memberikan arti penting dan strategis. Karena mapping sosial dan ekonomi dalam berbagai kajian mempunyai tujuan dan manfaat strategis. Adapun tujuannya adalah: Tersusunnya indikator masalah dan jangkauan fasilitas kekuatan sosial dan ekonomi dalam berbagai pendekatan. Diperolehnya peta digitasi sebagai dasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok – kelompok sosial dan ekonomi. Diperolehnya peta peta tematik dengan sistem informasi geografis sehingga diketahui pengaruhnya dari budaya luar. Mengeksplorasi keadaan kondisi masyarakat dan ekonomi masyarakat dalam sebuah komunitas, organisasi maupun negara. Menjadi instrumen untuk penyusunan rencana kerja yang bersifat taktis terhadap problem sosial dan ekonomi. Selanjutnya melakukan pemetaan sosial dan ekonomi juga diperoleh berbagai manfaat strategis pula, yakni : Melakukan pemetaan sosial dan ekonomi bermanfaat dalam analisis situasi dan analisis kebutuhan untuk program penguatan. Melakukan pemetaan sosial dan ekonomi bermanfaat untuk gambaran dasar survei yang disajikan dalam bentuk struktur ruang/daerah lebih komukatif. Melakukan pemetaan sosial dan ekonomi sebagai pemantau tentang perubahan tata

ruang, kondisi daerah, organisasi, komunitas dan negara. Melakukan pemetaan sosial dan ekonomi menjadi analisis prioritas masalah dan lokasi untuk perencanaan kegiatan. Output yang dihasilkan dengan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi adalah data demografi geografi (jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian dan lainnya), agama (jumlah pemeluk agama, rumah ibadah dan lainnya), ekonomi (kondisi ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan lainnya)

2. Kekuatan sosial dan ekonomi yang dibangun NU, Muhammadiyah dan Al-Jam'iatul Washliyah sebagai ormas berkembang di Sumut, dilihat dalam berbagai indikator, meskipun tidak komprehensif indikator – indikator tersebut dipandang representatif melihat kekuatan sosial dan ekonomi yang dibangun.

Pertama, Nahdlatul Ulama (NU), menjadi organisasi terbesar di Indonesia kemudian tumbuh dan berkembang di Sumut. NU menjadi kekuatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sumut. Kekuatan sosial tersebut dapat dilihat kepada : (1). Pokok – pokok pikiran ajaran NU menganut dan mengamalkan ajaran Ahlu Sunnah Wal-Jamaah (Aswaja). Ajaran ini mengajarkan bahwa harus berpegang teguh kepada Alquran dan sunnah sebagai sumber dan ajaran Islam itu sendiri. Dalam ajaran Aswaja mengajarkan prinsip – prinsip penting yakni : *al – Tawasut* (sikap di tengah-tengah), *al – Tawazun* (seimbang dalam segala hal), *al – I'tidal* (tegak lurus) dan *Tasamuh* (Toleransi). Prinsip – prinsip tersebut menjadi kekuatan sosial tidak saja di internal NU, tetapi juga memberikan semangat keterbukaan di luar NU. (2). Jumlah Warga Nahdhiyin di Sumatera Utara tersebar dimana – mana, menjadi indikator penting dalam memberikan kekuatan sosial di Sumut. (3). Melakukan gerakan Pemberdayaan Masyarakat untuk kembali memperjuangkan masyarakat. Karena NU lahir dan besar untuk masyarakat (4). Memiliki sumber daya manusia unggul khususnya di jajaran struktural. SDM menjadi penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi NU itu sendiri. (5). Memiliki kepemimpinan NU bersifat karismatik dan ketauladanan, dipimpin

oleh para ulama mempunyai kepribadian yang berketauladanan. (6). Persatuan dan Kesatuan Warga Nahdliyin, menjadi sifat dan karakter yang melekat di tubuh NU. Hal ini menjadi kekuatan sosial di NU. Selain kekuatan sosial, NU juga memberikan kekuatan ekonomi, dari mapping ekonomi yang dilakukan menunjukkan: (1). Kondisi ekonomi warga Nahdliyin cukup membaik. Pemberdayaan ekonomi menjadi fokus perhatian NU. Melalui Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) didirikan NU guna memberikan solusi terhadap persoalan – persoalan ekonomi terutama di kalangan Nahdliyin. Maka gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi fokus perhatian (2). Konsep dikembangkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan mengangkat secara pelan – pelan kondisi kesenjangan terjadi di tubuh NU sendiri. Menjadi gerakan bersama, mulai dari Pusat hingga wilayah dan cabang – cabang yang ada bahkan diikuti oleh banom dan lembaga yang ada.

Kedua, Muhammadiyah menjadi ormas terbesar di Indonesia. Sosial mapping di Sumut cukup penting dilakukan, Muhammadiyah tidak saja sebagai salah satu ormas, tetapi peran dan eksistensinya di Sumut menjadi asset strategis dalam membangun Sumut. Seiring dengan perjalanan waktu Muhammadiyah muncul menjadi kekuatan sosial yang tidak saja dirasakan oleh kalangan Muhammadiyah di daerah ini, tetapi juga masyarakat Sumut. Terdapat beberapa indikator menjadi mapping sosial Muhammadiyah, dengan indikator : (1). Muhammadiyah memiliki jumlah warga cukup terbesar di Sumut dibandingkan dengan NU (2). Muhammadiyah mengajarkan pokok – pokok pemikiran pembaharuan dan pemurnian terhadap pelaksanaan ajaran Islam. (3). Memiliki amal usaha guna menciptakan Muhammadiyah mandiri dalam bentuk berbagai amal usaha. (4). Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang cukup tinggi khususnya di jajaran struktural. SDM tersebut terlibat dan melibatkan diri dalam berbagai peran dan profesi dibutuhkan negeri ini. (5). Muhammadiyah memiliki kekuatan dalam sistem organisasinya yang tumbuh mandiri, sehingga menjadikan Muhammadiyah besar tidak

saja di dalam negeri tetapi juga di mancanegara. (6). Muhammadiyah membangun gerakan persatuan dan kesatuan tidak saja di warga Muhammadiyah tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Atas dasar itu Muhammadiyah. Selanjutnya Muhammadiyah juga memiliki kekuatan ekonomi, hal ini dapat dilihat kepada : (1). Kondisi ekonomi Muhammadiyah di Sumut cukup membaik. Memiliki badan amal usaha yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi lainnya. Berbagai amal usaha tersebut dikelola secara central dan memiliki manajemen baik dan modern, mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya. Ini menjadi modal dan aset penting membesarkan Muhammadiyah secara organisasi. (2). Melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui amal usaha yang ada. Karena prinsip ajaran Muhammadiyah mengajarkan bahwa Muhammadiyah adalah bagian dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar bersentuhan kepada masyarakat termasuk dalam hal ini membantu masyarakat miskin.

Ketiga, Al-Jam'iatul Washliyah menjadi ormas terbesar di Sumut. Mapping sosial dilakukan untuk melihat pemetaan kekuatan sosial eksistensi Al-Jam'iatul Washliyah di Sumut. Dengan indikator sebagai berikut : (1). Al-Jam'iatul Washliyah memiliki jumlah warga terbesar dibanding NU dan Muhammadiyah, kondisi menjadi kekuatan Al-Jam'iatul Washliyah di Sumut. (2). Al-Jam'iatul Washliyah memiliki dan mengajarkan pokok – pokok pikiran Al-Jam'iatul Washliyah, berazaskan pada ajaran Islam dalam hukum fikih bermazhab Syafii dan dalam i'tiqad Ahlu Sunnah wal –Jamaah. (3). Manajemen Organisasi Al-Jam'iatul Washliyah tampil dalam manajemen mandiri, dikelola melalui kemandirian organisasi dengan sektor pendayagunaan yang dapat mengembangkan Al-Jam'iatul Washliyah. Mulai dari sektor pendidikan, sosial, politik dan lainnya. (4). Al-Jam'iatul Washliyah memiliki sumber daya manusia yang unggul. Hal ini menjadi aset yang tidak ternilai dalam kemajuan Al-Jam'iatul Washliyah dari zaman ke zaman. (5). Al-Jam'iatul Washliyah membangun gerakan penguatan persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan namanya Al-Jam'iatul Washliyah adalah perhimpunan yang menghimpunkan. Makna

ini mengandung prinsip menghubungkan antara umat manusia dengan Allah SWT sebagai pencipta, menghubungkan atau meng-himpun manusia dengan manusia lainnya agar bersatu dan menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Berikutnya selain kekuatan sosial yang menjadi gerakan Al-Jam'iatul Washliyah, kekuatan Ekonomi Al-Jam'iatul Washliyah di Sumatera Utara juga memberikan kontribusi penting yakni : (1). Al-Jam'iatul Washliyah melakukan gerakan peningkatan ekonomi masyarakat, menjadi gerakan menyeluruh mulai dari pusat hingga daerah. (2). Al-Jam'iatul Washliyah melakukan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendirikan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dan berbagai program lain terus digulirkan dalam rangka penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Al-Jam'iatul Washliyah.

B. Saran - Saran

1. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya data terkait dengan mapping sosial dan ekonomi perspektif NU, Muhammadiyah dan Al-Jam'iatul Washliyah. di Sumatera Utara. Data tersebut menjadi informasi penting, apalagi cukup dirasakan kekuarangan data atau data yang ada berbasis tidak kekinian, sehingga mapping menjadi kebutuhan yang kemudian data tersebut menjadi instrument setiap mengambil kebijakan dalam berbagai kepentingan
2. Mapping sosial dan ekonomi perlu dilanjutkan oleh peneliti lanjutan, banyak sisi yang perlu dikembangkan, mulai dari indikator mapping sosial dan ekonomi hingga kepada penggunaan pengkayaan metodologi penelitian. Pengembangan indikator mapping menjadi data penyempurnaan mapping ini. Begitu pula pengembangan metodologi semakin mengakomodir mapping sosial dan ekonomi, sehingga tujuan dan manfaat mapping benar – benar terukur berbasis riset yang sempurna.
3. Eksistensi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara

menjadi penting sebagai lembaga pendidikan tinggi yang harus senantiasa mendorong dan menggalakkan pemetaan berbasis riset pada aspek – aspek kehidupan lainnya. Tidak saja menjadi kebutuhan data, tetapi UIN Sumut khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi menjadikan lembaganya sebagai pusat data tempat rujukan oleh siapapun.

4. Peran dan fungsi ormas (NU, Muhammadiyah dan Al-Jam'iatul Washliyah) sebagai obyek penelitian menjadi penting di Sumut. Penguatan ormas dalam peran dan fungsi selalu dilihat dan diikuti oleh siapapun terutama di kalangan peneliti terkait dengan informasi data perkembangan ormas itu sendiri. Karena itu menampilkan data – data terkini, tidak saja menjadi kebutuhan ormas tetapi juga pihak lain sebagai pusat data.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

AD/ART Al-Jam'iatul Washliyah, 2010, Cet ke 1

Ahmad bin Faris, Abi Husein, *Mu'jam Muqais al-Lugat* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t) Juz V.

Ahmad, Sabaruddin (Ed), *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara* (Medan : Diklat Provsu, 1995)

al-Maududi, Abul A'la, *Fundamentalis of Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1984)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Darul Fikr, 1989)

Budiarjo, Mariam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 1982)

Buku Profile; *The Amazing North Sumatera* (Medan, t.tp, 2008)

Data BPS Sumatera Utara, 2009.

Fadhil Lubis, Nur Ahmad, et.al, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Umat, 2001)

Handoko, T. Hani, *Manajemen* (Yogyakarta : BPE-Yogyakarta, 1998)

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta : Universitas Yarsi, 1999)

Khoiri, Nispul, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara* (Medan : Perdana Publusing, 2010)

—————, *Hukum Perzakatan Di Indonesia* (Bandung : Cita Pustaka, 2012)

L.Daft, Richard, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002)

Mufti, Muslim, *Ekonomi Politik* (Bandung : Pustaka Setia, 2018).

- Muhaimin, et.al, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Pranada Media, 2005)
- Munzur, Ibn, *Lisan al-Arab* (Beirut : Dar al-Fikr; 1990) Jld 14.
- Nasution, Ahmad, *Sejarah Ulama Terkemuka di Sumatera Utara* (Medan : Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 1975)
- Pelly, Usman, et. al, *Teori – Teori Sosial Budaya* (Jakarta : Ditjen Pendidikan Tinggi, 1994)
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, *Sejarah Perkembangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumaera Utara* (Diklat Provsu, t.tp, 1993)
- Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018 (Sumatera Utara : Published By @BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018)
- Rahardja, Prathma, et. al, *Pengantar Ilmu Ekonomi (mikro Ekonomi & Makro Ekonomi* (Jakarta : Lembaga Peneribit Fakultas Ekonomi Universitas, 2008)
- Rahayu, Sri Endang, et.al, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Medan Perdana Publishing, 2016)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017)
- Syaltut, Mahmud, *Islam Akidah dan Syariah* (Jakarta: Pustaka Amani Press, 1986)
- Syamsi, Ibnu,, *Pokok – Pokok Organisasi di Manajemen* (Yogyakarta: 1983)
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010)
- Tisnawati Sule, et.al, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005) Edisi I
- TWH, Muhammad, *Gubernur Pertama dan DPR Sumatera Utara Pertama* (Medan : Yayasan PFPK) RI, 2008)
- Undang – Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme Suatu Analisisi Ekonomi Teoritis*
(Bandung : Remaja Karya, 1986)

B. Situs Internet

<https://m.merdeka.com>>pendidikan, Kisah Hidup K.H. Ahmad Dahlan,
Tokoh Agama Pendiri Muhammadiyah, diakses, 08/09/2019.

<https://3yadi.weebly.com>>agama, Muhammadiyah dan Permebrdayaan
Ekonomi Masyarakat. Diakses, 07/09/2019

<https://databoks.katadata.co.id>, Jumlah Penduduk Terbanyak di
Sumatera Utara, Diakses 19/09/2019

<https://hasanuddinali.com>. Menakar Jumlah Jamaah NU dan
Muhammadiyah, diakses 02/09/2019

<https://hasanuddinali.com>. Menakar Jumlah Jamaah NU dan
Muhammadiyah, diakses 02/09/2019

<https://m.bisnis.com>, Pemberdayaan Ekonomi NU Bisnis.com, diakses
06/09/2019

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3594321/5-Strategi-Pemerintah-Tekan-Angka-Kemiskinan>, diakses 01/10/2019

<https://m.republika.co.id>>berita, Al-Jam'iatul Washliyah Berdayakan
Umat Dimulai Dari Bawah, Republika online, diakses, 07/
09/2019

<https://nasional.kompas.com>>read. Kultur Pesantren, Kekuatan
NU Halaman all – Kompas.com, diakses, 13/09/2019

<https://news.okezone.com>>read > Syarat Mutlak Pemimpin NU
Versi Gus Mus, diakses 05/09/2012

<https://www.nu.or.id>>post>read, Gus Sholah : NU Kekuatan Utama
Masyarakat Sipil – NU Online, Diakses, 13/09/2019

<https://www.nu.or.id>>post>read, Kebesaran Jiwa dan Sikap Toleran
KH Hasyim Asy'ari – NU Online, diakses, 04/09/2012

<https://www.nu.or.id>>post>read, Kiay Musyfiq Jelaskan Manfaat Ikut Nahdlatul Ulama – NU Online, diakses 04/09/2019.

[Httts:// www,nu.or.id](https://www.nu.or.id) > post > read, Pemberdayaan Ekonomi Salah Satu Motif Berdirinya NU – NU Online. Diakses, 05/09/2019.

kabarwashliyah.com>2014/01/21, Akidah Al-Jam’iatul Washliyah: Kabar Washliyah Diakses, 07/09/2019

Kabarwashliyah.com>2017/01/13, Ketum Muslimat Al-Washliyah Tawarkan Tiga Hal Memajukan Organisasi, Diakses, 07/09/2019

M.muhammadiyah.or.id> news, Lima Prinsip Gerakan Menjadi Kekuatan Muhammadiyah Bertahan Maju. Diakses, 05/09/2019

M.muhammadiyah.or.id> news, Lima Prinsip Gerakan Menjadi Kekuatan Muhammadiyah Bertahan Maju. Diakses, 05/09/2019

M.muhammadiyah.or.id>news, Bagaimana Muhammadiyah di Luar Negeri? Simak Cerita Mereka Para Kader Persyarikatan, Diakses, 05/09/2019.

Pratsetya.blogspot.com>2016/04, Tugas Softskill “Makalah Pemetaan Sosial Kota Depok – AntonPrast, diakses, 10/09/2019

Republika.co.id, 4 Kekuatan Umat Islam Diwariskan Rasulullah, Diakses tgl, 11/06/2019.

www.gurupendidikan.co.id, diakses, 07/09/2019

www.edufunia.com. Defenisi dan Pengertian peta, diakses, 07/09/2019

www.muslimoderat.net.PCINU, NU Ormas Terbesar Dunia dengan 194 Cabang Negara – Muslimoderat. Diakses 12/09/2019

C. Wawancara

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara

Pimpinan Wilayah Al – Jam’iatul Washliyah Sumatera Utara

TENTANG PENULIS



Nispul Khoiri, lahir pada tanggal 06 April 1972 di desa Bedagei Tg. Beringin Serdang Bedagei, putera dari M. Arifin (Ayah/Almarhum) dan Hamimah (Ibu). Menikah tahun 2002 dengan Dra. Hj. Syadar Diana, dan telah dikarunia dua orang putri : Uci Najmi Syifa (2004) dan Tasykira Rizki Khairina (2005).

Menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Bedagei Tg. Beringin 6 tahun (1986), Madrasah Tsanawiyah Bedagei Tg. Beringin (1988), Madrasah al-Qismuali Bedagei Tg. Beringin (1992), S.1 Fakultas Syariah IAIN-SU (1997), S.2 IAIN-SU Hukum Islam (2001) dan S.3 IAIN-SU Hukum Islam (2014). Sekarang penulis adalah dosen Pasca-sarjana UIN Sumatera Utara, dosen Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN-SU, dosen Fakultas Ilmu Sosial, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam bidang ilmu Hukum Islam (Ushul Fikih – Fikih).

Buku-buku yang sudah diterbitkan : Peta Dakwah Sumatera Utara (2011), Hukum Perzakatan Indonesia (2012), Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga *Maqashid al-Syariah* (2014), Ushul Fikih (2015), Hukum Kekeluargaan Islam (2016), Fikih Kontemporer (2016), Ilmu – Ilmu Studi Alquran (2018), Hukum dan Manajemen Nirlaba (2018) dan Pola Antisipasi Radikalisme Berbasis Masyarakat Indonesia (2019).

Selain staf pengajar UINSU, narasumber dan penulis buku, aktif pula di berbagai kepengurusan lembaga dan organisasi yaitu: Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Pengurus MUI Sumatera Utara, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara (FKUB Sumut), Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID Sumut) Sumatera Utara. Pengurus

Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ketua Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Medan (Mabincab PMII Medan). Ketua Majelis Zikir Hubbul Wathan Sumatera Utara (MDHW Sumut). Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (PW-ISNU Sumut)